

LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2020
SUSTAINABILITY REPORT



EMBRACING SUSTAINABILITY





EMBRACING SUSTAINABILITY

PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION

Tahun 2020 merupakan tahun penuh makna bagi PT Bank BNI Syariah. Tepat 10 tahun setelah *spin off* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., BNI Syariah berhasil naik peringkat sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3, yaitu bank dengan modal inti di atas Rp5-30 triliun. Dengan menjadi BUKU 3, maka Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih beragam kepada nasabah sehingga peluang untuk terus berkembang dan berkelanjutan semakin besar.

Keberhasilan BNI Syariah naik peringkat tersebut bersamaan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Penerapan itu ditandai dengan terbitnya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BNI Syariah Tahun 2020, yang berisi program-program prioritas keuangan berkelanjutan yang harus dilaksanakan selama tahun pelaporan. Melalui laporan inilah, pencapaian program-program prioritas tersebut disampaikan.

BNI Syariah sepenuhnya mendukung penerapan keuangan berkelanjutan karena lembaga jasa keuangan sudah semestinya bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya. Melalui dukungan itu, maka BNI Syariah telah berada di jalur yang benar, yaitu bank yang menerapkan sistem keuangan yang ramah lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, maka dalam menjalankan usaha, Perusahaan berkomitmen untuk menjaga keselarasan antara aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*).

Pencapaian BNI Syariah semakin lengkap dengan keberhasilannya meraih target-target yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 hasil Revisi sebagai respons atas pandemi Covid-19. Di tengah perekonomian Indonesia yang masuk ke zona resesi, kemampuan dalam meraih kinerja yang sangat membanggakan tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan nasabah atas produk dan layanan BNI Syariah. Bagi Perusahaan, kepercayaan tersebut merupakan modal utama untuk mewujudkan usaha yang berkelanjutan.

2020 is a meaningful year for PT Bank BNI Syariah. Exactly 10 years after the spin-off from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., BNI Syariah managed to climb the rankings as a Commercial Bank for Business Activities (BUKU) 3 category, namely a bank with a core capital of more than IDR 5-30 trillion. By becoming a part of BUKU 3 category bank, the Company can provide a more diverse range of services to customers so that the opportunity to continue to grow and be sustainable is even greater.

The success of BNI Syariah in increasing the rankings coincided with the implementation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies. The implementation was marked by the publication of Sustainable Finance Action Plan (RAKB) BNI Syariah 2020, which contains financial priority programs to be implemented during the ongoing financial year. Through this report, the achievements of these priority programs are conveyed.

BNI Syariah fully supports the implementation of sustainable finance because financial service institutions are supposed to be responsible and careful in lending. Through this support, BNI Syariah is on the right track, namely a bank that implements an environmentally friendly financial system. With this policy, in operating its business, the Company is committed to maintaining harmony between the aspects of economy (*profit*), social (*people*) and environment (*planet*).

The achievement of BNI Syariah is more complete with its success in achieving the targets set out in the Revised 2020 Bank Business Plan in response to the Covid-19 pandemic. In the midst of the Indonesian economy that is entering a recession zone, the ability to achieve such a proud performance is evidence of increasing customer confidence in BNI Syariah products and services. For the Company, this trust is the main asset to create a sustainable business.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Penjelasan Tema <i>Theme Explanation</i>	3
Daftar Isi <i>Table of Contents</i>	4
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2020 <i>2020 Sustainability Performance Highlights</i>	6
Laporan Direksi <i>Report Of The Board Of Directors</i>	8
Tentang Laporan Keberlanjutan <i>About The Sustainability Report</i>	18
Rujukan Laporan dan External Assurance <i>Report Reference and External Assurance</i>	19
Proses Penetapan Isi Laporan <i>Process of Determining Report Content</i>	19
Daftar Topik Material dan Batasan <i>List of Material Topic and Boundaries</i>	22
External Assurance <i>External Assurance</i>	23
Umpan Balik <i>Feedback</i>	23
Kontak Kami <i>Contact Us</i>	24
Keterlibatan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders Engagement</i>	25
BNI Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan <i>BNI Syariah And Sustainable Development</i>	30
Penerapan Prinsip-prinsip Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Implementation of Sustainable Finance Principles</i>	31
Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Sustainable Finance Action Plan (RAKB) Goals	32
Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan Parties Responsible for Implementation of Sustainable Finance Program	34
Rekapitulasi Pelaksanaan RAKB 2020 Summary of RAKB 2020 Implementation	34
Hambatan dan Solusi <i>Obstacles and Solutions</i>	35
Implementasi RAKB 2021 RAKB 2021 Implementation	35
Profil Bank BNI Syariah <i>Bank BNI Syariah's Company Profile</i>	38

Data Perusahaan <i>Company Data</i>	39
Sekilas Bank BNI Syariah <i>BNI Syariah At A Glance</i>	40
Budaya Kerja <i>Work Culture</i>	42
Bidang Usaha, Produk Dan Jasa <i>Business Sector, Products And Services</i>	45
Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholders Composition</i>	45
Entitas Anak <i>Subsidiary</i>	45
Struktur Grup Perusahaan <i>Company Group Structure</i>	45
Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	46
Target Pasar <i>Target Market</i>	48
Jaringan Dan Wilayah Operasional <i>Network And Regional Operations</i>	50
Skala Organisasi <i>Organization Scale</i>	52
Informasi Mengenai Karyawan <i>Information Regarding Employees</i>	53
Perjanjian Perundingan Kolektif <i>Collective Bargaining Agreement</i>	55
Rantai Pasokan <i>Supply Chain</i>	56
Perubahan Signifikan Pada Perusahaan Dan Rantai Pasokannya <i>Significant Changes To The Company And Its Supply Chain</i>	57
Pendekatan Atau Prinsip Pencegahan <i>Precautionary Principles Or Approaches</i>	57
Penerapan Standar Eksternal <i>Application Of External Standards</i>	58
Keanggotaan Dalam Asosiasi <i>Membership In The Association</i>	60
Tata Kelola Keberlanjutan <i>Sustainability Governance</i>	64
Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure</i>	65
Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting Of Shareholders</i>	67
Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>	68
Dewan Komisaris <i>Board Of Commissioners</i>	69
Direksi <i>Board Of Directors</i>	70
Pengembangan Kompetensi Direksi, Dewan Komisaris Tahun 2020 Competency Development Of The Board Of Directors And Board Of Commissioners In 2020	71



Manajemen Risiko Risk Management	77	Pengelolaan K3 OHS Management	124
Kode Etik Dan Integritas Code Of Ethics And Integrity	80	Work Life Balance	126
Anti Gratifikasi Anti Gratification	83	Kinerja K3 Tahun 2020 OHS Performance 2020	126
Sistem Pelaporan Pelanggaran Violation Reporting System	85	Membangun Kepedulian Untuk Sesama Developing Empathy	127
Kukuh Di Tengah Resesi Solid In The Midst Of The Recession	90	Pengelola Program CSR CSR Program Management	128
Tinjauan Ekonomi Nasional Tahun 2020 National Economic Review 2020	90	Strategi dan Program Kerja Dalam Menangani Isu-Isu Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Strategies and Work Programs in Handling Social, Economic and Environmental Issues	130
Kinerja BNI Syariah BNI Syariah Performance	90	Prioritas Target Penerima Program Priority Target Recipients of the Program	131
Distribusi Nilai Ekonomi Economic Value Distribution	93	Pilar Program YHT YHT Program Pillars	133
Kontribusi terhadap Negara Contribution to the State	94	Biaya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Costs of Social and Environmental Responsibility Program	133
Bersaing secara Sehat Fair Competition	95	Penyaluran Dana Zakat BNI Syariah BNI Syariah Zakat of Funds Distribution	134
Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Berkelanjutan Realizing Sustainable Environmental Sustainability	100	Tiga Prinsip Utama Program CSR Three Main Principles of CSR Programs	135
Komitmen BNI Syariah BNI Syariah Commitment	101	Kegiatan yang Dijalankan Activities Carried Out	136
Pembiayaan Hijau sebagai Produk Ramah Lingkungan Green Financing as an Environmentally Friendly Product	103	Menjaga Kualitas Layanan Dan Kepercayaan Nasabah Maintaining Quality Of Service And Customer Trust	138
Operasional Kantor Ramah Lingkungan Environmentally Friendly Office Operations	104	Sarana Pengaduan Nasabah Customer Complaints Facility	139
Biaya Lingkungan Environmental Cost	109	Mekanisme Pengaduan Nasabah Customer Complaint Mechanism	139
Kepatuhan Lingkungan Environment Compliance	109	Penanganan Pengaduan Nasabah Handling of Customer Complaints	140
Sumber Daya Insani Sebagai Penopang Kemajuan Human Resources As The Support Of Progress	112	Survei Kepuasan Nasabah Customer Satisfaction Survey	141
Strategi Pengembangan SDI SDI Development Strategy	113	Kepatuhan Sosial dan Ekonomi Social and Economic Compliance	141
Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Training and Capacity Building	114	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Keberlanjutan PT BANK BNI SYARIAH 2020 Statement Of Responsibility For The Sustainability Report Of PT BANK BNI SYARIAH 2020	142
Tinjauan dan Penilaian Kinerja Pegawai Employee Performance Review and Assessment	115	Indeks Isi GRI Standards GRI Standard Contents Index	144
Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Opportunity to Work	116	Daftar Indeks POJK 51/2017 Index List POJK 51/2017	150
Rekrutmen dan Turnover Pegawai Employee Recruitment and Turnover	116	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya Response To Previous Year Report Feedback	154
Tunjangan Pegawai Berdasarkan Status Employee Benefits Based on Status	120	Lembar Umpan Balik Feedback Form	155
Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	120		
Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	121		
Mewujudkan Lingkungan Kerja Sehat Dan Aman Realizing A Healthy And Safe Working Environment	124		



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2020

2020 SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019	2018
Aspek Ekonomi [B.1] Economic Aspects [B.1]				
Kuantitas produk/jasa Quantity of products/services	Jenis Produk/ Jasa Type of products/ services	<ul style="list-style-type: none"> 14 Produk Simpanan 12 Produk Pembiayaan Konsumen 12 Produk Pembiayaan Komersial 5 Jasa e-Banking 5 Jasa Lainnya (Jasa Bisnis, Keuangan, Kelembagaan, Bisnis Internasional, dan layanan treasuri) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 Produk Simpanan 12 Produk Pembiayaan Konsumen 3 Produk Pembiayaan Mikro 7 Produk Pembiayaan SME dan Komersial 5 Jasa e-Banking 20 Jasa Lainnya (internasional, treasuri, keuangan, bisnis dan kelembagaan) 	<ul style="list-style-type: none"> 17 Produk Simpanan 12 Produk Pembiayaan Konsumen 12 Produk Pembiayaan Komersial 7 Jasa Bisnis 8 Jasa Keuangan 3 Jasa Kelembagaan 6 Jasa e-Banking 2 Jasa Bisnis Internasional 2 Layanan Treasuri
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Fund Management Revenue by Bank as Mudharib	Miliar Rupiah in Billion Rupiah	4.095	4.082	3.599*
Laba atau Rugi Bersih Tahun Berjalan Current Year Net Profit or Loss	Miliar Rupiah in Billion Rupiah	505	603	416
Produk ramah lingkungan Eco-friendly product	Unit Produk/ Jasa Product/Service Unit	N/A*	N/A*	N/A*



Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019	2018
Pelibatan-pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan Involvement of local parties related to the Sustainable Finance business process	Perusahaan/ Mitra Pemasok Companies/ Supply Partners	223	275	76
Aspek Lingkungan [B.2] Environmental Aspects [B.2]				
Penggunaan BBM (Kantor Pusat) Use of Fuel (Head Office)	Liter in Litre	28.841	28.171	N/A**
	GigaJoules	986,36	963,45	N/A**
Penggunaan listrik (Kantor Pusat) Use of Electricity (Head Office)	kWh In kWh	307.583	362.7228	N/A**
	GigaJoules	1.107,30	1.305,82	N/A**
Penggunaan Air* -PDAM -Air Tanah Water usage* -PDAM -Groundwater	Meter kubik Meter kubik in cubic metre in cubic metre	N/A*** N/A***	N/A***	N/A***
Aspek Sosial [B.3] Social Aspects [B.3]				
Jumlah Karyawan Number of Employees	Orang Number of People	5.738	5.723	4.942
Jumlah Karyawan Tetap Number of Permanent Employees	Orang Number of People	5.209	4.475	4.175
Jumlah Karyawan Kontrak dan Trainee Number of Contract Employees and Trainees	Orang Number of People	529	1.248	755
Jumlah Kecelakaan Kerja Number of Work Accidents	Kasus Number of Case	Nihil Zero	Nihil Zero	Nihil Zero
Zakat Perusahaan dan Pegawai Company and Employee Zakat	Jutaan Rupiah in million Rupiah	(33.124)	(25.058)	(20.315)

*Data Kantor Pusat

N/A* : BNI Syariah belum memiliki produk ramah lingkungan

N/A**: Data tidak tersedia

N/A*** : Pada tahun 2018-2020, total penggunaan air tidak bisa disajikan karena pengelola Gedung Tempo Pavillion 1 yang merupakan Kantor Pusat BNI Syariah tidak memberikan data detail penggunaan volume air PAM, berikut biaya penggunaan air PAM, semua jadi satu pada tagihan pengelolaan gedung Tempo Pavillion 1

*Head Office data

N/A*: BNI Syariah does not have eco-friendly products

N/A**: Data not available

N/A***: In the years 2018-2020, the total water usage could not be presented because the management of the Tempo Pavillion 1 Building, which is the domicile of BNI Syariah Head Office, did not provide detailed data on the use of PAM water volume, along with the cost of using PAM water, all is integrated on the bill for managing the Tempo Pavillion 1 building



LAPORAN DIREKSI [GRI 102-14] [D.1]

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 102-14] [D.1]



Abdullah Firman Wibowo
Direktur Utama
President Director



ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehendak-Nya, PT Bank BNI Syariah bisa melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja yang sangat membanggakan. Tantangan terberat selama tahun pelaporan adalah masuknya Indonesia ke zona resesi akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Kondisi tersebut berdampak nyata terhadap semua sektor kehidupan, termasuk perbankan nasional yang mengalami stagnasi dalam realisasi pembiayaan.

Kami bersyukur, dalam kondisi seperti itu, BNI Syariah tetap mampu menunjukkan pertumbuhan bisnis yang positif, termasuk dalam pembiayaan, *market share* terhadap industri syariah, dan sebagainya. Melalui Laporan Keberlanjutan PT BNI Syariah 2020 inilah, kami menyampaikan pencapaian kinerja keberlanjutan selama tahun 2020. Selain kinerja ekonomi, laporan ini juga mengulas berbagai kebijakan, strategi, dan dampak terkait kinerja sosial dan lingkungan.

Laporan keberlanjutan ini merupakan laporan pertama yang diterbitkan BNI Syariah sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik per 1 Januari 2020. Dalam perkembangannya, pada akhir Maret 2020, BNI Syariah berhasil naik kelas menjadi ke BUKU 3. Walau demikian, sebelum OJK mewajibkan penerbitan laporan keberlanjutan, BNI Syariah sudah menerbitkan laporan serupa secara rutin setiap tahun, dan tahun 2020 merupakan penerbitan ketujuh.

Respons terhadap Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan dan kelestarian bumi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk bagi korporasi seperti BNI Syariah. Dalam hal ini, BNI Syariah berkomitmen untuk menerapkan Prinsip Keuangan Berkelanjutan, yang mulai dikenal dengan hadirnya konsep *Triple Bottom Line* atau the 3P (*Profit, People, Planet*). Konsep ini diusung karena semakin banyak perusahaan yang dinilai kurang memperhatikan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dengan pemberdayaan sosial dan penjagaan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya. Melalui implementasi 3P, bersama korporasi yang lain, BNI Syariah telah turut serta menjaga kelestarian bumi, termasuk mengurangi dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim.

1. Penjelasan Nilai Keberlanjutan Perusahaan

Nilai-nilai universal keuangan berkelanjutan pada dasarnya telah dijalankan oleh BNI Syariah sejak berdiri pada tahun 2010. Hal itu tercermin dalam dua dari lima misi BNI Syariah, yaitu 1) memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, dan 3) memberikan nilai investasi

Peace and Allah's mercy and blessings be upon you

Dear shareholders and stakeholders,

All praise is due to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given his blessings and gifts so that PT Bank BNI Syariah can go through the Fiscal Year 2020 with a proud performance. The toughest challenge during the reporting year was Indonesia's entry into a recession zone due to the prolonged Covid-19 pandemic. This condition had a real impact on all sectors of life, including national banking, which experienced stagnation in the realization of financing.

We are grateful that, in such conditions, BNI Syariah was still able to show positive business growth, including in financing, market share in the sharia industry, and so on. Through this PT BNI Syariah 2020 Sustainability Report, we convey the achievements of sustainability performance in 2020. In addition to economic performance, this report also reviews various policies, strategies, and impacts related to social and environmental performance.

This sustainability report is the first report issued by BNI Syariah as a Commercial Bank for Business Activities (BUKU) II since the enactment of the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies as of January 1, 2020. In its development, at the end of March 2020, BNI Syariah succeeded in advancing to BUKU 3 category. However, before the OJK required the issuance of sustainability reports, BNI Syariah had already published similar reports regularly every year, and 2020 will be the seventh publication.

Responses to Challenges in Fulfilling the Sustainability Strategy

Sustainability and preservation of the earth is a shared responsibility, including for corporations such as BNI Syariah. In this case, BNI Syariah is committed to implementing the Principles of Sustainable Finance, which has become known by the presence of the Triple Bottom Line or the 3P (*Profit, People, Planet*) concept. This concept was promoted because more and more companies were deemed to have paid less attention to the balance between corporate profits and social empowerment and environmental preservation in running their businesses. Through the 3P implementation, along with other corporations, BNI Syariah has participated in preserving the earth, including reducing the impact of global warming and climate change.

1. Explanation of the Company's Sustainability Value

The universal values of sustainable finance have basically been implemented by BNI Syariah since its establishment in 2010. This is reflected in two of the five missions of BNI Syariah, namely 1) making a positive contribution to society and caring for environmental sustainability, and 3) providing investment value



yang optimal bagi investor. Oleh karena ada irisan dan persamaan, maka sosialisasi nilai-nilai keuangan berkelanjutan sekaligus bisa dilakukan bersamaan dengan sosialisasi misi dan visi BNI Syariah, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Sosialisasi nilai-nilai keberlanjutan untuk kalangan internal dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memanfaatkan media komunikasi, seperti pelatihan, sosialisasi internal, termasuk melalui media digital (video/e-learning/digital flyer, dan lain-lain). Sedangkan sosialisasi untuk kalangan eksternal, terutama nasabah pada Program Prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dilakukan melalui serangkaian edukasi.

2. Respons terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi BNI Syariah menerapkan keuangan berkelanjutan, dan terdapat sejumlah isu yang mesti dihadapi dan menuntut adanya solusi terbaik. Salah satu isu krusial menyangkut tentang keberlangsungan bisnis, terutama akibat terjadinya pandemi Covid-19. Terhadap isu tersebut, BNI Syariah telah melakukan langkah-langkah terbaik, antara lain, melakukan penyesuaian target dan strategi terkait aset, pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Ekuitas, Laba, CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF (Non Performing Loan), FAR (Financing at Risk) dan Coverage.

Sebagai bentuk transparansi, BNI Syariah menyampaikan rencana penyesuaian target dan strategi tersebut kepada publik sehingga seluruh pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Selepas itu, segenap insan BNI Syariah berkomitmen untuk mewujudkan target dan strategi hasil revisi tersebut dengan bekerja secara optimal. Walhasil, pada akhir tahun 2020, BNI Syariah berhasil menggapai target-target hasil revisi sehingga isu terkait keberlangsungan bisnis terjawab. Dalam hal ini, BNI Syariah terbukti mampu mempertahankan kinerja yang positif, sekaligus mampu mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

3. Komitmen dalam Pencapaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sesuai dengan RAKB, komitmen BNI Syariah terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan dengan menyusun Enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan. Keenam program tersebut adalah a. Peningkatan Pembiayaan UMKM; b. Peningkatan Portfolio Pembiayaan Lembaga Pendidikan; c. Peningkatan Portfolio Pembiayaan Ekosistem Jasa Kesehatan; d. Wakaf Hasanah; e. Penyaluran Zakat Perusahaan; dan, f. Eco Lifestyle. Program Prioritas tersebut ditetapkan pada Rapat Direksi tanggal 18 Oktober 2019 dan Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Oktober 2019. Sebelumnya, pemilihan keenam Program Prioritas dirumuskan berdasarkan hasil konsultasi internal dan eksternal, termasuk dengan konsultan.

optimal for investors. Because there are similarities, the dissemination of sustainable financial values can be done simultaneously with the dissemination of BNI Syariah's mission and vision, both to internal and external stakeholders.

The dissemination of sustainability values for the internal community is carried out through various activities using communication media, such as training and internal dissemination including through digital media (video/e-learning/digital flyers, etc.). Meanwhile, outreach for external circles, especially customers in the Sustainable Finance Action Plan Priority Program (RAKB), was carried out through a series of educations.

2. Responses to Issues Related to the Implementation of Sustainable Finance

2020 is the first year for BNI Syariah to implement sustainable finance, and there are a number of issues that must be faced and demand the best solutions. One of the crucial issues concerns business continuity, especially as a result of the Covid-19 pandemic. Regarding this issue, BNI Syariah has taken the best steps, including adjusting targets and strategies related to assets, financing, Third Party Funds, Equity, Profits, CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF (Non Performing Loans), FAR (Financing at Risk) and Coverage.

As a form of transparency, BNI Syariah submits plans to adjust targets and strategies to the public so that all stakeholders get valid and accountable information. After that, all BNI Syariah personnel are committed to realizing the revised targets and strategies by working optimally. As a result, by the end of 2020, BNI Syariah succeeded in achieving the revised targets so that issues related to business continuity were answered. In this case, BNI Syariah has proven to be able to maintain positive performance, as well as being able to validate the trust of stakeholders.

3. Commitment in Achieving Sustainable Finance Implementation

In accordance with the RAKB, BNI Syariah's commitment to the implementation of sustainable finance is carried out by compiling Six Priority Programs for Sustainable Finance. The six programs are a. Increasing MSMEs Financing; b. Increasing the Financing Portfolio of Educational Institutions; c. Increasing the Health Service Ecosystem Financing Portfolio; d. Hasanah Waqf; e. Distribution of Company Zakat; and, f. Eco Lifestyle. The Priority Programs were determined at the Board of Directors Meeting on 18 October 2019 and the Board of Commissioners Meeting on 22 October 2019. Previously, the selection of the six Priority Programs was formulated based on the results of internal and external consultations, including with consultants.



BNI Syariah telah memetakan keenam Program Prioritas terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dari 17 SDGs, keenam program turut berkontribusi terhadap pencapaian 12 SDGs. Sebagai program yang berkesinambungan, keenam program tersebut akan dilaksanakan hingga lima tahun berikutnya, dan BNI Syariah telah menetapkan target pencapaian yang harus diraih di mana jumlah dan persentasenya terus meningkat dari tahun ke tahun.

4. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pada akhir tahun 2020, BNI Syariah telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target Enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan tahun pertama. Berdasarkan evaluasi tersebut terdapat beberapa target yang belum bisa diwujudkan. Misalnya, pembiayaan lembaga pendidikan mengalami *delay* karena sektor ini merupakan salah satu yang terdampak Covid-19. Sementara itu, pembiayaan ekosistem jasa kesehatan di saat Covid-19 belum dapat mencapai rencana awal karena hanya ditujukan ke institusi Rumah Sakit Klinik, dan/atau penyedia alkes. Berdasarkan evaluasi tersebut, BNI Syariah telah merumuskan usulan perbaikan, antara lain, perlunya diversifikasi sektor, seperti kepada *start up* pendidikan maupun sektor penunjang pendidikan, atau diversifikasi ke sektor *start up* kesehatan yang mengalami kenaikan cukup tinggi.

Evaluasi pada tahun 2020 menjadi bahan bagi BNI Syariah untuk melakukan langkah perbaikan sehingga indikator keberhasilan dari tahun ke tahun hingga tahun kelima, sebagaimana disampaikan dalam RAKB, dapat terwujud. Sejumlah penghargaan dari pihak eksternal terhadap pencapaian BNI Syariah menjadi pemicu semangat, antara lain, *Best Leader For Business Sustainability Through Business Innovation-Effectiveness Of Digital Acceleration*, dan *Top CSR Awards 2020 #Star 3*.

5. Tantangan Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan evaluasi terhadap Enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan tahun 2020, BNI Syariah telah memetakan berbagai tantangan yang dihadapi, dan berdampak signifikan terhadap indikator pencapaian setiap program. Tantangan terbesar adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang diikuti dengan keluarnya kebijakan pembatasan mobilitas sosial/masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, BNI Syariah telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dalam operasional sehari-hari, termasuk yang berkaitan dengan implementasi Enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, khususnya terkait pandemi Covid-19, BNI Syariah senantiasa mendukung langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sebagai masalah bersama, pandemi sudah seharusnya dihadapi bersama-sama, termasuk oleh korporasi seperti BNI Syariah. Sementara itu, untuk meningkatkan pencapaian Enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan yang belum optimal, Perusahaan telah mengusulkan sejumlah perbaikan, antara lain, perlunya diversifikasi di sektor pendidikan

BNI Syariah has mapped the six Priority Programs towards the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Of the 17 SDGs, the six programs contributed to the achievement of 12 SDGs. As a continuous program, the six programs will be implemented for the next five years, and BNI Syariah has set achievement targets that must be achieved where the number and percentage continues to increase from year to year.

4. Achievement of Sustainable Finance Implementation Performance

At the end of 2020, BNI Syariah has evaluated the achievement of the target of the Six Priority Sustainable Finance Programs for the first year. Based on this evaluation, there are several targets that have not been realized. For example, funding for educational institutions has been delayed because this sector is one of the sectors affected by Covid-19. Meanwhile, the financing of the health service ecosystem at the time of Covid-19 could not yet reach the original plan because it was only aimed at clinical hospital institutions and/or medical equipment providers. Based on this evaluation, BNI Syariah has formulated improvement proposals, among others, the need for sector diversification, such as for educational start-ups and education support sectors, or diversification into the health start-up sector which has experienced a high increase.

Evaluation in 2020 becomes the focus for BNI Syariah to take corrective steps so that the success indicators from year to year to the fifth year, as stated in the RAKB, can be realized. A number of awards from external parties for the achievement of BNI Syariah have been a boost for enthusiasm, including *Best Leader For Business Sustainability Through Business Innovation-Effectiveness Of Digital Acceleration*, and *Top CSR Awards 2020 #Star 3*.

5. Challenges of Achieving Sustainable Finance Implementation Performance .

Based on the evaluation of the Sustainable Finance Six Priority Program 2020, BNI Syariah has mapped out a variety of challenges, and a significant impact on the achievement indicators for each program. The biggest challenge is the Covid-19 pandemic which was followed by the issuance of policies to restrict social/community mobility. As a form of support for this policy, BNI Syariah has made various policy adjustments in day-to-day operations, including those related to the implementation of the Six Priority Sustainable Finance Programs.

Facing these various challenges, especially related to the Covid-19 pandemic, BNI Syariah always supports the steps and policies taken by the government. As a common problem, pandemics should be faced together, including by corporations such as BNI Syariah. Meanwhile, to increase the sub-optimal achievement of the Six Priority Programs for Sustainable Finance, the Company has proposed a number of improvements, among others, the need for diversification in the education and health sectors. Through this diversification, the target coverage



dan kesehatan. Melalui diversifikasi tersebut, maka sasaran cakupan akan semakin luas sehingga berpeluang besar untuk meningkatkan rasio keberhasilan program-program yang telah ditetapkan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Selain Enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan, BNI Syariah menerapkan keuangan berkelanjutan pada setiap aspek operasional usaha meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagaimana konsep *Triple Bottom Line* atau the 3P (*Profit, People, Planet*). Pencapaian ketiga aspek memerlukan usaha ekstra karena semuanya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

1. Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pada tahun 2020, di tengah kondisi perekonomian yang begitu sulit, segenap insan BNI Syariah terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan target-target ekonomi yang telah dirumuskan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk target-target hasil revisi untuk menyikapi pandemi Covid-19. Kami bersyukur bahwa upaya dan kerja keras tersebut membawa hasil yang sangat menggembirakan. Sebagai contoh, sesuai RBB Revisi, target Aset adalah Rp51,32 triliun dan tercapai Rp55,01 triliun; Pembiayaan target Rp32,93 triliun, dan tercapai Rp33,05 triliun; sedangkan target Laba Bersih sebesar Rp457 miliar, dan tercapai Rp505 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2021, BNI Syariah akan resmi bergabung dengan Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Tanggal efektif penggabungan adalah 1 Februari 2021. Adapun target Laba Bank hasil penggabungan tahun 2021 adalah Rp2,9 triliun; Pembiayaan Rp166,86 triliun; dan, Aset sebesar Rp247,67 triliun.

Di bidang lingkungan, sesuai dengan spirit keberlanjutan, pada tahun 2020, BNI Syariah berhasil melakukan efisiensi penggunaan listrik di Kantor Pusat sebesar 55.145 kWh atau setara dengan Rp84.649.508; sementara itu penggunaan kertas berhasil dikurangi hingga 1.352 rim. Pencapaian lain, BNI Syariah melakukan kegiatan berupa pembuatan 1.220 Lubang Resapan Biopori (LRB) di seluruh outlet BNI Syariah. Program ini dipilih karena selaras dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didukung oleh pemerintah daerah dan beberapa institusi lainnya, yaitu gerakan 5 juta Lubang Resapan Biopori di Indonesia.

Adapun di bidang sosial, melalui Yayasan Hasanah Titik (YHT) sebagai pengelola dan pelaksana program dan aktivitas CSR BNI Syariah, telah menerima zakat sebesar Rp31,79 miliar. Adapun penyaluran zakat di bidang ekonomi, dakwah, kesehatan, pendidikan, dan sosial sebesar Rp15,99 miliar. Sementara itu, penyaluran zakat untuk kerja sama inisiatif zakat Indonesia, hak amil, dan biaya administrasi bank sebesar Rp6,78 miliar. Dengan demikian, total penyaluran zakat sebesar Rp22,77 miliar.

will be more extensive allowing for a bigger opportunity to increase the success ratio of the programs that have been determined.

Sustainable Finance Implementation

In addition to the Six Priority Programs for Sustainable Finance, BNI Syariah implements sustainable finance in every aspect of its business operations including economy, social and environment, as in the Triple Bottom Line or the 3P (Profit, People, Planet) concept. The achievement of these three aspects requires extra efforts because everything was carried out in the midst of the prolonged Covid-19 pandemic.

1. Achievement of Sustainable Finance Implementation Performance

In 2020, amidst such difficult economic conditions, all BNI Syariah personnel will continue to make their best efforts to realize the economic targets that have been formulated in the Bank's Business Plan (RBB), including the revised targets to respond to the Covid-19 pandemic. We are grateful that these efforts and hard work have yielded very encouraging results. For example, according to the Revised RBB, the target asset is IDR 51.32 trillion, and the achieved target is IDR 55.01 trillion, Financing target of IDR 32.93 trillion, and the achieved target is IDR 33.05 trillion, while the Net Profit target was IDR 457 billion, and the achieved target is IDR 505 billion.

Furthermore, in 2021, BNI Syariah will officially merge with Bank BRI Syariah and Bank Mandiri Syariah to become PT Bank Syariah Indonesia Tbk. The effective date of the merger is February 1, 2021. The profit target for the Bank resulting from the merger in 2021 is IDR. 2.9 trillion with IDR166.86 trillion in financing and, IDR 247.67 trillion in Assets.

In the environmental sector, in accordance with the spirit of sustainability, in 2020, BNI Syariah succeeded in making efficient use of electricity at the Head Office by 55,145 kWh or equivalent to IDR 84,649,508 meanwhile, the use of paper has been reduced to 1,352 reams. Another achievement is BNI Syariah's activities in the form of making 1,220 Biopore Infiltration Holes (LRB) at all BNI Syariah outlets. This program was chosen because it is in line with the Ministry of Environment and Forestry program which is supported by the local government and several other institutions, namely the 5 million Biopore Infiltration Holes movement in Indonesia.

As for the social sector, through the 'Hasanah Titik' Foundation (YHT) as the manager and implementer of BNI Syariah CSR programs and activities, a zakat of IDR 31.79 billion has been received. As for the distribution of zakat in the fields of economy, da'wah, health, education, and social affairs, its amount is up to IDR 15.99 billion. Meanwhile, zakat distribution for cooperation with Indonesian zakat initiatives, amil rights, and bank administration costs amounting to IDR 6.78 billion. Thus, the total zakat distribution was IDR 22.77 billion.



Untuk penerimaan *infaq/sedekah*, YHT telah menerima sebesar Rp2,61 miliar dengan penyaluran sebesar Rp613,29 juta untuk bidang ekonomi, dakwah, kesehatan, pendidikan dan sosial. Sedangkan penyaluran *infaq/sedekah* untuk penyaluran lainnya dan biaya administrasi bank sebesar Rp4,5 juta. Dengan demikian, total penyaluran *infaq/sedekah* mencapai sebesar Rp617,79 miliar.

2. Prestasi dan Tantangan Selama Periode Pelaporan

Komitmen insan BNI Syariah untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah membuatnya prestasi dengan diraihnya 49 penghargaan selama tahun 2020. Antara lain, *Most Trusted on Corporate Governance Perception Index* (CGPI), *Best Islamic Finance Retail Bank*, *Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury*, dan *Bank Syariah Inovasi Pembiayaan Terbaik*.

Sementara itu, BNI Syariah menjawab tantangan pembiayaan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain, melalui penandatangan akad pembiayaan musyarakah modal kerja dengan PT Medco Power Indonesia dengan total Rp400 miliar. Selama ini, Medco Power Indonesia dikenal sebagai perusahaan yang unggul di sektor industri listrik terbarukan, seperti pembangkit listrik panas bumi, mini hidro dan tenaga surya. Bagi BNI Syariah, pembiayaan industri energi terbarukan merupakan langkah nyata mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai pemicu pemanasan global dan perubahan iklim.

Strategi Pencapaian Target

Keberhasilan BNI Syariah melalui tahun 2020 yang penuh tantangan merupakan bukti ketepatan dan kecermatan manajemen dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis dan pengelolaan risiko, termasuk merevisi target RBB sebagai antisipasi terjadinya pandemi Covid-19. Pencapaian tersebut sekaligus merupakan pondasi untuk keberlanjutan usaha pada tahun-tahun mendatang.

1. Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

BNI Syariah telah melakukan pemetaan dan penilaian risiko sebagai bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB RBBR). Tercatat 10 risiko yang dihadapi BNI Syariah, yang kemudian diringkas menjadi empat risiko pokok yang dihadapi selama tahun 2020, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Pengelolaan dan mitigasi risiko, termasuk penjatuhan sanksi bagi pelanggar, merupakan kunci keberhasilan BNI Syariah mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RBB. Pencapaian target-target tersebut sekaligus menjamin keberhasilan penerapan keuangan berkelanjutan di BNI Syariah selama tahun pelaporan.

For *infaq/sadaqah* receipts, YHT has received IDR 2.61 billion with a distribution of IDR 613.29 million for the economic sector, preaching, health, education and social sectors. Meanwhile, *infaq/alm*s distribution for other distribution and bank administration fees amounting to IDR 4.5 million. Thus, the total distribution of *infaq/alm*s reached IDR 617.79 billion.

2. Achievements and Challenges During the Reporting Period

The commitment of BNI Syariah personnel to work and achievement as a manifestation of its faith has resulted in 49 awards in 2020. Among others, Most Trusted on Corporate Governance Perception Index (CGPI), Best Islamic Finance Retail Bank, Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury, and The Best Islamic Financing Innovation Bank.

Meanwhile, BNI Syariah responds to financing challenges that are in line with the implementation of sustainable finance, among others, by signing a working capital musyarakah financing agreement with PT Medco Power Indonesia with a total of IDR 400 billion. So far, Medco Power Indonesia is known as a leading company in the renewable electricity industry, such as geothermal, mini hydro and solar power plants. For BNI Syariah, financing the renewable energy industry is a concrete step in reducing greenhouse gas emissions which trigger global warming and climate change.

Target Achievement Strategy

The success of BNI Syariah through 2020 which was full of challenges is proof of management's accuracy in formulating various strategic policies and risk management, including revising the RBB target in anticipation of the Covid-19 pandemic. This achievement is also the foundation for business continuity in the years to come.

1. Risk Management for the Implementation of Sustainable Finance

BNI Syariah has carried out mapping and risk assessment as part of the Risk Based Bank Soundness Assessment (TKB RBBR). There are 10 risks faced by BNI Syariah, which are then summarized into four main risks faced during 2020, namely credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk.

Risk management and mitigation, including the imposition of sanctions for violators, is the key to the success of BNI Syariah in realizing the targets set in the RBB. The achievement of these targets also guarantees the successful implementation of sustainable finance in BNI Syariah during the reporting year.



2. Pemanfaatan Peluang dan Prospek Usaha

Upaya pemerintah menyediakan vaksin untuk seluruh penduduk merupakan kunci penting untuk pemulihian ekonomi Indonesia tahun 2021. Ekonomi diproyeksikan tumbuh positif 4,5-5,5% pada tahun 2021, membaik dibanding tahun 2020 sebesar minus 0,6-1,7%. Perbaikan ekonomi otomatis akan membuat berbagai sektor kehidupan menggeliat dan tumbuh, termasuk sektor perbankan.

Pada tahun 2021, BNI Syariah telah melebur ke dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kehadiran bank hasil merger ini akan masuk dalam Top 10 Bank di Indonesia, bahkan Top 10 Bank Syariah Global, dan optimistis akan berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan dan ekonomi syariah dunia. Berbagai upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia, termasuk membangun eksistensi di Dubai, akan membuat posisinya semakin kuat dan layak menjadi bank besar dengan performa terbaik di Indonesia.

3. Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Keberlanjutan

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena global yang membuat kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa. Menyikapi kondisi ini, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang di dalamnya mengatur berbagai pembatasan mobilitas sosial, antara lain di tempat kerja, penggunaan moda transportasi, dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi dampak negatif atas faktor eksternal tersebut, BNI Syariah telah melakukan berbagai strategi yang terbukti efektif menjaga kinerja ekonomi perusahaan. Sementara itu, dari sisi sosial dan lingkungan, yang tercermin antara lain melalui pengumpulan dan penyaluran zakat, terdapat peningkatan jumlah zakat yang terkumpul, namun mengalami penurunan penyaluran dibanding tahun 2019.

Pada tahun 2021, walau pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berlalu, BNI Syariah yang resmi bergabung dalam Bank Syariah Indonesia, optimistis akan mampu membukukan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih baik. Pemberian vaksinasi untuk seluruh penduduk merupakan kebijakan tepat, yang akan menghidupkan berbagai sektor kehidupan, termasuk perbankan.

2. Usage of Business Opportunities and Prospects

The government's effort to provide vaccines for the entire population is an important key to restoring Indonesia's economy in 2021. The economy is projected to grow positively by 4.5-5.5% in 2021, which is an improvement compared to 2020 of minus 0.6-1.7%. Automatic economic improvement will make various sectors of life stretch and grow, including the banking sector.

In 2021, BNI Syariah will merge into PT Bank Syariah Indonesia Tbk. The presence of the merged bank will be included in the Top 10 Banks in Indonesia, even the Top 10 Global Sharia Banks. We are optimistic that this will make a real contribution to realizing Indonesia as the world's sharia financial and economic center. The various efforts made by the Indonesian Sharia Bank, including building a presence in Dubai, will make its position stronger and worthy of becoming a large bank with the best performance in Indonesia.

3. External Economic, Social, and Environmental Situations Affecting Sustainability

The Covid-19 pandemic is a global phenomenon that has made economic and business conditions in Indonesia face extraordinary challenges. In response to this condition, the government has adopted various policies, including Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which regulates various restrictions on social mobility, including in the workplace, use of transportation modes, and others.

To anticipate the negative impact on these external factors, BNI Syariah has implemented various strategies that have proven effective in maintaining the Company's economic performance. Meanwhile, from the social and environmental sectors, which are reflected, among others, through the collection and distribution of zakat, there is an increase in the amount of zakat collected, but it has decreased in distribution compared to 2019.

In 2021, even though the Covid-19 pandemic has not yet completely passed, BNI Syariah, which officially will officially merge into Bank Syariah Indonesia, is optimistic that it will be able to record better economic, social and environmental performance. Vaccination for the entire population is the right policy, which will revive various sectors of life, including banking.



Penutup

Keberhasilan BNI Syariah melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja terbaik merupakan hasil kerja keras dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, karyawan, nasabah, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berhadap dukungan yang sama tetap diberikan untuk kemajuan Bank Syariah Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Closing

The success of BNI Syariah throughout the year 2020 which was full of challenges by posting the best performance was the result of hard work and support from various parties. For that, on behalf of the Board of Directors, we would like to thank all the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, employees, customers, suppliers and other stakeholders. We hope that the same support will continue to be given to the progress of Bank Syariah Indonesia in the years to come.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Peace and blessings be upon you,

Jakarta, 25 Januari 2021
Jakarta, January 25, 2021
Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

Abdullah Firman Wibowo

Direktur Utama
President Director





Tentang Laporan Keberlanjutan

*About The
Sustainability Report*

2020



TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT

Lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, memasuki babak baru dengan mulai berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan berlakunya peraturan baru ini, maka penerbitan Laporan Keberlanjutan merupakan sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah laporan yang diterbitkan secara sukarela.

Sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II, BNI Syariah terkena kewajiban untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan per 1 Januari 2020. Perubahan status menjadi BUKU 3 pada tahun 2000 tidak mengubah kewajiban bagi Perseroan untuk menerbitkan laporan, bahkan menguatkannya. Sebab, penerapan POJK No. 51/POJK.03/2017 untuk BUKU 3 berlaku sejak 1 Januari 2019. Dengan demikian, laporan ini merupakan laporan pertama yang diterbitkan BNI Syariah sejak pemberlakuan POJK tersebut. Walau demikian, sebelum OJK mewajibkan penerbitan laporan keberlanjutan, BNI Syariah sudah menerbitkan laporan serupa secara rutin setiap tahun, dan tahun 2020 merupakan penerbitan ketujuh. Laporan sebelumnya terbit pada Juli 2020. [GRI 102-51]

Sebagai bagian dari Laporan Tahunan, BNI Syariah berkomitmen untuk menerbitkan laporan keberlanjutan setahun sekali. Laporan ini berisi kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan beserta dampak yang ditimbulkan oleh operasional Kantor Pusat BNI Syariah beserta semua wilayah dan cabang yang dimiliki selama kurun waktu 1 Januari-31 Desember 2020. Pelaporan tentang ketiga kinerja tersebut sekaligus merupakan upaya kami dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang telah diadopsi Indonesia menjadi SDGs Indonesia (<http://sdgsindonesia.or.id/>). [GRI 102-45, 102-50, 102-52]

Data keuangan dalam laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Seluruh data keuangan yang kami sampaikan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Global) untuk keperluan Laporan Tahunan Perseroan. Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Data kuantitatif dalam Laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (*comparability*), minimal dalam tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna Laporan dapat melakukan analisis tren tentang kinerja Perusahaan.

Financial services institutions in Indonesia, including banking, entered a new phase with the entry into force of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies. With the enactment of this new regulation, the issuance of a Sustainability Report is no longer a voluntary report; it is an obligation.

As a Commercial Bank for Business Activities (BUKU) II, BNI Syariah is subject to the obligation to issue a Sustainability Report as of January 1, 2020. The change in status to BUKU 3 in 2000 did not change the obligation for the Company to publish reports it even strengthened it because the implementation of POJK No. 51/POJK.03/2017 for BUKU 3 is effective from 1 January 2019. Thus, this report is the first report issued by BNI Syariah since the enactment of the POJK. However, before the OJK required the issuance of sustainability reports, BNI Syariah had already published similar reports regularly every year, and 2020 will be the seventh publication. Previous report was published on July 2020. [GRI 102-51]

As part of the Annual Report, BNI Syariah is committed to publishing a sustainability report once a year. This report contains economic, social and environmental performance along with the impacts caused by the operations of the BNI Syariah Head Office and all areas and branches owned during the period 1 January to 31 December 2020. Reporting on these three performances is also our effort in supporting the achievement of our goals. global development, namely the Sustainable Development Goals (SDGs), which Indonesia has adopted into the Indonesian SDGs (<http://sdgsindonesia.or.id/>). [GRI 102-45, 102-50, 102-52]

Financial data in this report is nominated in Indonesian Rupiah, unless otherwise indicated. All financial data that we submit have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Suherman & Surja (a part of Ernst & Young Global group) for the purposes of the Company's Annual Report. The report is made in two languages, namely Indonesian and English. The quantitative data in this report is presented using the principle of comparability of at least three consecutive years. Thus, Report users can perform trend analysis about the Company's performance.



Rujukan Laporan dan External Assurance

Penyusunan laporan ini merujuk pada POJK No. 51/POJK.03/2017, dan dikombinasikan dengan standar global, yaitu Standar GRI (*GRI Standards*) yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSBB) lembaga yang dibentuk oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti (*Core*). [GRI 102-54]

BNI Syariah berupaya untuk menyampaikan semua informasi yang diminta POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Standar GRI. Untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang sesuai dengan rujukan, kami menyertakan penanda khusus berupa huruf dan angka sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran II POJK No. 51/2017, atau pencantuman angka pengungkapan Standar GRI di belakang kalimat atau alinea yang relevan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam menemukan informasi terkait untuk setiap pengungkapan. Data lengkap kecocokan isi laporan dengan kedua rujukan disajikan di bagian belakang laporan ini pada halaman 55. [GRI 102-55]

Melalui laporan ini, segenap pemangku kepentingan dapat mengetahui berbagai informasi mengenai kinerja keberlanjutan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan selama tahun 2020 dan menjadikan laporan ini sebagai rujukan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Kami berharap Laporan ini bisa menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan untuk mengetahui pelaksanaan kinerja keberlanjutan BNI Syariah. Selain edisi cetak, Laporan yang sama dapat diakses melalui situs perusahaan <http://www.bnisyariah.co.id>.

Proses Penetapan Isi Laporan [GRI 102-46]

Prinsip penetapan konten laporan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip, sesuai dengan panduan GRI, yaitu:

1. Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Kami melibatkan pemangku kepentingan internal dalam penentuan topik material laporan ini melalui diskusi dengan karyawan lintas divisi, yang dilanjutkan dengan penyebaran angket berisi berisi aspek atau topik-topik keberlanjutan terpilih.

2. Konteks Keberlanjutan

Konten dalam laporan ini adalah isu atau topik yang berhubungan dengan konteks keberlanjutan, meliputi topik ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, keberlanjutan bisa diartikan sebagai kelestarian.

3. Materialitas

Prinsip ini kami terapkan dengan menentukan konten laporan melalui prosedur penetapan materialitas dengan terlebih dulu mengidentifikasi topik spesifik, kemudian menetapkan bobot dari masing-masing topik tersebut melalui uji materialitas sehingga didapat topik yang material, yakni topik yang kami nilai relevan, menjadi prioritas dan penting untuk disampaikan.

4. Lengkap

Kami menegakkan prinsip ini dengan melakukan pengujian atas topik yang material, mencakup ketersediaan data maupun penetapan batasan (*boundary*) sehingga mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan.

Report Reference and External Assurance

The preparation of this report refers to POJK No. 51/POJK.03/2017 and global standards, namely the GRI Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) an institution established by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards. In accordance with the options provided in the GRI Standards, namely Core Choices and Comprehensive Choices, this report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Choices. [GRI 102-54]

BNI Syariah seeks to convey all the information requested by POJK No. 51/POJK.03/2017 and GRI Standards. To make it easier for readers to find information that matches the reference, we include special markers in the form of letters and numbers as stipulated in Attachment II to POJK No.51/2017, or the inclusion of GRI Standard disclosure numbers behind the relevant sentences or paragraphs. This is expected to make it easier for readers to find related information for each disclosure. Complete data on the compatibility of the report content with the two references is presented at the back of this report on page 55. [GRI 102-55]

Through this report, all stakeholders can find out various information regarding the sustainability performance that has been carried out by the Company in 2020 and make this report a reference in making decisions in the future. We hope that this report can be a reference for all stakeholders to find out about the implementation of BNI Syariah sustainability performance. In addition to the printed edition, the same report can be accessed through the Company's website: <http://www.bnisyariah.co.id>.

Process of Determining Report Content [GRI 102-46]

The principles for determining the content of this report are based on 4 (four) principles, in accordance with GRI guidelines, namely:

1. Stakeholder Inclusion

We involved internal stakeholders in determining the material topic of this report through discussions with employees across divisions, followed by distributing questionnaires containing selected sustainability aspects or topics.

2. Sustainability Context

The content in this report are issues or topics related to the context of sustainability, covering economic, environmental and social topics.

3. Materiality

We apply this principle by determining the content of the report through the materiality setting procedure by first identifying specific topics, then assigning the weight of each of these topics through a materiality test so that material topics, namely topics that we consider relevant, become priority and important to convey.

4. Completeness

We uphold this principle by testing the material on the topic, including the availability of data and the determination of boundaries so as to reflect the impact of economic, environmental and social significance.



Merujuk pada panduan GRI, kami menggunakan 4 (empat) langkah dalam menentukan topik dan isi Laporan, yaitu:

1. Identifikasi:

Kami melakukan identifikasi terhadap topik-topik yang material/penting dan menetapkan batasan (*boundary*). Untuk keperluan identifikasi dan menjaring aspek-aspek yang material, kami melakukan survei dengan menyebarluaskan angket berisi aspek-aspek yang menyangkut kinerja keberlanjutan Perusahaan, meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selanjutnya, kepada para pemangku kepentingan yang menerima angket tersebut diminta untuk menilai aspek-aspek mana yang material.

2. Prioritas:

Kami menentukan prioritas berdasarkan topik-topik material yang telah diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan melalui pengisian angket, seperti disebutkan dalam langkah sebelumnya.

3. Validasi:

Kami melakukan validasi atas topik-topik yang dinilai material tersebut dengan melengkapi data-data dan mewawancara personel yang relevan dengan aspek yang akan disampaikan dalam Laporan ini.

4. Review:

Kami melakukan review atas isi, dana dan analisis Laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas Laporan tahun berikutnya.

Keempat langkah dalam menetapkan konten laporan digambarkan dalam Bagan Alur Proses Penentapan Konten Laporan berikut ini.

Referring to the GRI guidelines, we use 4 (four) steps in determining the topic and content of the report, namely:

1. Identification:

We identify the topics which are material/important to set boundaries. For the purposes of identifying and capturing material aspects, we conducted a survey by distributing a questionnaire containing aspects related to the Company's sustainability performance, including economic, social and environmental aspects. Furthermore, the stakeholders who received the questionnaire were asked to assess which aspects were material.

2. Priority:

We set priorities based on material topics that have been identified by stakeholders through a questionnaire, as mentioned in the previous step.

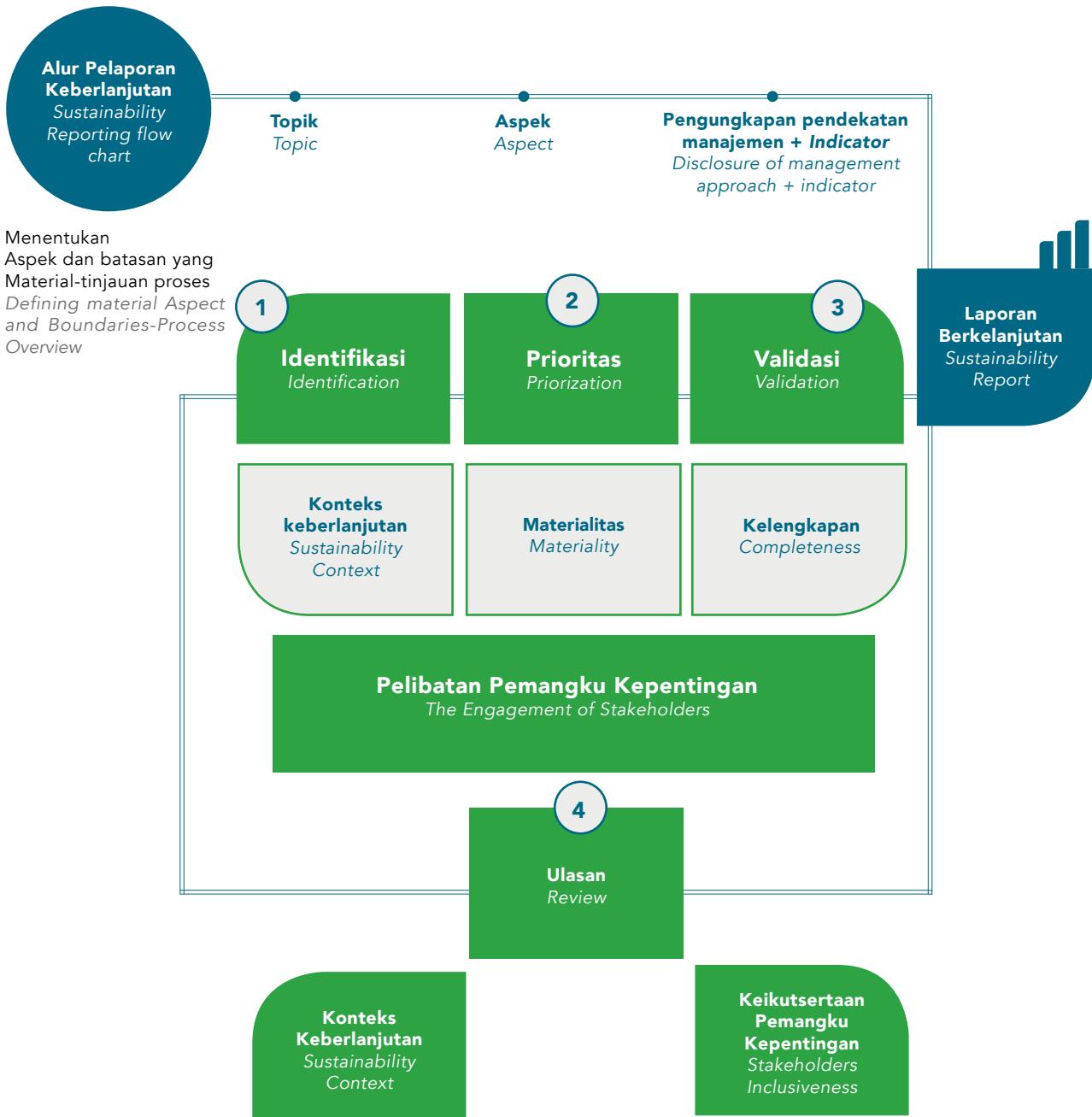
3. Validation:

We validate the topics that are considered material by completing the data and interviewing personnel relevant with the aspects that will be presented in this report.

4. Review:

We review the content, funding and analysis of the report after it is published in order to improve the quality of the report for the following year.

The four steps in defining report content are described in the Report Content Determination Process Flowchart below.



Selanjutnya, konten laporan diulas demi memenuhi 6 (enam) prinsip kualitas yang direkomendasikan oleh GRI, meliputi:

1. Akurasi
Informasi yang disajikan harus akurat dan detail sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.
2. Keseimbangan
Kinerja perusahaan yang disajikan harus memuat aspek positif maupun negatif sehingga dapat dinilai secara rasional dan menyeluruh.
3. Kejelasan
Informasi yang disajikan harus mudah dipahami dan terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk diakses.
4. Daya Banding
Informasi yang disajikan harus konsisten dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai

Furthermore, the report content is reviewed in order to fulfill the 6 (six) quality principles recommended by GRI, including:

1. Accuracy
The information presented must be accurate and detailed so that it can be used by stakeholders to assess the Company's performance.
2. Balance
The Company's performance that is presented must contain both positive and negative aspects so that it can be assessed rationally and thoroughly.
3. Clarity
The information presented must be easy to understand and open for stakeholders to access.
4. Appeal Power
The information presented must be consistent and can be used by stakeholders to assess changes in



perubahan kinerja yang terjadi pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dapat dengan menyertakan data dan informasi untuk beberapa tahun sebelum periode pelaporan yang digunakan.

5. Keandalan

Laporan harus memuat dan menggunakan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan, yang dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan.

6. Ketepatan Waktu

Laporan harus diterbitkan secara rutin sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan informasi yang tersedia.

Daftar Topik Material dan Batasan [GRI 102-47]

Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan topik material dan boundary didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi Perseroan, dan seluruh Pemangku Kepentingan. Topik material dalam Laporan ini sama dengan tahun sebelumnya karena kami menilai semua masih relevan dengan kondisi tahun 2020. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan signifikan dalam Topik Material dan Boundary tahun 2020, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: [GRI 102-49]

Daftar Topik Material dan Boundary Tahun 2020

Topik Material [GRI 102-47] Material Topics[GRI 102-47]	Kenapa Topik Ini Material [GRI 103-1] Why This Topic [GRI 103-1]	Nomor Pengungkapan Disclosure Numbers	Boundary (Batasan Topik) [GRI 102-46]	
			Di dalam BNI Syariah Inside BNI Syariah	Di luar BNI Syariah Outside BNI Syariah
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPICS				
Nilai ekonomi langsung Direct economic value	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal Has a significant impact on internal and external stakeholders	201-1, 201-3	✓	✓
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal Has a significant impact on internal and external stakeholders	203-1	✓	✓
Antikorupsi Anti Corruption	Berdampak signifikan pada citra Perusahaan Has a significant impact on the Company's image	205-3	✓	
Bersaing sehat/anti-monopoli Fair competition/anti-monopoly	Berdampak signifikan pada keberlanjutan Perusahaan Has a significant impact on the sustainability of the Company	206-1	✓	✓

performance that occur in the Company within a certain period of time, by including data and information of several years prior to the reporting period.

5. Reliability

The report must contain and use the information, and processes used in preparing the report, which can be checked and reflects the quality and materiality of the information presented.

6. Punctuality

The report should be published regularly so that stakeholders can make decisions in a timely manner based on available information.

List of Material Topics and Boundaries [GRI 102-47]

The material topics in this Report, as identified in the GRI Standards, are topics that the organization has prioritized for inclusion in the report. The dimensions used to determine priorities, among others, are impacts on the economy, environment, and society. The impact in this report includes positive values. The determination of material topics and boundaries is based on issues that have a significant impact on the Company, and all Stakeholders. The material topics in this report are the same as in the previous year because we assess that all of them are still relevant to the conditions in 2020. Thus, there is no significant change in the Material Topics and Boundary for 2020, as presented in the following table: [GRI 102-49]

List of Material Topics and Boundaries for Year 2020



TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL TOPICS

Energi Energy	Berdampak signifikan pada keberlanjutan lingkungan Has a significant impact on environmental sustainability	302-1, 302-4	✓	
Air Water	Berdampak signifikan pada keberlanjutan lingkungan Has a significant impact on environmental sustainability	303-1	✓	
Keanekaragaman hayati Biodiversity	Berdampak signifikan pada keberlanjutan lingkungan Has a significant impact on environmental sustainability	304-1	✓	✓
Kepatuhan Compliance	Berdampak signifikan pada citra Perusahaan dalam kepatuhan terhadap peraturan tentang lingkungan Has a significant impact on the Company's image in compliance with environmental regulations	307-1	✓	✓

TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPICS

Kepegawaian Employment	Berdampak pada kinerja karyawan Has a significant impact on Employee Performance	401-1, 401-2, 403-2, 403-4, 404-2	✓	✓
Informasi produk dan perlindungan konsumen Product information and consumer protection	Berdampak signifikan pada layanan dan tingkat kepuasan nasabah Has a significant impact on service and customer satisfaction levels	419-1	✓	✓

External Assurance

GRI merekomendasikan penggunaan *external assurance* oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Namun, hal itu bukanlah persyaratan agar dapat "sesuai" dengan pedoman GRI. Untuk itu, pemeriksaan laporan ini baru dilakukan oleh tim internal, dan Perseroan belum melakukan penjaminan dari pihak ketiga yang independen. Namun demikian, kami menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual. Untuk memenuhi prinsip validitas, apabila terdapat penyajian kembali informasi yang terbit pada tahun sebelumnya karena perbedaan metodologi perhitungan, maka dalam laporan ini akan diberi tanda *disajikan kembali. [GRI 102-48, 102-56][G.1]

Umpam Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, BNI Syariah menyediakan Lembar Umpam Balik di bagian akhir laporan ini. Kepada para pemangku kepentingan, kami mengundang Anda untuk menyampaikan saran, masukan dan pertanyaan atas data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini sehingga kami dapat meningkatkan kualitas laporan dan kinerja keberlanjutan kami di masa mendatang.

External Assurance

GRI recommends the use of external assurance by an independent third party to ensure the quality and reliability of the information presented in this report. However, this is not a requirement to be "compliant" with the GRI guidelines. For this reason, the examination of this report has only been carried out by an internal team, and the Company has not made an assurance from an independent third party. However, we guarantee that all information disclosed in this report is true, accurate and factual. To meet the principles of validity, if there is a restatement of information published in the previous year due to differences in calculation methodology, in this report, it will be marked with an asterisk (*) followed by the word 'restatement'. [GRI 102-48, 102-56] [G.1]

Feedback

For the realization of two-way communication, BNI Syariah provides a Feedback Sheet at the end of this report. To our stakeholders, we invite you to submit suggestions, input and questions regarding the data and information presented in this report so that we can improve the quality of our reports and our future sustainability performance.

**Kontak Kami [GRI 102-53]**

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Laporan Keberlanjutan ini, segenap pemangku kepentingan BNI Syariah dapat langsung menghubungi:

Divisi Komunikasi Perusahaan
Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8, Jakarta
Situs: www.bnisyariah.co.id
E-mail: info@bnisyariah.co.id
Telepon: +6221-29701946
Faksimile: +6221-29667947

Contact Us [GRI 102-53]

To get further information regarding this Sustainability Report, all BNI Syariah stakeholders can directly contact:

Corporate Communications Division
Head Office of PT Bank BNI Syariah
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6, Jakarta
Website: www.bnisyariah.co.id
E-mail: info@bnisyariah.co.id
Phone: + 6221-29701946
Fax: +6221-29667947



KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [E.4]

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT [E.4]

BNI Syariah mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang memiliki dampak secara langsung atau pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Perseroan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Dengan posisi yang begitu strategis, maka BNI Syariah berkomitmen untuk membangun hubungan yang harmonis dengan segenap pemangku kepentingan, dan berupaya melibatkan mereka sesuai dengan karakter, kompetensi dan kebutuhan masing-masing. Dengan keterlibatan tersebut, Perseroan juga berkesempatan untuk mengetahui berbagai hal yang dinilai penting oleh para pemangku kepentingan. Dari keterlibatan itu pula, Perseroan bisa menentukan langkah-langkah lanjutan dan perbaikan untuk peningkatan program keberlanjutan di masa-masa mendatang.

Pelaksanaan program keberlanjutan BNI Syariah terbagi dalam dua hal yang bersifat eksternal dan internal. Titik tumpu dari pelaksanaan ini terletak di Kantor Cabang, di mana setiap Kantor Cabang memiliki sebuah daerah binaan, dan masing-masing kantor cabang melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan masyarakat setempat.

- Aktivitas Eksternal
Praktik keberlanjutan yang diadakan oleh Kantor Cabang dengan melibatkan mitra sebagai pelaksana di lapangan. Salah satunya adalah kerja sama dengan Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Bamuis, dan lain-lain.
- Aktivitas Internal
Praktik keberlanjutan yang diselenggarakan oleh internal Kantor Cabang sendiri melalui Yayasan Hasanah Titik tanpa melibatkan mitra lain.

Landasan Penentuan dan Daftar Pemangku Kepentingan BNI Syariah

Pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki dampak dan/atau terdampak oleh operasional Perseroan. Berdasarkan kriteria tersebut, pemangku kepentingan BNI Syariah adalah sebagai berikut: [\[GRI 102-40, 102-42\]](#)

- Pemegang saham, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku perusahaan induk dan PT BNI Life Insurance;
- Masyarakat;
- Pegawai dan Organisasi Pegawai;
- Pemerintah dan Lembaga Regulator;
- Nasabah;
- Mitra Usaha/Pemasok;
- Media massa.

Sedangkan dari sisi penerima manfaat, program keberlanjutan BNI Syariah harus disesuaikan dengan ketentuan syariah yang mengatur dengan tegas kelompok-kelompok penerima program yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang mencakup 8 (delapan) kategori *ashnaf* di antaranya: [\[GRI 102-40\]](#)

BNI Syariah defines stakeholders as groups or individuals who have a direct or significant impact on the company's business activities. On the other hand, their existence also influences the Company in realizing the success of strategy implementation and goal achievement. With such a strategic position, BNI Syariah is committed to building a harmonious relationship with all stakeholders, and strives to engage them according to their characteristics, competencies and needs. With this engagement, The Company also has the opportunity to find out various things that are considered important by stakeholders. From this engagement, the Company can determine further steps and improvements to increase its sustainability program in the future.

The implementation of the BNI Syariah sustainability program is divided into two aspects, external and internal. The fulcrum of this implementation lies in the Branch Offices, where each Branch Office has a target area, and each branch office approaches and maintains relationships with the local community.

- External Activities
Sustainability practices conducted by Branch Offices by involving partners as implementers in the field. One of them is cooperation with Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Bamuis, and others.
- Internal Activities
Sustainability practices are held internally by the Branch Office itself through the 'Hasanah Titik' Foundation without involving other partners.

The Basis in Determining and List of BNI Syariah Stakeholders

Stakeholders are those that have an impact and/or affected by the operations of the Company. Based on these criteria, BNI Syariah stakeholders are as follows: [\[GRI 102-40, 102-42\]](#)

- Shareholders, in this case PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the parent company and PT BNI Life Insurance;
- General Public;
- Employees and Employee Organizations;
- Government and Regulatory Agencies;
- Customers;
- Business Partners/Suppliers;
- Mass media.

Meanwhile, in terms of beneficiaries, the BNI Syariah sustainability program must be adjusted to the sharia provisions which strictly regulate the groups of program recipients, namely community groups which include 8 (eight) *ashnaf* categories. They are: [\[GRI 102-40\]](#)



- Fakir;
- Miskin;
- Amil zakat;
- Mu'allaf;
- Untuk (memerdekakan) budak;
- Orang-orang yang berutang;
- Untuk jalan Allah;
- Untuk mereka yang sedang dalam perjalanan/musafir.

Manajemen Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Pelibatan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan penting untuk menentukan materialitas aspek keberlanjutan yang akan menjadi fokus dari praktik-praktik keberlanjutan BNI Syariah di tahun berjalan. Oleh karena itu, BNI Syariah telah menyusun strategi pelibatan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Manajemen Pemangku Kepentingan. Kebijakan ini memuat identifikasi secara lengkap mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang menjadi objek dari komitmen keberlanjutan BNI Syariah di tahun berjalan serta metode pendekatan yang digunakan untuk mempererat hubungan BNI Syariah dengan pemangku kepentingan.

- The Fakir;
- The Poor;
- Amil Zakat;
- Mu'allaf;
- To (liberate) slaves;
- People who are in debt;
- Activities conducted in the name of Allah; and
- For those who are on a journey/traveler/Musafir.

Stakeholder Management in 2020

The involvement of stakeholders can provide important input to determine the materiality of the sustainability aspects which will be the focus of BNI Syariah sustainability practices in the current year. Therefore, BNI Syariah has developed a stakeholder engagement strategy as outlined in Stakeholder Management. This policy contains a complete identification of who are the stakeholders who become the object of the BNI Syariah sustainability commitment in the current year as well as the approach methods used to strengthen the relationship between BNI Syariah and stakeholders.

Pemangku Kepentingan [GRI 102-40] Stakeholders [GRI 102-40]	Pendekatan [GRI 102-43, 102-44] Approaches [GRI 102-43, 102-44]
Pemegang Saham Shareholders	<p>Komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan RUPS Tahunan 1 (satu) kali dalam setahun • Melaporkan dan mempublikasikan kinerja BNI Syariah secara berkala, termasuk di dalamnya kinerja praktik-praktik keberlanjutan <p>Communication:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizing the GMS 1 (once) a year • Report and publish BNI Syariah performance regularly, including the performance of sustainability practices
Masyarakat General Public	Berkomitmen memberdayakan masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial
Committed to empowering the general public through various social and environmental responsibility (TJSL) programs to realize the goals of sustainable development, both in the economic, environmental, and social fields	
Pegawai dan Organisasi Pegawai Employees and Employee Organizations	<p>Menjamin pemenuhan hak-hak normatif sesuai undang-undang ketenagakerjaan</p> <p>Menjamin kebebasan berserikat dan hak menyatakan pendapat</p> <p>Mengadakan pertemuan berkala dalam forum bipartit antara BNI Syariah dan Serikat Pekerja</p> <p>Menyusun dan membuat kesepakatan kerja sama</p> <p>Ensure the fulfillment of normative rights in accordance with labor laws</p> <p>Guarantee freedom of association and the right to express opinions</p> <p>Hold regular meetings in a bipartite forum between BNI Syariah and the Workers Union</p> <p>Compile and make a cooperation agreement</p>



Pemangku Kepentingan [GRI 102-40] Stakeholders [GRI 102-40]	Pendekatan [GRI 102-43, 102-44] Approaches [GRI 102-43, 102-44]
Pemerintah dan Lembaga Regulator Government and Regulatory Agencies	<ul style="list-style-type: none">Mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk dalam pelaporan (laporan keuangan, izin, dan sebagainya)Membayarkan pajak, retribusi, dan Penerimaan Negara sesuai peraturan perundang-undanganMelakukan partisipasi aktif dalam musyawarah hearing DPR terkait dengan pengelolaan Dana HajjiComply with all applicable regulations, including reporting (financial reports , permits, etc.)Pay taxes, levies, and state revenue in accordance with the laws and regulationsParticipate actively in the House of Representatives' hearings related to the management of the Hajj Fund
Nasabah Customers	<ul style="list-style-type: none">Memastikan pelayanan dan jaminan kualitas produk keuanganMelakukan pertemuan berkala untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan kontrak yang sudah disepakatiMenyelenggarakan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnyaMelakukan survei untuk mengetahui kepuasan nasabah dengan hasil Indeks Kepuasan PelangganMenjaga privasi pelangganEnsure service and quality assurance of financial productsHold regular meetings to discuss various matters related to the implementation of the contract that has been agreed uponOrganize a complaint mechanism and its follow-upConduct surveys to determine customer satisfaction with the results in the form of Customer Satisfaction IndexMaintain customer privacy
Mitra Usaha/Pemasok Business Partners/Suppliers	<ul style="list-style-type: none">Membuat kontrak kerja yang dilandasi panduan kerja dan Standar Etika BNI SyariahMelakukan pengawasan serta evaluasi berkala pelaksanaan kontrak kerja sesuai dengan panduan kerja dan Standar Etika BNI SyariahMelakukan sanksi penghentian kontrak kerja sama terhadap pemasok yang mengabaikan panduan kerja dan Standar Etika BNI SyariahCreate a work contract based on work guidelines and BNI Syariah Ethical StandardsSupervise and periodically evaluate the implementation of work contracts in accordance with work guidelines and BNI Syariah Ethical StandardsTo sanction the termination of cooperation contracts against suppliers who ignore the BNI Syariah work guidelines and Ethical Standards
Media Massa Mass Media	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang selayaknya diketahui masyarakat melalui informasi lainnya serta melakukan edukasi literasi keuangan syariah kepada jurnalisMelakukan kunjungan ke unit bisnis perusahaan untuk memperluas wawasan mengenai kegiatan bisnis BNI SyariahImplement the principles of disclosure on information that the public should know as well as providing Islamic financial literacy education to journalistsMake visits to the Company's business units to broaden their horizons regarding BNI Syariah business activities



Titik
belikan

Buka Ramadhan
Sesampai

Banking Partner



BNI Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

*Bni Syariah And
Sustainable Development
2020*



BNI SYARIAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN [A.1]

BNI SYARIAH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT [A.1]



Industri perbankan memiliki peran sentral bagi pembangunan. Hal itu tidak terlepas dari porsi pendanaan pembangunan dari bank yang sangat besar, yaitu sekitar 80%. Becermin dari besarnya porsi dana tersebut, maka perbankan sudah semestinya diarahkan agar mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan telah mendukukkan perbankan ke dalam sistem keuangan yang ramah lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implementasi sistem keuangan tersebut sejalan dengan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitter, dan Perusahaan Publik.

BNI Syariah sebagai bagian dari industri perbankan BUKU II di Indonesia mendukung dan telah mengimplementasikan POJK No. 51/POJK.03/2017 per 1 Januari 2020. Pada tahun yang sama, perubahan status Perseroan menjadi BUKU 3 semakin menguatkan pentingnya penerapan peraturan tersebut. Sebab, untuk BUKU 3, penerapannya sudah dimulai sejak 1 Januari 2019.

The banking industry has a central role to play in the nation's development. This is due to the massive funding for development from very large banks, which is about 80%. Reflecting on the size of the fund, the bank should be directed to support the implementation of sustainable development, namely those which are able to ensure the integrity of the Environment as well as the safety, capability, welfare, and quality of life of current and future generations.

Support for sustainable development has put banks into an environmentally friendly financial system, as mandated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The implementation of the financial system is in line with Sustainable Finance Roadmap in Indonesia issued by the Financial Services Authority, which is then followed up with the issuance of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

BNI Syariah as one of BUKU II banking industry in Indonesia supports and has implements POJK No. 51/POJK.03/2017 as of January 1, 2020. In the same year, the change of the Company's status to BUKU 3 further strengthened the importance of the implementation of the regulation. This is because, for BUKU 3 category, its application has started since January 1, 2019.



Penerapan keuangan berkelanjutan oleh BNI Syariah ditandai dengan penerbitan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Perseroan jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Dalam RAKB, BNI Syariah telah menyusun strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja yang telah disepakati sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Penerapan Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan

POJK No. 51/POJK.03/2017 telah menentukan delapan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan yang harus menjadi pegangan lembaga jasa keuangan, dan BNI Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam operasional bisnis tahun 2020. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sama pada tahun-tahun berikutnya sejalan dengan pelaksanaan program-program dalam RAKB. Adapun kedelapan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan itu adalah sebagai berikut:

The implementation of sustainable finance by BNI Syariah is marked by the issuance of a Sustainable Financial Action Plan (RAKB), a written document describing the Company's short-term (one-year) and long-term business activities plan and work program (five years), which is in accordance with the principles used to implement Sustainable Finance. In RAKB, BNI Syariah has prepared a strategy to realize the work plans and programs that have been used in accordance with the target and the time specified, while paying attention to the fulfillment of prudential provisions and the application of risk management.

Implementation of Sustainable Finance Principles

POJK No. 51/POJK.03/2017 has regulated eight principles of sustainable financial implementation which must be used as the benchmark for financial service institutions. BNI Syariah has implemented these principles in its business operations in 2020. The Company is committed to applying the same principles in the following years in line with the implementation of programs set up in RAKB. The eight principles of sustainable finance implementation are as follows:

Prinsip Principles	Penjelasan Description
Prinsip Investasi Bertanggung Jawab Principle for Responsible Investment	<p>Pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup, dan tata kelola.</p> <p>Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan</p> <p>It is a financial investment approach to sustainable development projects and initiatives, nature conservation products, and policies that support sustainable economic development and believe that the creation of long-term investment gains depends on economic, social, environmental, and governance systems.</p> <p>Sustainable development is a conscious and planned effort that integrates economic, social, and environmental aspects into development strategies to ensure the integrity of the Environment as well as the safety, ability, welfare, and quality of life of current and future generations</p>
Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan Principle of Sustainable Business Strategy and Practices	<p>Pembangunan nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh LJK, Emitter, dan Perusahaan Publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup, dan tata kelola baik pada setiap sektor maupun strategi dari masing-masing lini bisnis</p> <p>It is a value building approach for the financial services sector to contribute to society through business policies and practices as well as the implementation of business strategies by financial service institution, Issuers, and Public Companies by minimizing negative impacts and integrating economic, social, environmental, and governance aspects in each sector as well as strategies from each line of business</p>
Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup Principle of Social and Environmental Risk Management	<p>Pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam manajemen risiko guna menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan Lingkungan Hidup</p> <p>It is an integration of aspects of social responsibility and environmental protection and management in risk management in order to avoid, prevent, and minimize the negative impacts arising from risk exposures related to social and environmental aspects</p>



Prinsip Tata Kelola Principle of Governance	Penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar It refers to the implementation of governance in aspects of social responsibility, as well as the environmental protection and management, which are transparent, accountable, responsible, independent, equal and reasonable
Prinsip Komunikasi yang Informatif Principle of Informative Communication	Penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan It refers to the use of appropriate communication models related to organizational strategy, governance, performance, and business prospects to all stakeholders
Prinsip Inklusif Principle of Inclusion	Pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan Lingkungan Hidup, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik Equitable access to the products and/or services of financial service institutions, issuers, public companies for the general public, as well as encompassing all Indonesian territory to accelerate economic progress, social welfare, and environmental protection, especially for people who does not have or are lacking in access to the products and/or services of financial service institutions, issuers and public companies
Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas Principle of Development of Priority Leading Sectors	Memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim This principle allows greater portion to be given to the leading sectors which has become priorities to achieve sustainable development goals including mitigation and adaptation efforts to climate change
Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi Principles of Coordination and Collaboration	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas Lingkungan Hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup dan tata kelola It is aimed to improve coordination and collaboration of all stakeholders in the financial services sector, including ministries, institutions, sectors, or business units that have work programs closely related to the implementation of sustainable development, to accelerate the improvement of economic, social and environmental welfare for all Indonesians and encourage community participation related to economic, social, environmental and governance aspects

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Pada tahun 2024, BNI Syariah akan menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dengan menjalankan prinsip Hasanah Sustainable Finance dengan mengelola bisnis yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, memberi manfaat dan maslahat untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin*. Keterkaitan antara Tujuan BNI Syariah tersebut dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip *Profit* tercermin dalam frase "menghasilkan nilai tambah ekonomi" yang berarti BNI Syariah dalam kegiatan usahanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip Syariah;
2. Prinsip *People* dan *Planet* tercermin dalam frase "memberi manfaat dan maslahat" di mana BNI Syariah dalam menjalankan bisnis perusahaan juga senantiasa

Sustainable Finance Action Plan (RAKB) Goals

In 2024, BNI Syariah will become a leading Islamic Financial Institution which implements the principle of Hasanah Sustainable Finance by managing businesses that generate economic added value, provide benefits, to realize its '*rahmatan lil alamin*' concept. The association between the BNI Syariah's goals and the principle of Sustainable Finance can be explained as follows:

1. The principle of '*Profit*' is reflected in the phrase "*generating economic added value*" which means BNI Syariah in its business activities strives to profit in accordance with Sharia principles;
2. The principles of '*People*' and '*Planet*' are reflected in the phrase "*benefit*" in which BNI Syariah, in conducting the company's business, always pays attention to social



memperhatikan pemberdayaan sosial dan kelestarian lingkungan serta frase *"rahmatan lil alamin"* yang bermakna bahwa kegiatan usaha BNI Syariah dan nilai tambah yang dihasilkannya tidak hanya bermanfaat untuk kebaikan dunia (alam semesta) namun juga akhirat.

Rencana Aksi keuangan Berkelanjutan BNI Syariah periode 2020-2024 dituangkan ke dalam enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

- Peningkatan Pembiayaan UMKM;
- Peningkatan Portfolio Pembiayaan Lembaga Pendidikan;
- Peningkatan Portfolio Pembiayaan Ekosistem Jasa Kesehatan;
- Wakaf Hasanah;
- Penyaluran Zakat Perusahaan;
- Eco Lifestyle.

Program Prioritas tersebut ditetapkan pada Rapat Direksi tanggal 18 Oktober 2019 dan kemudian dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Oktober 2019. Pemilihan keenam Program Prioritas tersebut sebelumnya juga dilakukan berdasarkan hasil konsultasi internal dan eksternal, termasuk dengan konsultan. Kesesuaian antara keenam Program Prioritas tersebut dengan 17 poin SDGs dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Kesesuaian Program Prioritas BNI Syariah dengan Tujuan SDGs

No	Program Prioritas Priority Program	SDGs yang Dituju SDGs Conformity
1	Peningkatan pembiayaan UMKM Increasing MSME Financing	<ul style="list-style-type: none"> • No Poverty [1] • Zero Hunger [2] • Decent Work and Economic Growth [8] • Reduced Inequalities [10]
2	Peningkatan Portfolio Pembiayaan Lembaga Pendidikan Improving Educational Institution Financing Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> • Quality Education [4] • Gender Equality [5] • Decent Work and Economic Growth [8] • Reduced Inequalities [10]
3	Peningkatan Portfolio Pembiayaan Ekosistem Jasa Kesehatan Improving Health Services Ecosystem Financing Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> • No Poverty [1] • Good Health and Well Being [3] • Sustainable Cities and Communities [11]
4	Wakaf Hasanah Waqt Hasanah	<ul style="list-style-type: none"> • No Poverty [1] • Zero Hunger [2] • Good Health and Well Being [3] • Quality Education [4] • Gender Equality [5] • Clean Water and Sanitation [6] • Affordable and Clean Energy [7] • Decent Work and Economic Growth [8] • Industry, Innovation, and Infrastructure [9] • Reduced Inequality [10] • Sustainable Cities and Communities [11] • Responsible Consumption and Production [12]
5	Penyaluran Zakat Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • No Poverty [1] • Zero Hunger [2] • Good Health and Well Being [3]

empowerment and environmental sustainability. The phrase *"rahmatan lil alamin"* means that BNI Syariah's business activities and the added value it produces are not only beneficial for the good of the world (universe) but also for the hereafter.

BNI Syariah Sustainable Finance Action Plan for the period 2020-2024 is set forth to in these six Sustainable Finance Priority Programs as follows:

- Increasing MSME Financing;
- Improving Educational Institution Financing Portfolio;
- Improving Health Services Ecosystem Financing Portfolio;
- Waqt Hasanah;
- Distribution of Corporate Zakat;
- Eco Lifestyle.

This Priority Program was determined at the Board of Directors Meeting on October 18, 2019 and later in the Board of Commissioners Meeting on October 22, 2019. The selection of the six Priority Programs was also previously conducted based on the results of the internal and external consultations, including with consultants. The conformity between the six Priority Programs and the 17 points of SDGs can be explained as follows:

Table of Conformity of BNI Syariah Priority Programs with SDGs



No	Program Prioritas Priority Program	SDGs yang Dituju SDGs Conformity
6	Eco Lifestyle	<ul style="list-style-type: none"> Clean Water & Sanitation [6] Affordable & Clean Energy [7] Responsible Consumption & Production [12] Climate Action [13] Life Below Water [14] Life On Land [15]

Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

Langkah awal komitmen BNI Syariah untuk menukveskan implementasi Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan adalah dengan menunjuk Divisi Perencanaan Strategis (SPD) sebagai unit penanggung jawab terkait perumusan dan penetapan Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan serta Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan (CCD) sebagai unit penanggung jawab yang akan melakukan proses monitoring pelaksanaan Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan yang telah disepakati.

Rekapitulasi Pelaksanaan RAKB 2020

BNI Syariah telah berupaya secara optimal untuk mewujudkan 6 (enam) Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan selama tahun 2020. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Perseroan, berikut pencapaian atas program-program tersebut:

Tabel Pencapaian Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan per 31 Desember 2020

No.	Uraian Target Target Description	Pencapaian per 31 Desember 2020 Achievements as of December 31, 2020		Selisih (Gap) Target Target Gap	
		Nominal Pembayaran Financing Nominal	NOA	Nominal Nominal	NOA
1	Peningkatan pembiayaan UMKM Increasing MSME Financing	1.747.420.126.206	10.845	(+)686.075.126.206	(+)7.081
2	Peningkatan Portfolio Pembiayaan Lembaga Pendidikan Improving Educational Institution Financing Portfolio	124.878.60.927	25	(-)239.571.939.073	(+)
3	Peningkatan Portfolio Pembiayaan Ekosistem Jasa Kesehatan Improving Health Services Ecosystem Financing Portfolio	143.469.695.363	16	(-)6.030.304.637	(+)
4	Wakaf Hasanah Waqt Hasanah	8.515.096.132	7.229	-	-
5	Penyaluran Zakat Perusahaan Distribution of Corporate Zakat	14.268.311.806	-	-	-
6	Eco Lifestyle	3 Program 3 Programs	-	Sesuai Corresponding	-

Selain mengukur besarnya pencapaian, evaluasi yang dilakukan BNI Syariah juga berhasil memetakan hambatan yang dihadapi selama menjalankan RAKB 2020, sekaligus merumuskan usulan-usulan alternatif untuk perbaikan pelaksanaan RAKB 2021.

Parties Responsible for Implementation of Sustainable Finance Program

The first step of BNI Syariah's commitment to succeed in the implementation of the Sustainable Finance Priority Program is to appoint the Strategic Planning Division (SPD) as the unit responsible for the formulation and determination of the Sustainable Finance Priority Program and the Secretariat & Communication Division of the Company (CCD) as the unit responsible for the process of monitoring the implementation of the agreed Sustainable Finance Priority Program.

Summary of RAKB 2020 Implementation

BNI Syariah has made optimal efforts to realize 6 (six) Sustainable Financial Priority Programs in 2020. Based on the evaluation conducted by the Company, the following are the achievements of the programs:

Table of Achievement of Sustainable Finance Priority Programs as of December 31, 2020

In addition to measuring the magnitude of the achievements, the evaluation conducted by BNI Syariah also successfully mapped the obstacles faced during the operation of RAKB 2020, as well as formulated alternative proposals for the improvement of the implementation of RAKB 2021.



Hambatan dan Solusi [E.5]

Obstacles and Solutions [E.5]

No.	Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan RAKB Tahun 2020 Obstacles Faced in the Implementation of RAKB 2020	Usulan Perbaikan untuk Pelaksanaan RAKB Tahun 2021 Proposed Improvements for the Implementation of RAKB 2021
1	<p>Pembiayaan dengan wawasan berkelanjutan di sektor pendidikan mengalami <i>delay</i> karena sektor ini merupakan salah satu yang terdampak Covid-19</p> <p>Financing with sustainable insight in the education sector has been delayed because this sector is one of the sectors affected by Covid-19</p>	<p>Diversifikasi sektor, seperti kepada <i>start up</i> pendidikan maupun sektor penunjang pendidikan (aplikasi dan sebagainya)</p> <p>Diversification of sectors, such as for education start-ups and education support sectors (applications and so on)</p>
2	<p>Pembiayaan kesehatan di saat Covid-19 belum dapat mencapai rencana awal karena hanya ditujukan ke institusi Rumah Sakit Klinik, dan/atau penyedia alkes</p> <p>Health financing at the time of Covid-19 has not been able to reach the original plan because it is only aimed at clinical hospital institutions, and / or medical equipment providers</p>	<p>Diversifikasi ke sektor <i>start up</i> kesehatan yang mengalami kenaikan cukup tinggi dan sebagainya</p> <p>Diversification into the health start-up sector which has increased quite high and so on</p>

Implementasi RAKB 2021

Pada tahun 2021, BNI Syariah akan bergabung (*merger*) dengan Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan tanggal efektif penggabungan diperkirakan 1 Februari 2021. Dengan penggabungan tersebut, maka RAKB Perseroan akan menyesuaikan dengan bank hasil merger.

RAKB 2021 Implementation

In 2021, BNI Syariah will merge with Bank BRI Syariah and Bank Mandiri Syariah to become PT Bank Syariah Indonesia Tbk with the effective date of merger is estimated February 1, 2021. With the merger, the Company's RAKB will adjust to the merging banks.





Profil Perusahaan

Company Profile

2020



PROFIL BANK BNI SYARIAH

BANK BNI SYARIAH'S COMPANY PROFILE





DATA PERUSAHAAN

COMPANY DATA



Nama Perusahaan [GRI 102-1]

Company Name

PT Bank BNI Syariah



Bidang Usaha [GRI 102-2][C.4]

Line of Business

Usaha perbankan syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010

The Sharia banking business is in accordance with BNI Syariah Articles of Association No. 160 dated 22 March 2010.



Segmen Usaha [GRI 102-2][C.4]

Business Segment

- Bisnis Komersial
- Bisnis Konsumen & Ritel
- Bisnis Mikro
- Bisnis Tresuri dan Internasional
- Commercial Business
- Consumer & Retail Business
- Micro Business
- Treasury and International Business



Tanggal Efektif Operasional

Operational Effective Date

19 Juni 2010

June 19, 2010



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Incorporation

Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010

Decree of the Minister of Law & Human Rights Number: AHU-15574, AH.01.01 of 2010, dated 25 March 2010

Media Sosial

Social Media



Facebook : PT. Bank BNI Syariah



Twitter : @bnisyariah



Instagram : @bni.syariah



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp10.000.000.000.000

Rp10.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Fully Paid Share Capital

Rp2.921.335.000.000

Rp2.921.335.000.000



Kepemilikan [GRI 102-5]

Ownership

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
99,95%

PT BNI Life Insurance 0,05%

Jumlah Karyawan Tahun 2020 [GRI 102-8]

Total Employees

5.738 Pegawai

5.738 Employee



Alamat Kantor Pusat [GRI 102-3][C.2]

Head Office Address

Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8

Jakarta 12950, Indonesia
Tempo Pavilion Building 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, 3rd-8th fl.
Jakarta 12950, Indonesia

Telepon : +62 21 2970-1946

Faksimili : +62 21 2966-7947

E-mail : info@bnisyariah.co.id

Website : www.bnisyariah.co.id

Phone : +62 21 2970-1946

Faximile : +62 21 2966-7947

E-mail : info@bnisyariah.co.id

Website : www.bnisyariah.co.id



SEKILAS BANK BNI SYARIAH

BNI SYARIAH AT A GLANCE

PT Bank BNI Syariah mencatatkan sejarah pada tahun 2020 setelah berhasil masuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3, yaitu bank dengan modal inti di atas Rp5-30 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020. Dengan menjadi BUKU 3, BNI Syariah dapat memberikan layanan yang lebih beragam kepada nasabah, sehingga peluang untuk terus berkembang akan semakin besar. Kategori ini terwujud setelah pemegang saham melakukan setoran modal *inbreng* sebesar Rp255 miliar. Perseroan "naik kelas" setelah mencatatkan kinerja yang baik selama menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sejak tahun 2010, maupun saat menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) sejak 29 April 2000.

BNI Syariah lahir dari hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang mulai beroperasi pada 29 April 2000. Bank BNI membuka Unit Usaha Syariah setelah terbit Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh karena undang-undang baru ini memungkinkan bank umum membuka layanan syariah, maka BNI memanfaatkan peluang tersebut. [GRI 102-1]

Sejak awal, status UUS dirancang sementara sifatnya sebagaimana dimuat dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000. Setelah UUS, BNI berencana melakukan pemisahan (*spin off*) sehingga statusnya berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Rencana itu diwujudkan pada 19 Juni 2010 dengan lahirnya PT Bank BNI Syariah. Kehadiran Perseroan sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010.

Keberadaan BNI Syariah menggenapkan anak perusahaan Bank BNI pada tahun 2010 menjadi empat. Sebelumnya, telah ada BNI Life, BNI Multifinance, dan BNI Securities. Per 31 Desember 2020, setelah statusnya berubah menjadi BUKU 3, kepemilikan saham Bank BNI Syariah terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 99,95% dan PT BNI Life Insurance sebesar 0,05%. [GRI 102-5]

Setelah menjadi perusahaan yang mandiri, manajemen BNI Syariah bisa menjadi lebih fokus dalam mengelola bisnis, independen, fleksibel dan responsif dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan pengelolaan yang profesional, akhirnya BNI Syariah bisa menjadi bank syariah pilihan rakyat Indonesia. Dalam operasional keseharian, BNI Syariah fokus di ritel dan *consumer banking* dengan fokus industri unggulan di masing-masing wilayah. [GRI 102-2]

Saat ini, kantor pusat BNI Syariah berkedudukan di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lantai 3-8, Jakarta 12950, Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, BNI Syariah memiliki jaringan usaha yaitu 401 outlet dengan komposisi 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 241 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 54 Payment Point dan 23 Bank Layanan Gerak (BLG). Di samping itu, terdapat

PT Bank BNI Syariah made history in 2020 after successfully entering the category of Commercial Bank for Business Activities (BUKU) 3, namely those with core capital above IDR 5-30 trillion, as stipulated in the Financial Services Authority Letter No. S-153/PB.34/2020 dated 23 July 2020. By becoming BUKU 3, BNI Syariah can provide a more diverse range of services to customers, so that opportunities to continue to grow will be even greater. This category was realized after shareholders paid inbreng car payments amounting to IDR 255 billion. The Company "upgraded" after recording good performance during its tenure as a Sharia Commercial Bank (BUS) since 2010, as well as when it was a Sharia Business Unit (UUS) since 29 April 2000.

BNI Syariah was born as a result of the spin-off process of the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk which started operating on 29 April 2000. Bank BNI opened a Sharia Business Unit after the issuance of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to the Law No. 7 of 1992 concerning Banking. Because this new law allows commercial banks to open sharia services, BNI takes advantage of this opportunity. [GRI 102-1]

From the start, the status of UUS was designed temporarily as stated in the 2000 BNI UUS Corporate Plan. After UUS, BNI plans to do a spin-off so that its status changes to a Sharia Commercial Bank (BUS). The plan was realized on 19 June 2010 with the birth of PT Bank BNI Syariah. The presence of the Company as a Sharia Commercial Bank (BUS) based on the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010.

The existence of BNI Syariah made four subsidiaries of Bank BNI in 2010. Previously, there were BNI Life, BNI Multifinance, and BNI Securities. As of 31 December 2020, after its status changed to BUKU 3, the share ownership of Bank BNI Syariah consisted of 99,95% PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and 0,05% PT BNI Life Insurance. [GRI 102-5]

After becoming an independent company, BNI Syariah management can become more focused in managing the business, independent, flexible and responsive in meeting customer needs. With professional management, finally BNI Syariah can become the sharia bank of choice for the Indonesian people. In daily operations, BNI Syariah focuses on retail and consumer banking with a focus on leading industries in each region. [GRI 102-2]

Currently, the BNI Syariah head office is located at Tempo Pavilion 1 Building, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, 3rd-8th floor, Jakarta 12950, Indonesia. Until the end of 2020, BNI Syariah has a business network of 401 outlets with a composition of 3 Regional Offices, 68 Branch Offices, 241 Sub-Branch Offices, 13 Cash Offices, 54 Payment Points and 23 Mobile Service Banks (BLG). In addition, there are 1,722



sebanyak 1.722 outlet Layanan Shariah Bank (LSB) yang dapat mengakomodir layanan BNI Syariah di outlet BNI yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. [GRI 102-4, 102-6]

Shariah Channeling Outlets (SCO) that can accommodate BNI Syariah services at BNI outlets spread across the islands of Java, Bali and Sumatra. [GRI 102-4, 102-6]

VISI dan Misi*) [C.1]
Vision and Mission*) [C.1]

Visi

Vision

“ Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. “

To become the preferred Sharia Bank by people's choice which is provenly leading in services and performance.

Misi

Mission

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

- Provides positive contributions to the community and care for the environment.
- Provides solutions for the community for the needs of sharia banking services.
- Provides optimal investment value for the investors
- Creating the best place as a place of pride to work and for the employees to achieve something as a manifestation of worship
- Being a role model for trustworthy corporate governance

*) Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No. BNISy/DIR/403.

*) The Vision and Mission of BNI Syariah was approved by the Board of Directors and Board of Commissioners of BNI Syariah on 23 December 2010 based on the Decree of the Board of Directors No. BNISy/DIR/403.



BUDAYA KERJA GRI 102-16] [C.1]

WORK CULTURE [GRI 102-16] [C.1]

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki Budaya Kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jama'ah.

Amanah

- Jujur dan menepati janji;
- Bertanggung jawab;
- Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik;
- Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah;
- Melayani melebihi harapan.

Jama'ah

- Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif;
- Membangun sinergi secara profesional;
- Membagi pengetahuan yang bermanfaat;
- Memahami keterkaitan proses kerja;
- Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

Hasanah

Merupakan Budaya Kerja Perusahaan (Corporate Value) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal.

Budaya Kerja BNI Syariah disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai, baik pada setiap Produk, Jasa serta perilaku keseharian *Insan hasanah*. Sosok *Insan hasanah* dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar Amanah dan Jamaah.

Hasanah merupakan corporate campaign BNI Syariah yang memiliki makna "segala kebaikan" bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik di dunia maupun di akhirat (QS. Al Baqarah 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur'an dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui *insan hasanah* dan produk/layanannya. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi *Rahmatan Lil' Alamin*. Hasanah didasari oleh *Maqoshid Syariah* yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

In addition to basing their business activities and operations on sharia principles, positive law, and applicable regulations in Indonesia, all BNI Syariah employees also have a Work Culture that guides their behavior, namely Amanah and Jama'ah.

Amanah (Trustworthiness)

- Honest and keep promises;
- To be responsible;
- Eager to produce the best work;
- Work sincerely and prioritize the intention of worship;
- Serving beyond expectations.

Jama'ah (Community)

- Caring and dare to give or receive constructive feedback;
- Build synergy in a professional manner;
- Share useful knowledge;
- Understand the interrelationship of work processes;
- Strengthening effective leadership.

Hasanah

It is the Corporate Value of BNI Syariah which becomes the main character for employees and companies so that BNI Syariah can be easily recognized.

The BNI Syariah Work Culture is structured in the spirit of providing kindness by building values, both in each product, service and in the daily behavior of human beings. The figure of *Insan hasanah* is achieved collectively by implementing the pillars of Amanah and Jamaah.

Hasanah is a BNI Syariah corporate campaign which means "all goodness" for oneself, society, as well as the nation and state both in the world and in the hereafter (Surah Al Baqarah 201). Hasanah is a value extracted from the Al-Quran and becomes the identity of BNI Syariah in spreading goodness through hasanah people and products/services. The noble ideals to be conveyed through the Hasanah value are that the presence of BNI Syariah can bring goodness to all parties and become *Rahmatan Lil' Alamin*. Hasanah is based on *Maqoshid Sharia*, which means that the purpose of establishing sharia (religious law), namely to protect belief, survival, and human rights consists of five things, namely protecting the religion, protecting the soul, protecting mind, protecting descendants, and protecting assets.



Ke depan, sesuai dengan rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger bank syariah, BNI Syariah melakukan penyesuaian nilai-nilai utama perusahaan menjadi AKHLAK sesuai Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

In the future, according to the SOE Ministry's plan to conduct sharia banks merger, BNI Syariah will make adjustments to the main values of the company to become AKHLAK in accordance with the Circular of the Minister of SOE No. SE-7/MBU/07/2020 dated 1 July 2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises.

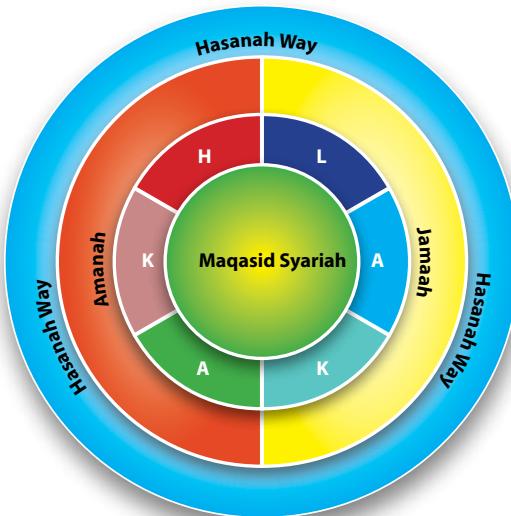
The infographic features the BNI Syariah logo at the top right. Below it, the word "CORE VALUES" is written in white on a teal oval. In the center, the word "AKHLAK" is written in large, bold, dark blue letters. Below "AKHLAK", the words "Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif" are written in a smaller, teal font. To the left, two people are shown from behind, looking at four concentric circles. The outermost circle is yellow and labeled "MAQASID SYARIAH (BASIC PRINCIPLES)". The next circle is teal and labeled "AKHLAK (CORE VALUE)". The third circle is orange and labeled "AMANAH JAMAAH (CORPORATE CULTURE)". The innermost circle is blue and labeled "HASANAH WAY (CORPORATE CAMPAIGN)". Lines connect the labels to their respective circles.

BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh | BNI Syariah merupakan peserta penjaminan | www.bnisyariah.co.id



Core value AKHLAK juga sangat sesuai dengan nilai-nilai dasar yang selama ini telah dikembangkan BNI Syariah, dengan penjelasan sebagai berikut:

AKHLAK's core values are also aligned with the basic values that have been developed by BNI Syariah, with the following explanation:



1. Landasan Dasar:

Maqasid Syariah

adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diwahyukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang harus senantiasa dijaga.

2. Core values BUMN:

AKHLAK

AKHLAK yang memuat tindakan dan perilaku yang baik yang ditujukan untuk peningkatan mutu sumber daya insani.

3. Corporate culture BNI Syariah:

Amanah Jamaah

adalah perincian kebijakan dan tata kelola yang dilengkapi dengan unsur islam agar diterapkan oleh segenap karyawan dan perusahaan.

4. Corporate campaign:

Hasanah Way

adalah penerapan keseharian atas segala kebaikan dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui *Insan Hasanah* dan produk layanannya.

1. Basic Foundation:

Maqasid Sharia

It is an idea in Islamic law that sharia is revealed to achieve certain goals which must be maintained.

2. Core values of SOE:

AKHLAK

AKHLAK includes actions and good behavior aimed at improving the quality of human resources.

3. BNI Syariah corporate culture:

Amanah Jamaah

It is a detailed policy and governance which is equipped with Islamic elements to be implemented by all employees and the company.

4. Corporate campaign:

Hasanah Way

It is the daily application of all goodness and becomes the identity of BNI Syariah in spreading goodness through *Insan Hasanah* and its product/services.



BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA [GRI 102-2][C.4]

BUSINESS SECTOR, PRODUCTS AND SERVICES [GRI 102-2] [C.4]

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir kali dilakukan perubahan pada 7 Januari 2016, yang tertuang dalam Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta. Pada pasal 3 disebutkan bahwa maksud dan tujuan BNI Syariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi selengkapnya tentang bidang usaha, produk dan jasa disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, pada Bab Profil, halaman 52.

In accordance with the Company's Articles of Association, the most recent amendment was on 7 January 2016, as stated in Deed No.4 dated 7 January 2016, drawn up before Notary Fathiah Helmi, SH., In Jakarta. Article 3 states that the purpose and objective of BNI Syariah is to conduct banking business based on sharia principles in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Complete information about the line of business, products and services is presented in the Company's 2020 Annual Report, in the Profile Chapter, page 52.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM [GRI 102-5]

SHAREHOLDERS COMPOSITION [GRI 102-5]

Komposisi Pemegang saham BNI Syariah pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of BNI Syariah shareholders as of 31 December 2020 is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Percentase Percentage
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.919.835	99,95%
PT BNI Life Insurance	1.500	0,05%
Jumlah Total	2.921.335	100,00%

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARY

Hingga 31 Desember 2020, BNI Syariah tidak memiliki entitas anak.

As of 31 December 2020, BNI Syariah has no subsidiaries.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE

Hingga 31 Desember 2020, BNI Syariah tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi, sehingga informasi tersebut tidak tersedia pada Laporan Keberlanjutan ini.

As of 31 December 2020, BNI Syariah has no subsidiaries and associated entities, so that information is not available in this Sustainability Report.

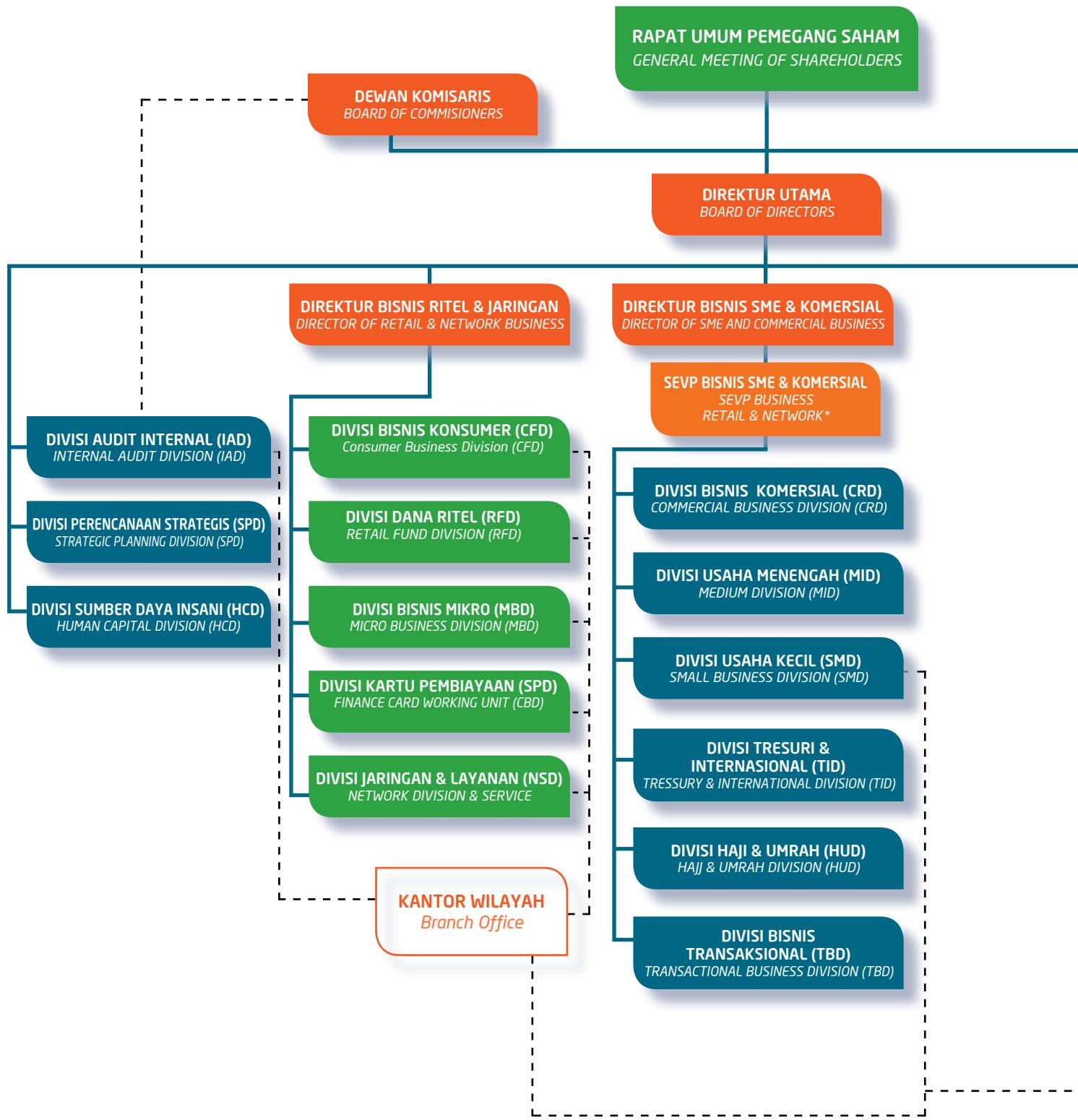


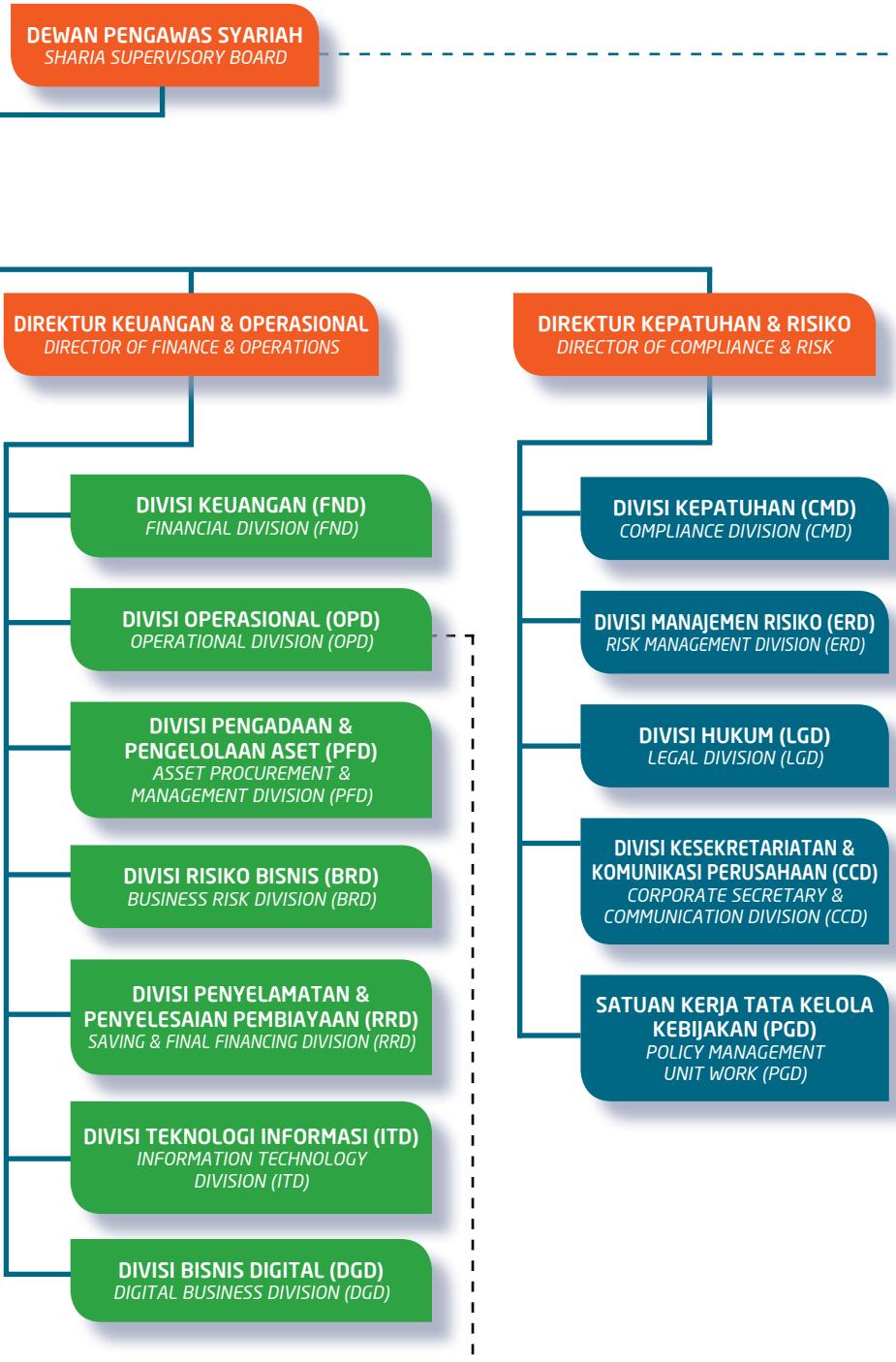
STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

BNI Syariah telah memperbarui Struktur Organisasi Perusahaan yang ditetapkan dalam SK Direksi No. KP/DIR/079/R tanggal 4 November 2020 sebagai berikut:

BNI Syariah has updated the Company's organizational structure as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. KP/DIR/079/R dated 4 November 2020 as follows:





Komite di bawah Dewan Komisaris :

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi & Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

A. Committees under the Board of Commissioners:

1. Audit Committee
2. Remuneration & Nomination Committee
3. Risk Monitoring Committee

Komite di bawah Dewan Direksi :

1. Komite Sumber Daya Manusia
2. Komite Modal, Investasi, Teknologi & Produk
3. Komite Kebijakan & Risiko
4. Komite Aset Liability Management Committee
5. Komite Kebijakan & Risiko - Pencegahan Fraud

B. Committees under the Board of Directors:

1. Human Resources Committee
2. Capital, Investment, Technology & Products Committee
3. Policy & Risk Committee
4. Asset Liability Management Committee
5. Policy & Risk Committee- Anti-Fraud



TARGET PASAR [GRI 102-6]

TARGET MARKET [GRI 102-6]

Sebaran target pasar BNI Syariah dikelompokkan menjadi tujuh lini usaha, yaitu: Komersial, SME/Ritel Produktif, Konsumen, Mikro, Kartu Hasanah, Mass Funding, serta Tresuri & Internasional. Sejak tahun 2009, BNI Syariah menjalankan bisnis kartu pembiayaan melalui produk Hasanah Card yang saat ini menjadi salah satu kartu pembiayaan syariah di Indonesia dengan target pasar nasabah *floating mass* dan segmen *affluent*, dengan nilai pendapatan sekitar Rp36-Rp400 juta per tahun. Dua tahun kemudian, Perseroan menginisiasi bisnis mikro yang menyasar segmen pembiayaan Rp50-Rp500 juta melalui *outlet-outlet* khusus bisnis mikro, dengan target pasar nasabah *floating mass* dan segmen *mass*.

Sementara itu, untuk sebaran secara geografis, target pasar BNI Syariah di dalam negeri (domestik), jejaringnya tersebar di 27 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun sebaran di luar negeri (internasional), melalui kerja sama dengan BNI Remittance Ltd (BRL), BNI Syariah hadir di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura.

The distribution of the BNI Syariah target market is grouped into seven business lines, namely: Commercial, SME/ Productive Retail, Consumer, Micro, Hasanah Card, Mass Funding, and Treasury & International. Since 2009, BNI Syariah has been running the financing card business through the Hasanah Card product, which is currently one of the Islamic financing cards in Indonesia targeting the floating mass customer market and the affluent segment, with an annual revenue value of around IDR 36-IDR 400 million. Two years later, the Company initiated a micro business targeting the financing segment of IDR 50-IDR 500 million through special micro business outlets, targeting the floating mass and the mass segment customer market.

Meanwhile, for geographical distribution, the target market for BNI Syariah in the country (domestic), the network is spread across 27 provinces throughout Indonesia. As for the distribution abroad (international), through cooperation with BNI Remittance Ltd (BRL), BNI Syariah is present in Hong Kong, Taiwan, South Korea and Singapore.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank



JARINGAN DAN WILAYAH OPERASIONAL

[GRI 102-4, 102-6, 102-7]

NETWORK AND REGIONAL OPERATIONS [GRI 102-4, 102-6, 102-7]

**3** Kantor Wilayah
Regional Offices**241** Kantor Cabang Pembantu
Sub-Branch Offices**68** Kantor Cabang
Branch Offices**13** Kantor Kas
Cash Offices



Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainable Good
Corporate Governance



Kinerja Ekonomi
Economic Performance



Kinerja Lingkungan
Environmental
Performance



Kinerja Sosial
Social Performance



54 *Payment Point*
Payment Point



23 *Bank Layanan Gerak (BLG)*
Mobile Service Bank (BLG)



SKALA ORGANISASI [GRI 102-7][C.3]

ORGANIZATION SCALE [GRI 102-7] [C.3]

Uraian Description	2019	2019	2018
Total karyawan Total employees	5.738	5.723	4.942
Pendapatan usaha (dalam miliar Rupiah) Net income (in billion Rupiah)	4.094	4.082 4,082	3.599* 3,599*
Ekuitas (dalam miliar Rupiah) Equity (in billion Rupiah)	5.458	4.735 4,735	4.242 4,242
Liabilitas (dalam miliar Rupiah) Liabilities (in billion Rupiah)	17.254	13.072 13,072	9.787 9,787
Aset (dalam miliar Rupiah) Assets (in billion Rupiah)	55.010	49.980 49,980	41.049 41,049
Jumlah produk dan jasa Number of products and services	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Produk Simpanan • 12 Produk Pembiayaan Konsumen • 12 Produk Pembiayaan Komersial • 5 Jasa e-Banking • 5 Jasa Lainnya (Jasa Bisnis, Keuangan, Kelembagaan, Bisnis Internasional, dan layanan treasuri) <ul style="list-style-type: none"> • 14 Savings Products • 12 Consumer Financing Products • 12 Commercial Financing Products • 5 e-Banking Service • 5 Other Services (Business, Financial, Institutional, International Business, and Treasury Services) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Produk Simpanan • 12 Produk Pembiayaan Konsumen • 3 Produk Pembiayaan Mikro • 7 Produk Pembiayaan SME dan Komersial • 5 Jasa e-Banking • 20 Jasa Lainnya (internasional, treasuri, keuangan, bisnis dan kelembagaan) <ul style="list-style-type: none"> • 25 Savings Products • 12 Consumer Financing Products • 3 Microfinance Products • 7 SME and Commercial Financing Products • 5 e-Banking Service • 20 Other Services (international, treasury, finance, business and institutional) 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 Produk Simpanan • 12 Produk Pembiayaan Konsumen • 12 Produk Pembiayaan Komersial • 7 Jasa Bisnis • 8 Jasa Keuangan • 3 Jasa Kelembagaan • 6 Jasa e-Banking • 2 Jasa Bisnis Internasional • 2 Layanan Treasuri <ul style="list-style-type: none"> • 17 Savings Products • 12 Consumer Financing Products • 12 Commercial Financing Products • 7 Business Services • 8 Financial Services • 3 Institutional Services • 6 e-Banking Service • 2 International Business Services • 2 Treasury Services
Pemegang saham terbesar (persen) The largest shareholder (percent)	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (99,95%)	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (99,94%)	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (99,96%)



INFORMASI MENGENAI KARYAWAN [GRI 102-8][C.3]

INFORMATION REGARDING EMPLOYEES [GRI 102-8] [C.3]

Per 31 Desember 2020, jumlah karyawan BNI Syariah sebanyak 5.378 orang, bertambah 15 orang atau 0,26% dibanding tahun 2019, jumlah karyawan BNI Syariah sebanyak 5.723. Profil karyawan selengkapnya disampaikan dalam tabel-tabel berikut:

Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian Employment status	2020				2019				2018			
	Pria Male	%	Wanita	%	Pria Male	%	Wanita Female	%	Pria Male	%	Wanita Female	%
Pegawai tetap Permanent employee	2.906	91,6%	2.303	89,8%	2.581	81%	1.894	74%	2.450	86,4%	1.725	81,9%
Pro Hire	14	0,4%	10	0,4%	26	1%	12	1%	10	0,3%	2	0,1%
Pegawai kontrak dan trainee Contract employees and trainees	253	4,4%	252	9,8%	568	18%	642	25%	377	13,3%	378	18%
Sub total Sub-Total	3.173	100%	2.565	100%	2.548	100%	3.175	100%	2.837	100%	2.105	100%
Total Total			5.738	100%			5.723	100%			4.942	100%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status dan Wilayah Kerja

As of 31 December 2020, the number of employees of BNI Syariah as many as 5.378 people, increasing 15 people or 0,26% compared to 2019, the number of employees of BNI Syariah as many as 5,723. The complete employee profile is presented in the following tables:

Employee composition based on employment status and gender

Employee Composition Based on Status and Gender

Status Kepegawaian Employment status	2020				2019				2018			
	KP	%	KC	%	KP	%	KC	%	KP	%	KC	%
Pegawai tetap Permanent employee	1.205	87%	4.004	91,9%	977	76%	3.498	78%	803	79,7%	3.372	85,7%
Pro Hire	20	1%	4	0,1%	37	3%	1	0,1%	11	1,1%	1	0,1%
Pegawai kontrak dan trainee Contract employees and trainees	154	11%	351	8,1%	270	21%	940	21,9%	193	19,2%	562	14,2%
Sub total Sub-Total	1.379	100%	4.539	100%	1.284	100%	4.439	100%	1.007	100%	3.935	100%
Total Total			5.738	100%			5.723	100%			4.942	100%

*) KP = Kantor Pusat; KC = Kantor Cabang

*) KP = Head Office; KC = Branch Office



Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Employee Composition Based on Gender

Gender	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	3.183	55,5%	3.175	55,4%	2.837	57,4%
Perempuan Female	2.566	44,5%	2.548	44,5%	2.105	42,6%
Total Total	5.738	100%	5.723	100%	4.942	100%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition Based on Position Level

Level Jabatan	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Executive Manager	29	0,5%	28	0,4%	27	0,5%
Senior Manager	200	3,5%	159	2,7%	135	2,7%
Manager	495	8,6%	437	7,6%	364	7,4%
Junior Manager	1.962	34,2%	1.849	32,3%	1.635	33,1%
Clerk	3.052	53,2%	3.250	56,7%	2.781	56,3%
Total	5.738	100%	5.723	100%	4.942	100%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

Rentang Usia Age Range	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
> 50 tahun > 50 years	148	2,6%	108	2%	61	1,2%
> 40 – 49 tahun > 40 - 49 years	536	9,3%	495	9%	454	9,2%
> 30 – 39 tahun > 30 - 39 years	2.140	37,3%	2.077	35%	1.330	26,9%
≤ 30 tahun ≤ 30 years	2.914	50,8%	3.093	54%	3.097	62,7%
Total Total	5.738	100%	5.723	100%	4.942	100%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Composition of Employees Based on Education Level

Pendidikan Education	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Doktoral Doctoral	1	0%	1	0%	3	0,1%
Pasca Sarjana Postgraduate	292	5,1%	243	4,2%	202	4,1%
Sarjana Bachelor	4.780	83,4%	4.395	76,7%	3.535	71,5%



Pendidikan Education	2020		2019		2018	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Diploma 4	77	1,3%	59	1,0%	30	0,6%
Diploma 3	587	10,2%	1.024	17,8%	1.171	23,7%
Sekolah Menengah Secondary school	1	0%	1	0%	1	0,0%
Total	5.738	100%	5.723	100%	4.942	100%

PERJANJIAN PERUNDINGAN KOLEKTIF [GRI 102-41]

COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT [GRI 102-41]

BNI Syariah menjamin hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan Serikat Pekerja. Per 31 Desember 2020, karyawan yang menjadi anggota Serikat Pekerja tercatat sebanyak 5.738 orang, atau 100 % dari total karyawan. Selanjutnya, untuk menjamin hak dan kewajiban antara karyawan dan manajemen, kedua pihak telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang secara berkala ditinjau dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Pada tahun pelaporan, PKB yang berlaku adalah PKB Periode 2018-2020, yang telah disepakati kedua pihak. PKB tersebut telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.061/PHIJSK-PK/PKB/II/2019 tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Bank BNI Syariah Dengan Serikat Pekerja PT Bank BNI Syariah, tanggal 28 Februari 2019.

BNI Syariah guarantees the rights of employees to associate and assemble by establishing a Worker Union. As of 31 December 2020, employees who are members of trade unions, there were 5,738 person, or 100% of total employees. Furthermore, to guarantee the rights and obligations between employees and management, the two parties have agreed on a Collective Labor Agreement (CLA), which is periodically reviewed and updated to adapt to the latest situation and conditions.

In the reporting year, the valid CLA is the CLA for the period 2018-2020 which has been agreed by both parties. The CLA has received approval from the Director General of Industrial Relations and Labor Social Security, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, by Decree of the Director General of Industrial Relations and Labor Social Security No. KEP.061/PHIJSK-PK/PKB/II/2019 concerning Collective Labor Agreement between PT Bank BNI Syariah and PT Bank BNI Syariah Workers Union, February 28, 2019.



RANTAI PASOKAN [GRI 102-9]

SUPPLY CHAIN [GRI 102-9]

Dalam menjalankan operasional sehari-hari, BNI Syariah menjalin kerja sama dengan pemasok, baik pemasok barang maupun jasa. Untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik, BNI Syariah menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan kepada para pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan semangat untuk memberdayakan pemasok lokal, yaitu pemasok yang secara demografi menjalankan usaha di Indonesia. Dalam kategori ini, termasuk di dalamnya para penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tetap memperhatikan kualitas barang dan jasa yang mereka sediakan. Melalui kerja sama seperti ini, selain mendapatkan harga yang terjangkau, BNI Syariah telah turut serta menggerakkan roda ekonomi setempat. Apabila pemasok lokal tidak bisa menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan, BNI Syariah akan bekerja sama dengan pemasok internasional, yaitu mereka yang secara demografi menjalankan usaha di luar Indonesia. Dengan kategori seperti tersebut di atas, pemasok BNI Syariah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pemasok Barang Tahun 2018-2020

Keterangan Information	Jumlah Pemasok Number of Suppliers			Nilai Kontrak Pekerjaan (Juta Rupiah) Employment Contract Value (Million Rupiah)		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	73	127	24	Rp51.764.882.334	Rp64.364.884.103	Rp48.180.926.024
Luar negeri Overseas	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	73	127	24	Rp51.764.882.334	Rp64.364.884.103	Rp48.180.926.024

Pemasok Jasa Tahun 2018-2020

Keterangan Information	Jumlah Pemasok Number of Suppliers			Nilai Kontrak Pekerjaan (Juta Rupiah) Employment Contract Value (Million Rupiah)		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	150	148	52	Rp192.421.609.310	Rp247.967.770.697	Rp80.344.761.151
Luar negeri Overseas	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	150	148	52	Rp192.421.609.310	Rp247.967.770.697	Rp80.344.761.151

In carrying out daily operations, BNI Syariah cooperates with suppliers, both suppliers of goods and services. To obtain goods and services of the highest quality, BNI Syariah stipulates a number of terms and conditions for suppliers in accordance with the laws and regulations.

In accordance with the spirit to empower local suppliers, namely suppliers that demographically run businesses in Indonesia. In this category, this includes activists of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) while still paying attention to the quality of the goods and services they provide. Through cooperation like this, in addition to getting affordable prices, BNI Syariah has also participated in driving the local economy. If local suppliers are unable to provide the required goods or services, BNI Syariah will cooperate with international suppliers, namely those who demographically run business outside Indonesia. With categories like the above, BNI Syariah suppliers during 2020 are as follows:

Goods Suppliers 2018-2020

Keterangan Information	Jumlah Pemasok Number of Suppliers			Nilai Kontrak Pekerjaan (Juta Rupiah) Employment Contract Value (Million Rupiah)		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	73	127	24	Rp51.764.882.334	Rp64.364.884.103	Rp48.180.926.024
Luar negeri Overseas	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	73	127	24	Rp51.764.882.334	Rp64.364.884.103	Rp48.180.926.024

Service Suppliers 2018-2020

Keterangan Information	Jumlah Pemasok Number of Suppliers			Nilai Kontrak Pekerjaan (Juta Rupiah) Employment Contract Value (Million Rupiah)		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	150	148	52	Rp192.421.609.310	Rp247.967.770.697	Rp80.344.761.151
Luar negeri Overseas	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	150	148	52	Rp192.421.609.310	Rp247.967.770.697	Rp80.344.761.151



PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA PERUSAHAAN DAN RANTAI PASOKANNYA [GRI 102-10][C.6]

SIGNIFICANT CHANGES TO THE COMPANY AND ITS SUPPLY CHAIN [GRI 102-10] [C.6]

Selama tahun 2020, terdapat perubahan signifikan BNI Syariah, antara lain, dengan naiknya status dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2 menjadi BUKU 3, kepemilikan PT BNI (Persero) Tbk dari 99,94% naik menjadi 99,95%, sedangkan kepemilikan PT BNI Life Insurance berkurang dari 0,06% menjadi 0,05%. Perubahan juga terjadi dengan modal dasar, dari semula Rp4.004.000.000.000 naik menjadi Rp10.000.000.000.000 pada tahun 2020, sedangkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh naik dari Rp2.501.500.000.000 pada tahun 2019 menjadi Rp2.921.335.000.000 pada tahun 2020.

Sementara itu, pada rantai pasokan, perubahan signifikan terjadi dengan adanya pengurangan jumlah pemasok barang dan jasa, yaitu dari 275 pemasok pada tahun 2019 menjadi 223 pemasok pada tahun 2020. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya nilai kontrak, yakni Rp312.332.654.800 pada tahun 2019 menjadi Rp244.186.491.644 pada tahun 2020. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan yang tetap mempu mencatatkan kinerja positif selama tahun 2020.

During 2020, there were significant changes in BNI Syariah, among others, by increasing the status of a Commercial Bank for Business Activities (BUKU) II to BUKU 3, ownership of PT BNI (Persero) Tbk from 99.94 % increased to 99.95%, while ownership of PT BNI Life Insurance decreased from 0.06% to 0.05 %. Changes also occurred with the authorized capital, from the original IDR 4,004,000,000,000 to IDR 10,000,000,000,000 in 2020, while the Issued and Fully Paid-Up Capital increased from IDR 2,501,500,000,000 in 2019 to IDR 2,921,335,000,000 in 2020.

Meanwhile, in the supply chain, significant changes occurred with a reduction in the number of suppliers of goods and services, from 275 suppliers in 2019, to 223 suppliers in 2020. These changes resulted in a reduction in contract value of IDR 312,332,654,800 in 2019, to IDR 244,186,491,644 in 2020. However, this reduction did not have a significant impact on the Company's performance, which was still able to record positive performance in 2020.

PENDEKATAN ATAU PRINSIP PENCEGAHAN [GRI 102-11]

PRECAUTIONARY PRINCIPLES OR APPROACHES [GRI 102-11]

Dalam menjalankan usaha, BNI Syariah menghadapi berbagai risiko yang potensial menghambat pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020. Untuk mencegah risiko terjadi atau meminimalkan dampak yang timbul, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengoptimalkan fungsi pengendalian internal, antara lain, Divisi Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, serta Divisi Audit Internal. Selain itu, dalam pengelolaan usaha, BNI Syariah juga senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan tetap memperhatikan regulasi industri perbankan dan ketentuan lainnya.

In running a business, BNI Syariah faces various risks that could potentially hinder the achievement of the targets set in the Bank's Business Plan and the Sustainable Financial Action Plan (RAKB) for 2020. To prevent risks from occurring or to minimize the impacts that arise, the Company applies the principle of prudence by optimizing the internal control function, among others, the Risk Management Division, the Risk Monitoring Committee, the Audit Committee and the Internal Audit Division. In addition, in business management, BNI Syariah always adheres to the principle of prudence (*prudential banking*) while still paying attention to banking industry regulations and other provisions.



PENERAPAN STANDAR EKSTERNAL [GRI 102-12]

APPLICATION OF EXTERNAL STANDARDS [GRI 102-12]

Untuk meraih kinerja terbaik, BNI Syariah berkomitmen untuk mengikuti berbagai standar yang dikembangkan secara eksternal, baik yang berskala nasional maupun internasional, seperti sertifikasi di berbagai bidang. Atas komitmen tersebut, selama tahun pelaporan, Perseroan menerima sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pemangku kepentingan eksternal sebagai berikut:

Internasional International



15 Agustus 2020
15 August 2020

12th Annual Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2020 Best Islamic Finance Retail Bank kategori Syariah Banking Alpha Southeast Asia
12th Annual Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2020 Best Islamic Finance Retail Bank category Sharia Banking Alpha Southeast Asia



15 Agustus 2020
15 August 2020

12th Annual Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2020 Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury kategori Syariah Banking Alpha Southeast Asia
12th Annual Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2020 Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury category Sharia Banking Alpha Southeast Asia



15 Desember 2020
15 December 2020

Islamic Retail Bank Awards 2020 The Best kategori Most Innovative Islamic Retail Bank in Waqf Initiative 2020 for Hasanah Waqf Digital Platform (PT Bank BNI Syariah) Cambridge Institute of Islamic Finance

Nasional National



15 Mei 2020
15 May 2020

INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020 The Best Tabungan BUS kategori The Best Overall Infobank
INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020 The Best BUS (Sharia Commercial Bank) Savings category The Best Overall Infobank



15 Mei 2020
15 May 2020

INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020 The Best KPR BUS kategori The Best Overall Infobank
INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020 The Best Sharia Commercial Bank for Mortgage category The Best Overall Infobank



15 Mei 2020
15 May 2020

INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020 The Best Kartu Debit BUS kategori The Best Overall Infobank
INFOBANK-ISENTIA e-Awarding Digital Brand Awards 2020 The Best Sharia Commercial Bank Debit Card category The Best Overall Infobank

To achieve the best performance, BNI Syariah is committed to following various standards developed externally, both on a national and international scale. For this commitment, during the reporting year, the Company received a number of awards as a form of appreciation from external stakeholders as follows:



Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainable Good
Corporate Governance



Kinerja Ekonomi
Economic Performance



Kinerja Lingkungan
Environmental
Performance



Kinerja Sosial
Social Performance



29 September 2020
29 September 2020

25th Infobank Awards Golden
Trophy Infobank
25th Infobank Awards
Golden Trophy
Infobank



27 Oktober 2020
27 October 2020

9th Infobank Sharia Institution
Award 2020 Golden Award
Infobank
9th Infobank Sharia Institution
Award 2020 Golden Award
Infobank



25 November 2020
25 November 2020

Social Media Award 2020
Peringkat 1 kategori Sharia Savings
Majalah Marketing
Social Media Award 2020
Rank 1 categori Sharia Savings
Majalah Marketing



3 Desember 2020
3 December 2020

BI Award 2020 Bank Dengan Kepatuhan
Pelaporan Terbaik Bank Indonesia
BI Award 2020 Bank with the Best Reporting
Compliance Bank Indonesia



14 Desember 2020
14 December 2020

BAZNAS Award 2020 Mitra Pengumpul Zakat
Perbankan Terbaik kategori Perbankan BAZNAS
BAZNAS Award 2020 Best Zakat Collecting Banking
Partner BAZNAS



17 Desember 2020
17 December 2020

CGPI Award 2020 Most Trusted
Companies SWA
CGPI Award 2020
Most Trusted Companies
SWA



21 Desember 2020
21 December 2020

Anugrah Syariah Republika 2020 Bank Syariah Inovasi
Pembangunan Terbaik kategori Bank BUKU II Republika
Syariah Republika Award 2020 The Best Sharia
Financing Innovation Bank category Bank BUKU II
Republik



KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI [GRI 102-13][C.5]

MEMBERSHIP IN THE ASSOCIATION [GRI 102-13] [C.5]

Sebagai lembaga jasa keuangan syariah, BNI Syariah bergabung dan aktif di berbagai asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama Perseroan. Dengan demikian, Perseroan bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2020, Perseroan bergabung di asosiasi/perhimpunan/lembaga berikut:

ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia)

BNI Syariah terdaftar sebagai anggota ASBISINDO sejak BNI Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah. Bagi bank syariah, keanggotaan dalam ASBISINDO bersifat wajib. Oleh karena itu, setiap wilayah kantor cabang BNI Syariah pun telah terdaftar sebagai anggota ASBISINDO.

Salah satu kegiatan lembaga ini adalah menjalankan dan menyukseksan program-program pemasaran perbankan syariah serta peraturan-peraturan yang mewakili kebutuhan perbankan syariah di pihak regulator.

PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)

PKES merupakan ajang silaturahmi dan forum komunikasi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, asuransi syariah, BMT, dan lembaga keuangan syariah lainnya. BNI Syariah terdaftar menjadi anggota PKES sejak masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)

BNI Syariah terdaftar sebagai anggota MES sejak BNI Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah. BNI Syariah aktif berpartisipasi dalam kegiatan rutin MES, seperti musyawarah (rapat kerja dan perekonomian perbankan syariah).

PERBANAS (Perhimpunan Bank Nasional)

Sejak tanggal 1 Oktober 2013 Bank BNI Syariah telah masuk menjadi anggota Perbanas ke-79 sesuai dengan SK No. 45/SK/PBN/X/2013 dengan nomor keanggotaan PBN.2013.79.

IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam)

BNI Syariah terdaftar sebagai anggota IAEI sejak BNI Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah. BNI Syariah aktif berpartisipasi dalam kegiatan rutin IAEI, seperti musyawarah (rapat kerja dan perekonomian perbankan syariah), partisipasi pada seminar-seminar yang diselenggarakan IAEI.

FKDP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan)

Setiap Bank Umum pada Direktorat Risiko dan Kepatuhan wajib menjadi anggota Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan guna mendapatkan informasi Risiko dan Kepatuhan dari Bank Indonesia atau Otorisasi Jasa Keuangan.

As a sharia financial services institution, BNI Syariah joins and is active in various associations or institutions that are relevant to the main business of the Company. Thus, the Company can follow the latest developments, issues or topics, as well as exchange information and provide suggestions/input for mutual progress. During 2020, the Company joined the following association/organization/institution:

ASBISINDO (Indonesian Sharia Bank Association)

BNI Syariah has been registered as a member of ASBISINDO since BNI Syariah was still a Sharia Business Unit. For sharia banks, membership in ASBISINDO is mandatory. Therefore, every BNI Syariah branch office area has also been registered as a member of ASBISINDO.

One of the activities of this institution is to carry out and succeed in sharia banking marketing programs and regulations that represent the needs of sharia banking on the part of the regulators.

PKES (Sharia Economic Communication Center)

PKES is a gathering place and communication forum for all sharia financial institutions, including sharia banking, sharia insurance, BMT, and other sharia financial institutions. BNI Syariah has been registered as a member of PKES since it was still a Sharia Business Unit (UUS).

MES (Sharia Economic Community)

BNI Syariah has been registered as a member of MES since BNI Syariah was still a Sharia Business Unit. BNI Syariah actively participates in routine MES activities, such as musyawarah (work meetings and the economy of Islamic banking).

PERBANAS (National Bank Association)

Since 1 October 2013 Bank BNI Syariah has become a member of the 79th Perbanas in accordance with Decree No. 45/SK/PBN/X/2013 with membership No. PBN.2013.79.

IAEI (Association of Islamic Economist)

BNI Syariah has been registered as a member of IAEI since BNI Syariah was still a Sharia Business Unit. BNI Syariah actively participates in routine IAEI activities, such as musyawarah (work meetings and banking economy), participation in seminars held by IAEI.

FKDP (Bank's Compliance Director Communication Forum)

Every Commercial Bank in the Risk and Compliance Directorate is required to become a member of Bank's Compliance Director Communication Forum in order to obtain Risk and Compliance information from Bank Indonesia or the Financial Services Authority.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank





Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

2020





TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, merupakan kunci penting dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh BNI Syariah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkualitas dan berkesinambungan. Bagi Perseroan, GCG adalah sekumpulan prinsip yang menjadi dasar dalam setiap proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika dalam berusaha.

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, BNI Syariah berkomitmen untuk menerapkan GCG di semua lini. Penerapan tersebut dilakukan tidak sekedar memenuhi ketentuan otoritas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi lebih didorong oleh kesadaran bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing yang berkelanjutan.

Bagi BNI Syariah, penerapan GCG sekaligus merupakan sarana untuk mewujudkan keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sehingga menekan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pengelolaan perusahaan. Terciptanya kondisi seperti itu akan menjadi landasan yang kuat bagi BNI Syariah untuk menjawab tantangan dan tuntutan dari para pemangku kepentingan.

Dalam menerapkan GCG, BNI Syariah merujuk pada sejumlah regulasi, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, BNI Syariah berkomitmen untuk terus-menerus menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG. Untuk itu, dukungan penuh dari pemegang saham (*shareholder*) maupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik internal maupun eksternal, sangat dibutuhkan. Dengan semakin sempurnanya penerapan prinsip-prinsip GCG, BNI Syariah optimistis akan mampu menjalankan roda perusahaan dengan baik sehingga mampu meraih target-target yang telah ditetapkan Perseroan.

Good Corporate Governance or *Good Corporate Governance*, hereinafter referred to as GCG, is key and needs to be met by BNI Syariah to achieve quality growth and sustainable enterprise. For the Company, GCG is a set of principles that are the basis for every process and mechanism of corporate management based on laws and regulations and ethics in doing business.

As a responsible corporation, BNI Syariah is committed to implementing GCG at all levels. The implementation is carried out not only to fulfill the provisions of the authorities or the applicable laws and regulations, but is more driven by the awareness that good governance is an important key to improving performance and improving a sustainable competitive advantage.

For BNI Syariah, the implementation of GCG is at the same time a means to achieve balance in company control so as to reduce opportunities for fraud and minimize the risk of mismanagement of the company. The creation of such conditions will be a strong foundation for BNI Syariah to respond to challenges and demands from stakeholders.

In implementing GCG, BNI Syariah refers to a number of regulations, namely Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, General Guidelines for Indonesian Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance and Financial Services Authority regulations, as well as Bank Indonesia Regulation No. 11/33/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

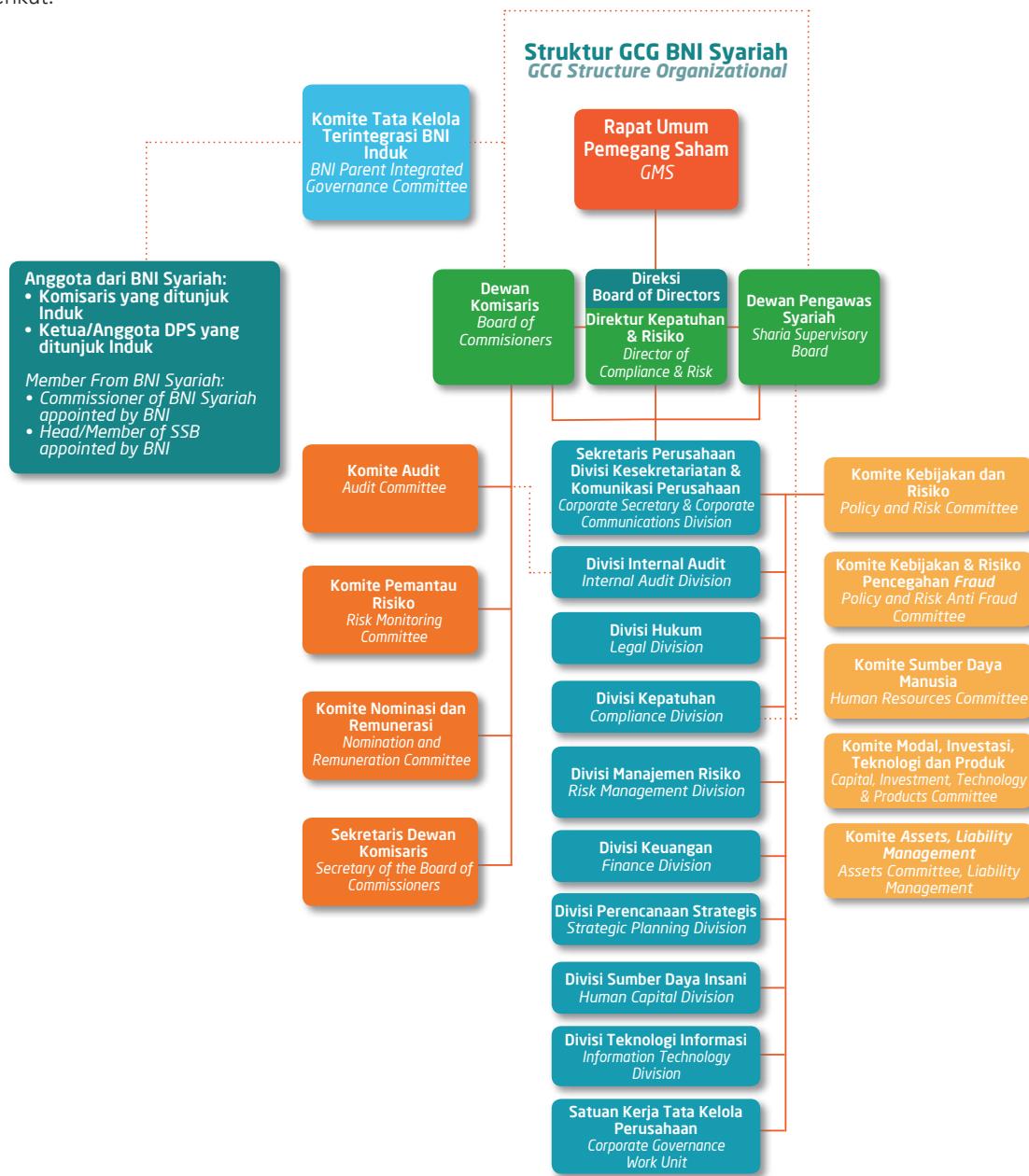
To get optimal results, BNI Syariah is committed to continuously improving the implementation of GCG principles. For this reason, full support from shareholders and stakeholders, both internal and external, is needed. With the implementation of GCG principles increasingly perfect, BNI Syariah is optimistic that it will be able to run the company's wheels well so that it can achieve the targets set by the Company.

STRUKTUR TATA KELOLA [GRI 102-18]

GOVERNANCE STRUCTURE [GRI 102-18]

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun sistem kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, BNI Syariah senantiasa menyesuaikan struktur tata kelola dengan praktik-praktik terbaik di Indonesia. Adapun struktur tata kelola per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners. The management system of Limited Liability Companies in Indonesia adopts a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, which have clear powers and responsibilities according to their respective functions as mandated in the laws and regulations. To get optimal results, BNI Syariah always adjusts the governance structure with the best practices in Indonesia. The governance structure as of 31 December 2020 is as follows:





Organ Utama Main Organs	Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners	Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI Induk BNI Parent Integrated Governance Committee
<ul style="list-style-type: none"> RUPS Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Direksi GMS Board of Commissioners Sharia Supervisory Board Board of Directors 	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit Komite Pemantau Risiko Komite Nominasi & Remunerasi Audit Committee Risk Monitoring Committee Remuneration & Nomination Committee 	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan Divisi Internal Audit Divisi Hukum Divisi Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan Divisi Keuangan Divisi Perencanaan Strategis Divisi Sumber Daya Insani Divisi Teknologi Informasi Satuan Kerja Tata Kelola Perusahaan Corporate Secretary and Communication Division Internal Audit Division Legal Division Compliance Division Risk Management and Corporate Policy Division Finance Division Strategic Planning Division Human Capital Division
<ul style="list-style-type: none"> Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan Divisi Internal Audit Divisi Hukum Divisi Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan Divisi Keuangan Divisi Perencanaan Strategis Divisi Sumber Daya Insani Divisi Teknologi Informasi Satuan Kerja Tata Kelola Perusahaan Corporate Secretary and Communication Division Internal Audit Division Legal Division Compliance Division Risk Management and Corporate Policy Division Finance Division Strategic Planning Division Human Capital Division 	<ul style="list-style-type: none"> Komite Sumber Daya Manusia Komite Modal, Investasi, Teknologi & Produk Komite Kebijakan & Risiko Komite Aset Liability Management Komite Kebijakan dan Risiko Pencegahan Fraud Human Resources Committee Capital, Investment, Technology & Products Committee Policy & Risk Committee Asset Liability Management Committee Policy and Risk Committee—Anti Fraud 	

Sementara itu, seiring dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Laporan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, maka BNI Syariah sebagai Bank BUKU II selanjutnya berubah statusnya menjadi Bank BUKU 3 pada Mei 2020 terkena kewajiban untuk menerapkan peraturan tersebut per 1 Januari 2020. Lampiran POJK tersebut antara lain mengatur tentang adanya pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan. Untuk itu, BNI Syariah menunjuk Divisi Perencanaan Strategis (SPD) sebagai unit penanggung jawab terkait perumusan dan penetapan Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan, serta Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan (CCD) sebagai unit penanggung jawab yang akan melakukan proses pemantauan pelaksanaan Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan yang telah disepakati. [E.1]

Meanwhile, in line with the enactment of the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance Reports for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, BNI Syariah as a Bank BUKU II - then changed its status to Bank BUKU 3 in May 2020 - subject to the obligation to implement this regulation as of 1 January 2020. The POJK attachment regulates, among others, the existence of employees, officers and/or work units who are responsible for implementing sustainable finance. For this reason, BNI Syariah appointed the Strategic Planning Division (SPD) as the unit in charge regarding the formulation and determination of the Sustainable Finance Priority Program, and the Corporate Secretary & Communication Division (CCD) as the unit in charge that will monitor the implementation of the Sustainable Finance Priority Program that has been agreed upon. [E.1]



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/ atau Anggaran Dasar. RUPS merupakan forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja mereka terhadap Pemegang Saham. Dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham di BNI Syariah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa).

Melalui RUPS, para pemegang saham berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi; mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi; mengesahkan perubahan Anggaran Dasar; memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan; menetapkan alokasi penggunaan laba; menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik; menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus, serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 8 (delapan) kali Rapat Umum Pemegang Saham, terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 7 (tujuh) kali RUPS Luar Biasa, yang seluruhnya diselenggarakan di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan dan taat laksana RUPS, rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan Kuasa dari Pemegang Saham agar dapat mengambil keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keseluruhan mata acara dan keputusan yang diambil akan dibuatkan berita acara sebagai bukti sah tentang pengambilan keputusan dan segala sesuatu yang terjadi di dalam rapat.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company that has the authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Limited Liability Company Law and/or the Articles of Association. The GMS is a forum where the Board of Directors and the Board of Commissioners report and are responsible for their performance to the Shareholders. In the GMS, shareholders are entitled to obtain information relating to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in accordance with the agenda of the meeting and not against the interests of the Company. The General Meeting of Shareholders at BNI Syariah consists of the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS).

Through the GMS, shareholders are authorized to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors; evaluate the performance of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors; ratify amendments to the Articles of Association; approve the Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and the Company's Financial Report; determine the allocation of the use of profits; appoint and determine fees for public accountants; determine the amount and type of compensation as well as facilities for the management, as well as other authorities stipulated by statutory regulations.

In 2020, the Company held 8 (eight) General Meeting of Shareholders, consisting of 1 (one) Annual GMS and 7 (seven) Extraordinary GMS, all of which were held in Jakarta. In accordance with the provisions and adherence to the GMS, the meeting is attended by members of the Board of Commissioners, Board of Supervisors, Directors and Proxy of Shareholders in order to make decisions legally based on deliberation to reach consensus. The entire agenda and decisions taken will be made an official report as valid evidence of decision making and everything that happens in the meeting.



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SHARIA SUPERVISORY BOARD

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS di BNI Syariah merupakan implementasi pasal 32 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni "Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)." Kewajiban tentang DPS juga diatur dalam pasal 109, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Komitmen DPS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional BNI Syariah adalah melakukan review terhadap kegiatan BNI Syariah selama tahun 2020 dalam upaya meningkatkan pengawasan praktik syariah. Keseluruhan temuan hasil uji petik langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Merujuk Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk BNI Syariah terdiri atas 2 (dua) orang, yakni 1 (satu) orang ketua dan 1 (orang) anggota. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan DPS BNI Syariah hingga 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.
Anggota	: Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H.

Sharia Supervisory Board (SSB) is a board tasked with providing advice and suggestions to the Board of Directors as well as supervising bank activities to comply with sharia principles. The existence of SSB in BNI Syariah is an implementation of article 32 of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, namely "Sharia Supervisory Board must be formed in Sharia Banks and Conventional Commercial Banks that have UUS (Sharia Business Units)." The obligations regarding SSB are also regulated in article 109, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SSB is appointed by the General Meeting of Shareholders on the recommendation of the Indonesian Ulema Council.

DPS carries out its duties and responsibilities in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), as well as providing advice and suggestions to the Board of Directors regarding the implementation of Bank activities to comply with sharia principles. The Sharia Supervisory Board is appointed and ratified by the GMS in accordance with the recommendations of the National Sharia Board (DSN).

The commitment of SSB in carrying out the supervisory function of BNI Syariah operations is to review BNI Syariah activities during 2020 in an effort to improve supervision of sharia practices. All findings from direct sampling at the branch office have been submitted to the Board of Directors or related work units to be followed up and corrected in order to comply with established sharia principles.

Composition of the Sharia Supervisory Board

Referring to Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 12/13/DPbS and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Sharia Supervisory Board (SSB) for BNI Syariah consists of 2 (two) people, namely 1 (one) Head and 1 (person) members. Based on these regulations, the composition of the DPS BNI Syariah until 31 December 2020 is as follows:

Head	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.
Member(s)	: Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., MH



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Melalui pengawasan dan pemberian nasihat tersebut, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan para pihak yang berkepentingan (stakeholder). [5.a]

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Nominasi dan Remunerasi;

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 25 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Per tanggal 31 Desember 2020, BNI Syariah memiliki 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris yang telah melalui proses nominasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi BNI Syariah dan diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Pengangkatan melalui RUPS efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 50% (lima puluh persen) di antaranya adalah Komisaris Independen. Susunan anggota Dewan Komisaris yang efektif telah diajukan notar dan dilaporkan pemberitahuannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Komposisi anggota Dewan Komisaris BNI Syariah per tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Title	Pengangkatan oleh RUPS Appointment by GMS
1	Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama (President Commissioners)	RUPS Tahunan 9 Mei 2019 Annual GMS, May 9, 2019
2	Max R. Niode	Komisaris Independen (Independent Commissioners)	RUPS Tahunan 9 Mei 2019 Annual GMS, May 9, 2019
3	Imam Budi Sarjito	Komisaris (Commissioner)	RUPS-LB 20 September 2018 Extraordinary GMS, September 20, 2018
4	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen (Independent Commissioners)	RUPS Tahunan 9 Mei 2019 Annual GMS, May 9, 2019

The Board of Commissioners is an organ of the Company which is tasked with conducting general and/or specific supervision and providing advice to the Board of Directors in running and managing the company. Supervision and provision of advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors are carried out for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company. Through this supervision and provision of advice, the Board of Commissioners ensures that the Board of Directors carries out its duties in accordance with the interests of the interested parties (stakeholders). [5.a]

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by:

- Audit Committee;
- Risk Monitoring Committee;
- Nomination and Remuneration Committee;

Composition of the Board of Commissioners

Based on Article 25 PBI No. 11/3/PBI 2009 concerning Sharia Commercial Banks and the Articles of Association of the Company, that the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people and at most equal to the number of members of the Board of Directors.

As of 31 December 2020, BNI Syariah had 4 (four) members of the Board of Commissioners who had gone through the nomination process by the BNI Syariah Remuneration and Nomination Committee and were appointed based on the approval of the GMS. Appointment through the GMS is effective after the person concerned has passed the Fit and Proper Test and/or get approval from the Financial Services Authority (FSA). All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia, one of whom is appointed as the President Commissioner, and 50% (fifty percent) of them are Independent Commissioners. The composition of the effective members of the Board of Commissioners has been notarized and reported the notification to the Ministry of Law and Human Rights.

The composition of the members of the Board of Commissioners of BNI Syariah as of 31 December 2020 is as follows:



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi BNI Syariah terdiri dari Direktur Utama, dan Direktur lainnya yang bertugas sesuai masing-masing bidang kerja. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan. Direksi BNI Syariah dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan transparansi, sikap profesional, kesungguhan dalam mengedepankan kepentingan Bank dan stakeholders, berpikir strategis serta memastikan pencapaian target dan keberlanjutan usaha. [5.a]

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh:

- a. Komite Sumber Daya Manusia;
- b. Komite Modal, Investasi, Teknologi & Produk;
- c. Komite Kebijakan & Risiko;
- d. Komite Aset Liability Management;
- e. Komite Kebijakan dan Risiko Pencegahan Fraud.

Komposisi Direksi

Berdasarkan Pasal 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan dipimpin oleh Direktur Utama. Per 31 Desember 2020, BNI Syariah memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi yang telah melalui proses nominasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi BNI Syariah dan diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan rincian komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Position	Pengangkatan oleh RUPS Appointment by the GMS
1	Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama President Director	RUPS-LB 23 Maret 2017 Extraordinary GMS, March 23, 2017
2	Dhias Widhiyati*	Direktur Bisnis SME & Komersial Director of SME & Commercial Business	RUPS-LB 23 Maret 2017 Extraordinary GMS, March 23, 2017
3	Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko Director of Risk and Compliance	RUPS-LB 29 Desember 2017 Extraordinary GMS, December 29, 2017
4.	Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional Director of Finance and Operations	RUPS Tahunan 27 April 2018 AGMS, April 27, 2018
5.	Iwan Abdi**	Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan Director of Retail and Network Business	RUPS Tahunan 9 April 2020 AGMS, April 9, 2020
6.	Babas Bastaman***	Direktur Bisnis SME & Komersial Director of SME & Commercial Business	RUPS Tahunan 9 April 2020 AGMS, April 9, 2020

*Masa jabatan Direktur berakhir pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020

**Diangkat dan efektif pada RUPS Tahunan 2020 tanggal 24 Maret 2020

***Belum efektif

* The Director's term of office ends at the 2020 Annual GMS on 24 March 2020

** Appointed and effective at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 24 March 2020

*** Not yet effective

The Board of Directors is the Company's organ that is authorized and fully responsible for managing the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association. The Board of Directors of BNI Syariah consists of the President Director and other Directors who are assigned to their respective fields of work. Members of the Board of Directors are jointly and severally responsible for all management actions taken. BNI Syariah's Board of Directors in carrying out their duties always prioritize transparency, professional attitude, seriousness in prioritizing the interests of the Bank and stakeholders, thinking strategically and ensuring the achievement of targets and business sustainability. [5.a]

In carrying out its duties, the Board of Directors is assisted by:

- a. Human Resources Committee;
- b. Capital, Investment, Technology & Products Committee;
- c. Policy & Risk Committee;
- d. Asset Liability Management Committee;
- e. Policy and Risk Committee Anti Fraud.

Composition of the Board of Directors

Based on Article 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 concerning Sharia Commercial Banks and the Company's Articles of Association, that the number of members of the Board of Directors is at least 3 (three) people and is led by the President Director. As of 31 December 2020, BNI Syariah had 5 (five) members of the Board of Directors who had gone through the nomination process by the BNI Syariah Remuneration and Nomination Committee and were appointed based on the approval of the GMS. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia, with details of the composition of the members of the Board of Directors as follows:



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020 [E.1]

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020 [E.1]

Sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan bagi BNI Syariah per 1 Januari 2020, maka Dewan Komisaris, Direksi, dan Divisi Perencanaan Strategis (SPD), serta Divisi Kesekretariatan & Komunikasi Perusahaan (CCD) senantiasa mengembangkan wawasan dan kompetensi melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, workshop dan sejenisnya. Adapun rincian pengembangan kompetensi selengkapnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

In line with the implementation of sustainable finance for BNI Syariah per 1 January 2020, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Strategic Planning Division (SPD), as well as the Corporate Secretary & Communications Division (CCD) maintain and develop the knowledge and competence through a variety of activities, such as training, seminars, workshops and the like. The complete details of competency development during 2020 are as follows:

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Competency Development for the Board of Commissioner

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Competency Development Materials/Training	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara Organizer
Max R Niode	Komisaris Commissioner	Workshop Embedding Sustainability Program into Bank's Business Model	Jakarta, 13 Maret 2020 Jakarta, 13 March 2020	BARA
		Refreshment SMR - Optimalisasi Pengelolaan Risiko Hukum Dampak Restrukturisasi Kredit Refreshment SMR - Optimizing Legal Risk Management Impact of Credit Restructuring	Jakarta, 27 Juli 2020 Jakarta, 17 July 2020	IBI
		Risk Management Refreshment Program	Jakarta, 9 Desember 2020 Jakarta, 9 December 2020	Ikatan Bankir Indonesia Indonesia Banker Institute

Pengembangan Kompetensi Direksi

Competency Development for the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Competency Development Materials/Training	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara Organizer
Abdullah Firman Wibowo	Direktur Utama President Director	Webinar Higher Education, Innovation, and Sustainability Higher Education, Innovation, and Sustainability Webinar	Jakarta, 7 Januari 2020 Jakarta, 7 January 2020	IPB University
		Webinar Peningkatan Komperensi SDM Korporasi Memasuki Era New Normal Webinar on Enhancing Corporate HR Competence Entering the New Normal Era	Jakarta, 7 Februari 2020 Jakarta, 7 February 2020	Econand
		Webinar Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Perekonomian dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Webinar on the Impact of Covid-19 on Indonesian Economic Conditions and Financial System Stability	Jakarta, 7 Maret 2020 Jakarta, 7 March 2020	IBS



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Competency Development Materials/Training	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara Organizer
		Workshop Supply Chain Financing BPJS Kesehatan BPJS Health Supply Chain Financing Workshop	Jakarta, 23 April 2020 Jakarta, 23 April 2020	BNI Syariah
		Implementasi Operational Risk Management pada periode Covid-19 Implementation of Operational Risk Management in the Covid-19 period	Jakarta, 8 Mei 2020 Jakarta, 8 May 2020	IBI
		Talkshow Bersama Rektor "Peluang dan Tantangan Pendidikan Jarak Jauh Program Studi Ekonomi Syariah" Talkshow with the Rector "Opportunities and Challenges of Distance Education for Sharia Economics Study Program"	Jakarta, 13 Mei 2020 Jakarta, 13 May 2020	KNEKS & IAEI
		Webinar Forum Diskusi Online Indonesia Moving Forward "Macro Outlook dan Peluang Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi Covid-19" Indonesia Online Discussion Forum Moving Forward "Macro Outlook and Opportunities for Economic Awakening Post-Covid-19 Pandemic" Webinar	Jakarta, 13 Mei 2020 Jakarta, 13 May 2020	Indonesia Media
		Webinar Tantangan Industri Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19 Webinar on Challenges of the Financial Industry Amid the Covid-19 Pandemic	Jakarta, 18 Mei 2020 Jakarta, 18 May 2020	MMUGM-WMSBI
		Webinar Inovasi Layanan Keuangan Saat New Normal - Bank Tradisional vs. Challenger Bank Financial Service Innovation Webinar When a New Normal - Traditional vs. Challenger Bank	Jakarta, 15 Juni 2020 Jakarta, 15 June 2020	LPPI
		Workshop Mitigasi Risiko Kredit dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan Credit Risk Mitigation and Restructuring Through Guarantee Workshop	Jakarta, 16 Juni 2020 Jakarta, 16 June 2020	LPPI
		Webinar Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibilitas, Kecepatan, dan Risiko Kebijakan Pemulihian Ekonomi Nasional Webinar on Economic Solutions for Handling the Covid-19 Pandemic Facing the Challenges of Accountability, Flexibility, Speed and Risk of National Economic Recovery Policies	Jakarta, 27 Juni 2020 Jakarta, 27 June 2020	FIRM
		Webinar Solusi Ekonomi Islam Dalam Kebangkitan Ummat Pasca Pandemi Covid-19 Webinar on Islamic Economic Solutions in the Awakening of the Community Post Covid-19 Pandemic	Jakarta, 27 Juni 2020 Jakarta, 27 June 2020	PPM
		Webinar Financial and Legal Aspects of Rescuing, Restructuring, and Realigning companies facing pandemic crisis Webinar on Financial and Legal Aspects of Rescuing, Restructuring, and Realigning companies facing the pandemic crisis	Jakarta, 30 Juni 2020 Jakarta, 30 June 2020	Intrinsics



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Competency Development Materials/Training	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara Organizer
		Webinar <i>Issues and Challenges of Human Resources Competencies in Islamic Banks</i> Webinar on Issues and Challenges of Human Resources Competencies in Islamic Banks	Jakarta, 27 Juli 2020 Jakarta, 27 July 2020	Medan Area University (UMA)
		Webinar <i>How To Lead Effectively in VUCA era & New Normal</i> Webinar on How To Lead Effectively in VUCA era & New Normal	Jakarta, 29 Juli 2020 Jakarta, 29 July 2020	QLM Training dan Consulting
		Webinar Etika, Integritas dan Tata Kelola di Industri Financial <i>Webinar on Ethics, Integrity and Governance in the Financial Industry</i>	Jakarta, 25 Agustus 2020 Jakarta, 25 August 2020	LPPI
		Webinar Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pemulihian Ekonomi Nasional Webinar on the Role of the Financial Services Sector in National Economic Recovery	Jakarta, 18 September 2020 Jakarta, 18 September 2020	Internasional Banking School
		Webinar <i>New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihian Ekonomi Nasional</i> Webinar on New Business Model of Banking and Business Amid National Economic Recovery	Jakarta, 24 September 2020 Jakarta, 24 September 2020	Info Bank
		Webinar <i>Digital Governance For Digital Transformation</i> Webinar on Digital Governance For Digital Transformation	Jakarta, 25 September 2020 Jakarta, 25 September 2020	Universitas Airlangga
		Webinar Nasional Menghadapi Krisis Ekonomi Global National Webinar Facing the Global Economic Crisis	Jakarta, 25 September 2020 Jakarta, 25 September 2020	Perbanas Institute
		Webinar Pemulihian Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Webinar on Indonesia's Economic Recovery during the Pandemic	Jakarta, 27 September 2020 Jakarta, 27 September 2020	Internasional Banking School
		Webinar <i>Financial and Legal Due Diligence</i> Financial and Legal Due Diligence Webinar	Jakarta, 30 September 2020 Jakarta, 30 September 2020	Intrinsics
		Webinar Peran & Kontribusi Keuangan Syariah dalam Membangun Ekonomi Islam Webinar Role & Contribution of Sharia Financial in Building Islamic Economy	Jakarta, 14 November 2020 Jakarta, 14 November 2020	Kagama
		Online Training : Efisiensi Pelaksanaan RUPS Sesuai Rencana Bisnis Bank (Berdasarkan OJK dan GCG) Online Training: Efficiency of GMS Implementation according to the Bank's Business Plan (Based on FSA and GCG)	Jakarta, 26 November 2020 Jakarta, 26 November 2020	Info Bank
		Risk Management Refreshment Program	Jakarta, 9 Desember 2020 Jakarta, 9 December 2020	Ikatan Bankir Indonesia Indonesian Banker Institute



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Competency Development Materials/Training	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara Organizer
Babas Bastaman	Direktur Bisnis SME & Komersial Director of SME Business and Commercial	Workshop Supply Chain Financing BPJS Kesehatan BPJS Health Supply Chain Financing Workshop Refreshment SMR level 5 - Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko Refreshment SMR level 5 - Assessment of Bank Soundness Based on Risk Sertifikasi Treasury Level Advance Treasury Level Advance Certification	Jakarta, 23 April 2020 Jakarta, 23 April 2020 Jakarta, 4 September 2020 Jakarta, 4 September 2020 Jakarta, 28 Desember 2020 Jakarta, 28 December 2020	BNI Syariah BSMR IIGMA
Iwan Abdi	Direktur Retail Business & Jaringan Director of Business Retail and Network	Webinar Company Strategic Planning Webinar on Company Strategic Planning Refreshment SMR All Level "Memahami Risiko Perbankan di saat pandemi mendera" Refreshment SMR All Level "Understanding Banking Risks when a pandemic hits" Pelatihan Fiqh Muamalah Maliyyah Muamalah Maliyyah Fiqh Training	Jakarta, 9 Januari 2020 Jakarta, 9 December 2020 Jakarta, 16 April 2020 Jakarta, 16 April 2020 Jakarta, 30 April 2020 Jakarta, 30 April 2020	PPM BSMR MUI Institute
		Webinar New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihian Ekonomi Nasional Webinar on New Business Model of Banking and Business Amid National Economic Recovery Webinar Agriculture Forum Seri VII "Wirausaha Muda Pertanian" Webinar on Agriculture Forum Series VII "Young Agricultural Entrepreneurs"	Jakarta, 24 September 2020 Jakarta, 24 September 2020 Jakarta, 25 September 2020 Jakarta, 25 September 2020	Infobank Universitas Andalas
		Webinar Unand Inspiring Unand Inspiring Webinar Islamic Economic Law	Jakarta, 25 September 2020 Jakarta, 25 September 2020 Jakarta, 6 Oktober 2020 Jakarta, 6 October 2020	Universitas Andalas Karim Consulting



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Competency Development Materials/Training	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara Organizer
Tribuna Tunggadewi	Direktur Kepatuhan dan Risiko Director of Compliance & Risk	Webinar Strategi Jitu Membuat Pledoii (Pembelaan) Webinar on Accurate Strategies for Establishing Pledoii (Defense)	Jakarta, 7 Januari 2020 Jakarta, 7 January 2020	Peradi Jakbar
		Webinar Strategi Jitu Menghadapi Perkara Tindak Pidana Korupsi Webinar on Appropriate Strategies for Facing Corruption Crime Cases	Jakarta, 15 Juli 2020 Jakarta, 15 July 2020	Peradi Jakbar
		Webinar Konsolidasi Bank - Akibat Hukum bagi Piyah Yang Berkepentingan Bank Consolidation Webinar - Legal Effects for Stakeholders	Jakarta, 5 November 2020 Jakarta, 5 November 2020	IDLC
		Online Training : Efisiensi Pelaksanaan RUPS Sesuai Rencana Bisnis Bank (Berdasarkan OJK dan GCG) Online Training: Efficiency of GMS Implementation according to the Bank's Business Plan (Based on FSA and GCG)	Jakarta, 26 November 2020 Jakarta, 26 November 2020	Info Bank
		Webinar Is Covid-19 a Force Majeure Event?	Jakarta, 5 Desember 2020 Jakarta, 5 December 2020	Aksel Law
Wahyu Avianto	Direktur Keuangan dan Operasional Director of Finance & Operations	Risk Management Refreshment Program	Jakarta, 9 Desember 2020 Jakarta, 9 December 2020	Ikatan Bankir Indonesia Indonesian Banker Institute
		Refreshment Manajemen Risiko - Financial Crime & How to Mitigate Market Risk in Banks Refreshment Risk Management - Financial Crime & How to Mitigate Market Risk in Banks	Jakarta, 21 Februari 2020 Jakarta, 21 February 2020	LSPP
		Workshop Supply Chain Financing BPJS Kesehatan BPJS Health Supply Chain Financing Workshop	Jakarta, 23 April 2020 Jakarta, 23 April 2020	BNI Syariah
		Webinar New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihian Ekonomi Nasional Webinar on New Business Model of Banking and Business Amid National Economic Recovery	Jakarta, 24 September 2020 Jakarta, 24 September 2020	Infobank
		Kompetensi Asesor Manajemen Risiko Competence of Risk Management Assessors	Jakarta, 22 November 2020 Jakarta, 22 November 2020	LSPKS
		Sertifikasi Treasury Level Advance Treasury Level Advance Certification	Jakarta, 28 Desember 2020 Jakarta, 28 December 2020	IIGMA



Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Competency Development for Corporate Secretary

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Competency Development Materials/Training	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Place and Time of Implementation	Penyelenggara Organizer
Bambang Sutrisno	Pimpinan Divisi Division Head	<i>Public Relation dimasa Pandemi Covid-19</i> Public Relations during the Covid-19 Pandemic	Jakarta, 9 Juni 2020 Jakarta, 9 June 2020	LSPR
		Pelatihan Kompetensi Asesor Tahun 2020 (Pembekalan Kompetensi Asesor) 2020 Assessor Competency Training (Assessors Competency Training Provision)	Jakarta, 6,8,21,22 November 2020 Jakarta, 6,8,21,22 November 2020	BNSP
		Certified Corporate Coach Program ICF ACSTH ACSTH ICF Certified Corporate Coach Program	Jakarta, 13,14,15,20,21,28,29 November & 5,6 Desember 2020 Jakarta, 13,14,15,20,21,28,29 November & 5,6 December 2020	LOOP



MANAJEMEN RISIKO [GRI 102-11] [E.3]

RISK MANAGEMENT [GRI 102-11] [E.3]

Dalam menjalankan usaha, BNI Syariah menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan lain-lain. Pada tahun 2020, selain berbagai risiko konvensional yang lazim dihadapi industri perbankan, Perseroan menghadapi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu risiko akibat pandemi Covid-19. Pandemi telah menyebabkan semua sektor terdampak, bahkan menyebabkan resesi bagi perekonomian di Indonesia. Bagi BNI Syariah, pandemi berpengaruh pada kinerja selama tahun pelaporan sehingga Perseroan mengambil kebijakan untuk merevisi sejumlah target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank 2020.

Untuk meminimalkan dampak agar tidak berkepanjangan, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif. Penerapan ini bertujuan agar Perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank. Guna memaksimalkan fungsi manajemen risiko sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan, maka BNI Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Implementasi manajemen risiko di BNI Syariah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan oleh regulator, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia. Secara umum penerapan Manajemen Risiko mengacu pada implementasi 4 pilar Manajemen Risiko sesuai yang diamanatkan oleh POJK tersebut. Selain itu, juga merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. KP/059/DIR/R, tanggal 16 November 2016.

Tujuan implementasi manajemen risiko adalah untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank, menciptakan keunggulan kompetitif, memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan, meningkatkan kinerja melalui pengelolaan risiko yang andal, mengantisipasi dan meminimalkan kerugian finansial maupun non finansial yang akan dialami, memenuhi persyaratan minimum regulator, termasuk persyaratan kebutuhan modal minimum bank, dan meningkatkan kredibilitas dan reputasi bank.

Dengan implementasi manajemen risiko, diharapkan Bank dapat memberikan pelayanan yang baik, dapat menutup biaya bagi hasil dan biaya operasional sehingga dapat memberikan hasil. Di samping hal tersebut Bank harus dapat melakukan fungsi intermediasi keuangan dengan baik dalam kondisi perekonomian yang terjadi.

In running a business, BNI Syariah faces various risks, such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and others. In 2020, apart from the various conventional risks commonly faced by the banking industry, the Company is facing an unprecedented risk, namely the risk due to the Covid-19 pandemic. The pandemic has affected all sectors, even causing a recession to the economy in Indonesia. For BNI Syariah, the pandemic affected performance during the reporting year so that the Company took a policy to revise a number of targets set in the 2020 Bank Business Plan.

To minimize the impact so that it is not prolonged, it is necessary to implement effective risk management. This implementation aims to ensure that the company is still able to maximize added value for shareholders through comprehensive capital management, ensuring sustainable profitability and business growth and anticipating potential losses from bank operational activities. In order to maximize the risk management function as part of company management, BNI Syariah implements an integrated risk management pattern, starting with identifying, measuring, monitoring and controlling risk exposure across all organizational lines.

The implementation of risk management in BNI Syariah refers to the Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated 23 December 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as other implementing regulations issued by regulators, both the Financial Services Authority (FSA) and Bank Indonesia. In general, the application of Risk Management refers to the implementation of the 4 pillars of Risk Management as mandated by the POJK. In addition, it also refers to the Decree of the Board of Directors No. KP/059/DIR/R, dated 16 November 2016.

The objectives of risk management implementation are to maintain and improve the soundness level of the bank, create a competitive advantage, maintain sustainable growth, improve performance through reliable risk management, anticipate and minimize financial and non-financial losses that will be experienced, meet the minimum regulatory requirements, including requirements. minimum capital of the bank, and increase the credibility and reputation of the bank.

With the implementation of risk management, it is hoped that the Bank will be able to provide good service, be able to cover profit sharing and operational costs so that it can produce results. In addition to this, Banks must be able to perform the financial intermediation function properly in the current economic conditions.



Untuk memastikan manajemen risiko berjalan sesuai dengan baik, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif Direksi antara lain dilakukan dengan penyusunan Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko, serta penetapan dan persetujuan Limit Risiko secara keseluruhan. Direksi juga membentuk organisasi untuk pelaksanaan Manajemen Risiko di seluruh unit. Pengawasan dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi) dan Rapat Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) atau melalui laporan sirkuler.

Adapun pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, memastikan bahwa penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan regulator, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. Sementara itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan persetujuan terhadap produk dan aktivitas yang dilakukan oleh BNI Syariah.

Pada tahun 2020, BNI Syariah telah memetakan dan menilai risiko yang dihadapi, serta melakukan mitigasi risiko. Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 10 jenis risiko yang dikelola bank. Penilaian Profil Risiko menjadi sesuatu hal yang penting, mengingat penilaian Profil Risiko merupakan salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB RBBR) dan berpengaruh terhadap besarnya penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Semakin baik penilaian Profil Risiko, maka semakin baik pula Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko sehingga modal minimum yang harus disediakan oleh BNI Syariah relatif lebih kecil.

Selama tahun pelaporan, BNI Syariah telah melakukan penilaian Profil Risiko secara triwulan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BNI Syariah menghitung dan melaporkan 10 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Adapun hasil penilaian profil risiko BNI Syariah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

To ensure risk management runs well, the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board carry out active supervision. The Board of Directors' active supervision is carried out by, among others, the formulation of General Risk Management Policies, Risk Management Policies and Strategies, as well as the establishment and approval of overall Risk Limits. The Board of Directors also forms an organization for the implementation of Risk Management in all units. Supervision is carried out through the Board of Directors Meeting forum (Radisi) and Policy and Risk Committee (KKR) Meeting or through circular reports.

The active supervision of the Board of Commissioners is carried out, among others, by approving the General Risk Management Policy, evaluating Risk Management Policies, evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management Policies, ensuring that the provision of funds by the Bank to related parties is in accordance with regulatory provisions, and monitoring and evaluating the implementation. the duties of the Risk Monitoring Committee. Meanwhile, supervision of the Sharia Supervisory Board is carried out with approval of the General Risk Management Policy and approval of products and activities carried out by BNI Syariah.

In 2020, BNI Syariah has mapped and assessed the risks faced, as well as carried out risk mitigation. Risk profile assessment is an assessment of the Inherent Risk and Quality of Risk Management Implementation in the Bank's operational activities for 10 types of risk managed by the bank. Risk Profile Assessment is important, considering that Risk Profile assessment is one of the risk-based bank soundness rating (TKB RBBR) factors and affects the amount of minimum capital provision according to the risk profile. The better the Risk Profile assessment, the better the Risk Based Bank Soundness Level so that the minimum capital that must be provided by BNI Syariah is relatively smaller.

During the reporting year, BNI Syariah conducted a quarterly Risk Profile assessment which was submitted to the Financial Services Authority (FSA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and to the Board of Commissioners. Based on Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.03/2014 dated 11 June 2014 concerning the Rating of the Soundness of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, BNI Syariah calculates and reports 10 types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, reputation risk, compliance risk, rate of return risk and investment risk. The results of the BNI Syariah risk profile assessment during 2020 are as follows:



Profil Risiko Risk Profile	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Quality Rating of Risk Management Implementation	Peringkat Risiko Komposit Composite Risk Rating
Risiko Kredit Credit Risk	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Pasar Market Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low	Satisfactory	Low
Risiko Operasional Operational Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Hukum Legal Risk	Low	Satisfactory	Low
Risiko Stratejik Strategic Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Reputasi Reputation Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Imbal Hasil Rate of Return Risk	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Investasi Investment Risk	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Peringkat Komposit Composite Rating	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate



KODE ETIK DAN INTEGRITAS [GRI 102-16]

CODE OF ETHICS AND INTEGRITY [GRI 102-16]

BNI Syariah meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak akan optimal jika tidak ditopang oleh standar perilaku dan etika yang baik dari seluruh stakeholder, khususnya insan BNI Syariah. Untuk mendukung tercapainya misi BNI Syariah, antara lain, menjadi tata kelola perusahaan yang amanah, maka Perseroan telah menyusun Kebijakan Kode Etik BNI Syariah. Kode Etik ini telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. KP/054/DIR/R tertanggal 8 Oktober 2018.

Kebijakan Kode Etik BNI Syariah menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan BNI Syariah dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis agar menjadi bagian dari budaya Perseroan guna mencapai Visi dan Misi BNI Syariah.

Pelaksanaan Kode Etik sebagai pedoman berperilaku secara profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan para pelanggan, rekanan, maupun dengan rekan sekerja menjadi tanggung jawab seluruh insan BNI Syariah.

Sosialisasi Kode Etik

Untuk menjangkau semua insan BNI Syariah, maka Kebijakan Kode Etik BNI Syariah telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai. Pada tahun 2020, sosialisasi antara lain dilakukan oleh Divisi Kepatuhan (CMD) melalui Sheco (*Sharia Email Correspondence*), yaitu sistem suratmenyurat secara digital yang dilakukan di seluruh Kantor Cabang dan Divisi BNI Syariah.

Implementasi dan Penegakan Kode Etik

Seluruh insan BNI Syariah berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Kode Etik BNI Syariah dalam operasional keseharian. Komitmen juga diwujudkan melalui kesiapan untuk melaporkan kepada atasan jika ada dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik. Dugaan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan BNI Syariah. Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama tahun 2020, pengaduan atas pelanggaran kode etik terdokumentasi secara terintegrasi pada mekanisme WBS.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik BNI Syariah dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen serta ketentuan, dilakukan antara lain dengan:

BNI Syariah believes that the implementation of Good Corporate Governance will not be optimal if it is not supported by good standards of behavior and ethics from all stakeholders, especially BNI Syariah personnel. To support the achievement of BNI Syariah's mission, among others, to become trustworthy corporate governance, the Company has developed a BNI Syariah Code of Conduct Policy. This Code of Ethics has been established through the Decree of the Board of Directors No. KP/054/DIR/R dated 8 October 2018.

The BNI Syariah Code of Ethics policy becomes a reference for behavior for the Board of Commissioners, Directors and all BNI Syariah personnel in implementing business values and ethics so that they become part of the Company's culture to achieve the Vision and Mission of BNI Syariah.

The implementation of the Code of Ethics as a guideline for behaving in a professional, responsible, fair, proper and trustworthy manner in conducting business relationships with customers, partners, and colleagues is the responsibility of all BNI Syariah personnel.

Socialization of Code of Ethics

To reach all BNI Syariah personnel, the BNI Syariah Code of Ethics Policy has been communicated and socialized to the Board of Commissioners and its supporting organs, Directors and officials one level below the Board of Directors and all employees. In 2020, socialization was carried out among others by the Compliance Division (CMD) through Sheco (*Sharia Email Correspondence*), which is a digital correspondence system carried out in all BNI Syariah Branch Offices and Divisions.

Implementation and Enforcement of the Code of Ethics

All BNI Syariah personnel are committed to implementing the BNI Syariah Code of Ethics Policy in their daily operations. Commitment is also manifested through readiness to report to superiors if there is an alleged violation of the implementation of the code of ethics. The alleged violation was carried out through the whistleblowing system (WBS) mechanism provided by BNI Syariah. All reports must be accompanied by accurate data and/or evidence so that violations can be further processed. Any violation of the code of ethics will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. During 2020, complaints for violations of the code of conduct are documented in an integrated manner in the WBS mechanism.

Efforts to implement and enforce the BNI Syariah code of ethics are carried out with full awareness continuously in the form of attitudes, actions, commitments and provisions, carried out, among others:



1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik.

BNI Syariah untuk menerapkan Kode Etik yang efektif, jajaran Bank diharuskan membaca, dan memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Surat Tuntunan dan Perilaku Insan BNI Syariah", kode etik dan budaya Perusahaan.

2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai BNI Syariah.

Komitmen manajemen serta seluruh pegawai BNI Syariah untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya. Komitmen dipublikasikan melalui website Perusahaan.

3. Annual Disclosure Benturan Kepentingan.

Setiap Jajaran Bank diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan, hal ini sejalan dengan disusunnya kebijakan turunan Kode Etik BNI Syariah berupa Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan BNI Syariah.

4. Pakta Integritas.

Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra BNI Syariah yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu terdapat penandatanganan Pakta Integritas Tahunan juga dilakukan oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Pejabat Eksekutif BNI Syariah serta seluruh pegawai BNI Syariah dalam rangka implementasi pengendalian Gratifikasi.

5. Program Awareness.

Untuk pegawai baru BNI Syariah akan diadakan program induksi Kode Etik BNI Syariah melalui program jump start pendidikan BNI Syariah serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja BNI Syariah terkait kode etik antara lain strategi anti *fraud* BNI Syariah, budaya Kepatuhan, serta budaya layanan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

BNI Syariah mengatur tentang tingkatan sanksi yang diterima oleh pegawai apabila terdapat pegawai yang melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran dalam menjalankan kegiatan usahanya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pengenaan sanksi administratif pada dasarnya merupakan sarana perusahaan dalam menegakkan tata tertib, menjaga integritas dan senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, sanksi administratif merupakan salah satu sarana yang digunakan perusahaan dalam memberikan punishment dan pembinaan terhadap pegawai yang melanggar segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan.

Jenis Sanksi

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran Kode Etik adalah sebagai berikut.

- Pengenaan sanksi administratif atas perbuatan pelanggaran Kategori Ringan:
 - Teguran Lisan;
 - Teguran Tertulis;

1. Code of Conduct.

Compliance Statement. BNI Syariah to implement an effective Code of Ethics, Bank employees are required to read and understand well and are required to sign the "Guidance and Behavior of BNI Syariah Individuals", the code of ethics and the Company's culture.

2. Commitment of Management and All BNI Syariah Employees.

The commitment of the management and all BNI Syariah employees not to receive money and/or items of gratuities and/or gifts related to their obligations or duties. Commitments are published on the Company's website.

3. Annual Disclosure Conflicts of Interest.

Each employee of the Bank is required to make an annual disclosure related to conflicts of interest every year, and each work unit is required to submit a transaction/decision report containing conflict of interest every quarter, this is in line with the formulation of a policy derived from the BNI Syariah Code of Ethics in the form of Guidelines for Handling Conflict of Interest BNI Syariah.

4. Integrity Pact.

The Integrity Pact is signed by officials holding the authority and all BNI Syariah partners/partners involved in the process of granting credit, procuring goods and services, and accrediting partners. In addition, the Board of Commissioners, Board of Directors, BNI Syariah Executive Officers and all BNI Syariah employees also signed the Annual Integrity Pact in the context of implementing Gratification control.

5. Awareness Program.

For new employees of BNI Syariah, a BNI Syariah Code of Conduct induction program will be held through the BNI Syariah education jump start program as well as continuous and consistent policy dissemination. In addition, socialization was also carried out to all BNI Syariah work units regarding the code of ethics, including BNI Syariah anti fraud strategy, compliance culture, and service culture.

Sanctions for Code of Ethics Violations

BNI Syariah regulates the level of sanctions received by employees if there are employees who commit fraud and/or violations in carrying out their business activities, in accordance with their respective duties and responsibilities. The imposition of administrative sanctions is basically a company means in upholding order, maintaining integrity and continuing to carry out its business activities by upholding the principles of *Good Corporate Governance* (GCG). In addition, administrative sanctions are one of the means used by companies in providing punishment and guidance for employees who violate all regulations imposed by the company.

Types of Sanctions

Types of sanctions for each violation of the Code of Ethics are as follows.

- Imposition of administrative sanctions for minor category violations:
 - Oral Rebuke;
 - Written Rebuke;



- c. Pernyataan Tidak Puas.
 - 2. Sanksi Kategori Berat
 - a. Surat Peringatan Pembinaan (SPP)/SP1;
 - b. Surat Peringatan Teguran keras (SPTK)/SP2;
 - c. Surat Peringatan Terakhir (SPT)/SP3;
 - d. Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
 - 3. Sanksi Finansial

Sanksi finansial yaitu mengganti kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- c. Dissatisfaction Statement;
- 2. Heavy Category Sanctions
 - a. First Reprimand Letter (SPP)/SP1;
 - b. Second Reprimand Letter (SPTK)/SP2;
 - c. Final Reprimand Letter (SPT)/SP3;
 - d. Termination of employment/layoffs.
 - 3. Financial Sanctions

Financial sanctions are compensation for financial losses that arise as a result of disciplinary breaches.

Walaupun sosialisasi Kode Etik telah dilakukan, namun masih tercatat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BNI Syariah selama tahun 2020. Jumlah pelanggaran pada tahun pelaporan tercatat sebanyak 4 (empat) kasus pelanggaran. Atas pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Although the socialization of the Code of Ethics has been carried out, there are still recorded violations committed by BNI Syariah employees during 2020. The number of violations in the reporting year was recorded as many as 4 (four) cases violations. These violations have been followed up and given sanctions in accordance with applicable regulations.

Membangun Integritas Melalui “Hasanah Titik!”

Building Integrity Through “Hasanah Titik!”

“Hasanah Titik!” adalah interpretasi nilai-nilai perusahaan yang diangkat menjadi *corporate campaign* (kampanye perusahaan) BNI Syariah sejak tahun 2014. “Hasanah Titik!” sejak awal dimulai tanggal 28 Februari 2014 terus konsisten dijalankan dan ke depan akan menjadi *brand culture* BNI Syariah. Kata “hasanah” dipilih karena memiliki makna sebuah kebaikan. Kata “hasanah” sudah ada dalam doa sehari-hari kaum muslim yang bermakna “segala kebaikan.” Dengan demikian, kata “hasanah” boleh diartikan pula sebagai karunia atau rezeki. Ditambah lagi, kata “hasanah” sudah digunakan di semua produk BNI Syariah.

Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan dan mengajak masyarakat untuk menjunjung nilai-nilai kebaikan atau hasanah. Dengan kampanye “Hasanah Titik!” diharapkan masyarakat dapat selalu berbuat kebaikan. “Hasanah Titik!” berarti hasanah itu mutlak. Berbuat kebaikan dapat dilakukan dengan hal-hal kecil di sekitar kita, apapun yang membawa dampak positif. Selain itu, dengan kampanye “Hasanah” diharapkan masyarakat sadar bahwa perbankan syariah dapat memberikan kebaikan kepada semua umat (*rahmatan lil 'alamin*) secara universal.

“Hasanah Titik!” tidak hanya berdampak pada layanan BNI Syariah, tetapi akan berdampak pula pada seluruh elemen yang terdapat di BNI Syariah. Dampak yang dimaksud adalah dampak positif tanpa harus menghilangkan identitas BNI Syariah sebelumnya, justru sebaliknya memperkuat *image* BNI Syariah agar semakin baik serta terpercaya di hadapan masyarakat luas (*brand awareness*). Pada akhirnya, masyarakat mengerti bahwa hasanah adalah BNI Syariah dan BNI Syariah adalah hasanah (*brand equity*).

“Hasanah Titik!” is interpretation of the values of the company that was named a corporate campaign of BNI Syariah since 2014. “Hasanah Titik!” Since its inception on 28 February 2014, has been consistently implemented and in the future it will become a BNI Syariah brand culture. The word “hasanah” was chosen because it means a kind of goodness. The word “hasanah” already exists in the daily prayers of Muslims which means “all goodness.” Thus, the word “hasanah” may also be interpreted as a gift or sustenance. In addition, the word “hasanah” has been used in all BNI Syariah products.

The main objective of this campaign is to improve and invite people to uphold the values of goodness or hasanah. With the “Hasanah Titik!” Campaign it is hoped that the community can always do good. In “Hasanah Titik!” hasanah, meaning absolute. Doing kindness can be done with little things around us, whatever has a positive impact. In addition, with the “Hasanah” campaign, it is hoped that the public will realize that Sharia banking can provide universal goodness to all people (*rahmatan lil 'alamin*).

“Hasanah Titik!” not only has an impact on BNI Syariah services, but will also have an impact on all elements contained in BNI Syariah. The impact in question is a positive impact without having to remove the former identity of BNI Syariah, on the contrary strengthening the image of BNI Syariah to get even better and more trusted in the eye of the public at large (*brand awareness*). Eventually, people understand that hasanah is BNI Syariah and BNI Syariah is hasanah (*brand equity*).



ANTI GRATIFIKASI

ANTI GRATIFICATION

Gratifikasi dan korupsi merupakan musuh bersama, termasuk bagi insan BNI Syariah. Untuk itu, Perseroan telah menetapkan kebijakan tentang antigratifikasi, sekaligus antikorupsi. Sesuai dengan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. [GRI 103-1]

Sejalan dengan larangan ini, BNI Syariah telah mengatur antigratifikasi dalam Kebijakan Kode Etik BNI Syariah, yaitu pada klausul Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cendera mata (*Risyawah*). Sebagai salah satu upaya pencegahan gratifikasi, BNI Syariah menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya (hal ini khususnya dilakukan antara lain pada saat menjelang Milad BNI Syariah atau pada hari raya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha). [GRI 103-2]

Secara tegas, pengaturan terkait gratifikasi di BNI Syariah tertuang dalam Kebijakan Kode Etik BNI Syariah serta Pedoman Benturan Kepentingan yang disosialisasikan melalui *Electronic Corporate Guidelines* (ECG). Dalam kebijakan anti gratifikasi di BNI Syariah secara tegas diatur bahwa pegawai: [GRI 103-3]

1. Dilarang menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Dilarang memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar yang bersangkutan melakukan transaksi dengan BNI Syariah;
4. Dilarang memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah di luar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah, kecuali:
 - a. Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi mencantumkan logo BNI Syariah, antara lain agenda, kalender maupun trofi;
 - b. Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar mengacu sesuai dengan ketentuan internal.

Gratification and corruption are common enemies, including for BNI Syariah personnel. To that end, the Company has established a policy on anti-gratification, as well as anti-corruption. In accordance with the explanation of Article 12B of the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 Regarding the Eradication of Corruption, the meaning of gratification in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates (*discounts*), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tour trips, free medical treatment, and other facilities. These gratuities are either received domestically or abroad and are made with or without electronic means. [GRI 103-1]

In line with this prohibition, BNI Syariah has regulated anti-gratification in the BNI Syariah Code of Ethics, namely the clause on the Prohibition of Giving, Receiving Gifts or Souvenirs (*Risyawah*). As one of the efforts to prevent gratification, BNI Syariah implements a culture of not accepting gifts or rewards from customers, debtors, vendors, partners, work partners and other third parties (this is especially done, among others, just before the BNI Syariah Milad or on holidays, such as Eid al-Fitr and Eid al-Adha). [GRI 103-2]

Firmly, regulations related to gratuities in BNI Syariah are contained in the BNI Syariah Code of Conduct Policy and Conflict of Interest Guidelines which are socialized through the Electronic Corporate Guidelines (ECG). In the anti-gratification policy in BNI Syariah it is expressly regulated that employees: [GRI 103-3]

1. It is prohibited to receive compensation directly or indirectly in any form from any party related to their duties and responsibilities;
2. It is prohibited to make illegal levies in any form in carrying out one's duties for the benefit of personal, group or other parties;
3. It is prohibited to give, promise or offer directly or indirectly gifts in any form to civil servants or state officials personally with the aim of making transactions with BNI Syariah;
4. It is prohibited to give gifts, banquets or other facilities (for example tickets, lodging and so on) to work partners, colleagues, and customers outside the policies set by BNI Syariah, except:
 - a. Receiving or giving promotional items includes the BNI logo Sharia, including agenda, calendar and trophy;
 - b. Receiving meals and/or entertainment from work partners and customers if the event is related to the BNI Syariah business and is attended by business partners and customers at a reasonable cost according to internal regulations.



Untuk mendukung kebijakan anti gratifikasi di BNI Syariah, maka sosialisasi internal budaya antigratifikasi terus dilakukan melalui e-mail blast, *Sharia E-mail Correspondence (SHECO)*, newsletter, serta pembagian stiker anti gratifikasi kepada seluruh insan BNI Syariah. Sosialisasi eksternal dilakukan melalui surat pemberitahuan tertulis langsung kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan BNI Syariah. [GRI 103-3]

Pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dapat melaporkan melalui:

Website	: www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id
E-mail	: clean@bnisyariah.co.id
Telepon/SMS	: 085-10044-4600
Surat	: Box BSC PT Bank BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion I Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 12950

Komitmen insan BNI Syariah terhadap sikap dan kebijakan antigratifikasi, sekaligus antikorupsi, membawa hasil dengan tidak adanya insiden korupsi sehingga tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh Perseroan. [GRI 205-3]

To support the anti-gratification policy in BNI Syariah, internal socialization of anti-gratification culture continues through e-mail blasts, *Sharia E-mail Correspondence (SHECO)*, newsletters, and distribution of anti-gratification stickers to all BNI Syariah personnel. External socialization is carried out through direct written notification to every customer, debtor, vendor, partner, work partner and other third party who has a business relationship with BNI Syariah. [GRI 103-3]

Parties who are aware of a violation of the regulated prohibitions can report it through:

Website	: www.clean.bnisyariah.co.id or www.bnisyariah.co.id
E-mail	: clean@bnisyariah.co.id
Phone/SMS	: 085-10044-4600
Letter	: Box BSC PT Bank BNI Syariah Tempo Pavilion I Building, 4th Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 South Jakarta 12950

The commitment of BNI Syariah personnel to the attitude and policies of anti-gratification, as well as anti-corruption, has resulted in no incidents of corruption so that no firm action is taken by the Company. [GRI 205-3]



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

VIOLATION REPORTING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) merupakan pelaksanaan tata nilai dan budaya kerja BNI Syariah serta penerapan strategi anti *fraud* dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI Syariah dan seluruh *stakeholder* untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

Implementasi WBS di BNI Syariah berlangsung sejak tahun 2013. Dalam hal ini, manajemen menerapkan 3 (tiga) asas yaitu asas kerahasiaan, asas tidak diskriminatif, dan asas perlindungan. Dengan 3 (tiga) asas tersebut, Manajemen berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor, seperti pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan.

Pada perkembangannya, kebijakan Whistleblowing System (WBS) BNI Syariah diatur dalam Kebijakan Strategi Anti Fraud No. KP/033/DIR/R tanggal 30 Maret 2020 dan Petunjuk Pelaksanaan Whistleblowing System No. PP/S03/005-00/2017 tanggal 24 November 2017, yang mencakup landasan hukum, asas-asas, pengertian, pengelolaan Whistleblowing System, sarana penyampaian laporan, pelaporan tindak pelanggaran, penanganan laporan, perlindungan pelapor, dan lain-lain.

1. Penyampaian laporan pelanggaran Sarana yang disediakan untuk menyampaikan laporan melalui WBS BNI Syariah meliputi:
 - a. Website : www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id
 - b. E-mail : clean@bnisyariah.co.id
 - c. Telepon/SMS : 085-10044-4600
 - d. Surat : Box BSC PT Bank BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion I Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 1295
2. Perlindungan Pelapor

Sebagai bentuk dukungan agar muncul keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran WBS, BNI Syariah berkomitmen memberikan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* (*whistleblower*), serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan. Insan BNI Syariah yang melaporkan tindakan pelanggaran dengan itikad baik dilindungi dan dirahasiakan identitasnya oleh BNI Syariah.

- Bentuk perlindungan kepada pelapor sebagai berikut:
- a. Perlindungan hanya dapat diberikan kepada pelapor dengan kategori *Partial anonymity* dan *full disclosure*;
 - b. Pelapor dapat meminta perlindungan dengan menyampaikan melalui surat/e-mail;

The Whistleblowing System (WBS) is the implementation of BNI Syariah values and work culture as well as the implementation of anti- *fraud* strategies in the form of active participation of BNI Syariah personnel and all stakeholders to report violations that occur within the BNI Syariah environment in the context of implementing good corporate governance (GCG). implemented voluntarily through a special and confidential reporting mechanism.

The implementation of WBS at BNI Syariah has been going on since 2013. In this case, management applies 3 (three) principles, namely the principle of confidentiality, the principle of non-discrimination, and the principle of protection. With these 3 (three) principles, management is committed to maintaining the confidentiality of the reporter, not discriminating against the reporter and providing protection to the reporter, such as work, physical, remuneration and work facilities.

In its development, the BNI Syariah Whistleblowing System (WBS) policy is regulated in the Anti-Fraud Strategy Policy No. KP/033/DIR/R dated 30 March 2020 and the Whistleblowing System Implementation Guidelines No. PP/S03/005-00/2017 dated 24 November 2017, which includes legal basis, principles, understanding, management of the Whistleblowing System, means of submitting reports, reporting of violations, handling reports, protection of whistleblowers, and others.

1. Submission of violation reports The means provided to deliver reports through WBS BNI Syariah include:
 - a. Website : <https://clean.bnisyariah.co.id> or www.bnisyariah.co.id/whistleblowing
 - b. E-mail : clean@bnisyariah.co.id
 - c. Phone/SMS : 085-10044-4600
 - d. Letter : Box BSC PT Bank BNI Syariah Building Pavilion I, 4th Floor Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 South Jakarta 12950
2. Reporting Protection

As a form of support for the courage to report suspected WBS violations, BNI Syariah is committed to providing protection to every whistleblower, as well as ensuring the confidentiality of the whistleblower's identity and the report submitted. BNI Syariah personnel who report violations in good faith are protected and their identity are kept confidential by BNI Syariah.

- The forms of protection for whistleblowers are as follows:
- a. Protection can only be given to whistleblowers with the category of partial anonymity and full disclosure;
 - b. The whistleblower can request protection by submitting it by letter/e-mail;



- c. Bentuk perlindungan terhadap Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI Syariah;
- d. Dengan pertimbangan tertentu, BNI Syariah juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor;
- e. Pemberian perlindungan kepada Pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa Pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya;
- f. Perlindungan tidak akan diberikan atau dihentikan pemberiannya apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor kepada BNI Syariah ternyata palsu/ fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan WBS.

3. Penanganan Pengaduan

- a. Untuk menjaga kerahasiaan, maka identitas Pelapor beserta laporan yang disampaikannya hanya diketahui oleh Tim WBS BNI Syariah;
- b. Untuk memperlancar proses tindak lanjut atas Tindak Pelanggaran yang dilaporkannya, Tim WBS BNI Syariah dapat meminta tambahan informasi kepada Pelapor yang mengungkapkan identitasnya secara *full disclosure* pada saat *pre screening*;
- c. Kepada Pelapor diberikan hak untuk memantau perkembangan (status) tindak lanjut tindakan pelanggaran yang dilaporkannya melalui website WBS dengan cara *login* ke menu status dengan menggunakan tiket (PIN) yang telah diberikan.

4. Pihak yang mengelola pengaduan

Setiap laporan yang masuk melalui sarana-sarana pelaporan dikelola oleh pengelola WBS (dhi. Unit Integrasi Risiko & Anti Fraud, Divisi Manajemen Risiko). Dalam melaksanakan fungsinya, pengelola WBS mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS.

5. Laporan WBS

Selama tahun 2020, terdapat 18 laporan WBS yang diterima, dengan laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 8 laporan. Laporan yang masuk disampaikan melalui:

- a. Melalui website : 11 laporan
- b. Melalui e-mail : 7 laporan
- c. Melalui Telepon/SMS: -
- d. Melalui surat : -

Berdasarkan jenis laporannya, ada 4 (empat) kategori laporan yang mencakup:

No.	Jenis Laporan Type of Report	Jumlah Total	
		Laporan Report	Sudah Ditindaklanjuti Has been Followed-Up
1	Pelanggaran Peraturan/Hukum Regulation/Law Violations	3	3
2	Kelakuan tidak etis Unethical behavior	2	2

- c. The form of protection for whistleblowers is adjusted to the form of threats/countermeasures received. Protection is provided with due observance of the principles of confidentiality and related provisions applicable to BNI Syariah;
- d. With certain considerations, BNI Syariah can also provide protection to Reporting families;
- e. Protection for the Whistleblower can be rejected or terminated if there is evidence that the whistleblowers has not fulfilled his/her obligation to maintain the confidentiality of his/her identity and report;
- f. Protection will not be given or the provision will be stopped if it is proven in the future that the violation report submitted by the whistleblower to BNI Syariah is false/slander or has a purpose that deviates from the purpose of the WBS.

3. Handling complaints

- a. To maintain confidentiality, the identity of the whistleblower and the report he/she submits is known only to the BNI Syariah WBS Team;
- b. To expedite the follow-up process for the reported violations, the BNI Syariah WBS Team may request additional information from the Reporting Party who discloses his/her identity in full disclosure during the pre-screening;
- c. Whistleblowers are given the right to monitor the progress (status) of follow-up actions of violations that are reported through the WBS website by logging into the status menu using the ticket (PIN) that has been given.

4. The party who manages the complaint

Every report that is submitted through reporting facilities is managed by the WBS manager (dhi. Risk Integration & Anti-Fraud Unit, Risk Management Division). In carrying out its functions, the WBS manager has sufficient competence and integrity to carry out the daily activities of the WBS.

5. WBS report

During 2020, 18 WBS reports were received, with 8 reports being followed up. Incoming reports are submitted via:

- a. Via website: 11 reports
- b. Via e-mail: 7 reports
- c. Via phone/SMS: -
- d. Via mail: -

Based on the type of report, there are 4 (four) report categories which include:



3	Pelanggaran kepatuhan syariah Sharia compliance violation	2	2
4	Kecurangan Fraud	1	1
Total		8	8

*) Keluhan nasabah, komplain pegawai, dan lain-lain

*) Customer complaints, employee complaints, and others..

Sementara itu, 10 laporan WBS yang tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan oleh sejumlah alasan. Antara lain, tidak masuk dalam lingkup pelaporan melalui WBS, atau tidak disertai data dan bukti yang cukup untuk diverifikasi kebenaran laporan maupun pelaporinya.

Untuk menegakkan praktik berusaha yang bersih, BNI Syariah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan dugaan tindak pelanggaran melalui WBS. Terkait dengan hal itu, Perseroan telah melakukan langkah-langkah optimalisasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi WBS melalui *in-class training* kepada pegawai baru dan pegawai eksisting;
2. Memasang poster WBS di setiap kantor cabang dan kantor pusat;
3. Mensosialisasikan WBS antara lain melalui media sosial BNI Syariah antara lain facebook (PT. Bank BNI Syariah) dan twitter (@BNISyariah);
4. Mensosialisasikan WBS melalui program *Monday reminder* yang dikirimkan setiap Senin melalui *email* ke seluruh pegawai, *Anti Fraud Sharing Session* yang dikirimkan ke setiap cabang, dan *Alert System Anti Fraud* yang dikirimkan ke setiap cabang mengenai modus kejahatan terbaru/yang sedang marak terjadi.

Meanwhile, 10 WBS reports that could not be followed up were caused by a number of reasons. Among other things, it is not included in the scope of reporting through the WBS, or is not accompanied by sufficient data and evidence to verify the accuracy of the report or the reporter.

To enforce clean business practices, BNI Syariah will continue to strive to increase understanding and concern for employees to report suspected violations through the WBS. In this regard, the Company has taken the following optimization steps:

1. Delivering WBS material through in-class training to new employees and existing employees;
2. Put up WBS posters at each branch office and head office;
3. Socializing the WBS, among others, through BNI Syariah social media, including Facebook (PT Bank BNI Syariah) and Twitter (@BNISyariah);
4. Socializing the WBS through the Monday reminder program that is sent every Monday via email to all employees, Anti Fraud Sharing Session sent to each branch, and Anti Fraud Alert System sent to each branch regarding the latest/current crime modes.





 **BNI**
Syariah

Kinerja Ekonomi
Economic Performance
2020



KUKUH DI TENGAH RESESI

SOLID IN THE MIDST OF THE RECESSION

Tinjauan Ekonomi Nasional Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi perekonomian Indonesia. Pandemi virus SARS Cov-2 (Covid-19) telah menyebabkan seluruh sektor perekonomian anjlok, termasuk di sektor perbankan. Di Indonesia, sejak kasus pasien positif penyakit ini diumumkan pada awal Maret, persebaran virus terus meluas, dan belum bisa tertangani hingga akhir tahun 2020. Indonesia dan seluruh negara di muka bumi mestinya bersiap-siap menghadapi skenario terburuk. Apalagi, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 akan berlangsung lama.

Akibat pandemi Covid-19, pada kuartal III tahun 2020, perekonomian Indonesia resmi masuk ke dalam resesi. Hal itu ditandai dengan laju perekonomian pada kuartal III yang tercatat kembali minus, yakni 3,49 persen, setelah sebelumnya sempat terperosok hingga minus 5,32 persen pada kuartal II. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontraksi perekonomian sehingga memicu resesi terjadi karena permintaan maupun penawaran barang dan jasa masih mengalami penurunan. Kondisi perekonomian yang sangat tidak menggembirakan ini berbanding terbalik dengan tahun 2019, saat perekonomian Indonesia masih tumbuh 5,02 persen.

Walau perekonomian mengalami pertumbuhan minus, merujuk IMF, posisi Indonesia menempati posisi kedua terbaik setelah China di antara negara-negara kelompok G-20. Akibat pandemi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen pada tahun 2020, sedangkan China masih tumbuh positif 1,9 persen. Adapun negara-negara yang mengalami pertumbuhan negatif setelah Indonesia adalah Korea Selatan yang diproyeksi minus 1,9 persen dan Rusia minus 4,1 persen.

Data BPS menunjukkan dari 17 sektor usaha, tujuh di antaranya masih tumbuh positif, walau secara tahunan melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, 10 sektor mengalami kontraksi meski tak sedalam kuartal II 2020. Di antara sektor yang mengalami kontraksi adalah jasa keuangan dan asuransi, termasuk di dalamnya perbankan. Masih tumbuh positif sebesar 1,05% pada triwulan kedua tahun 2020, selanjutnya pada triwulan ketiga mengalami kontraksi sebesar 0,95%. Kondisi ini merupakan kali pertama sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh minus sejak lebih dari 20 tahun silam.

Kinerja BNI Syariah

Sebagai bagian dari industri perbankan, BNI Syariah secara konsisten mendukung langkah dan kebijakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dukungan diberikan karena Perseroan meyakini penanganan terbaik akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Apabila sektor-sektor tersebut membaik, maka berbagai korporasi yang ada di Indonesia, termasuk perbankan, akan mampu menjalankan roda bisnis dan mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. [GRI 103-1][F.1]

National Economic Review 2020

Year 2020 is a difficult year for the Indonesian economy. The SARS Cov-2 (Covid-19) virus pandemic has caused all economic sectors to decline, including in the banking sector. In Indonesia, since the cases of positive patients for this disease were announced in early March, the spread of the virus has continued to spread, and cannot be managed until the end of 2020. Indonesia and all countries on earth must be prepared for the worst scenario, especially since the World Health Organization (WHO) has issued a warning that the Covid-19 pandemic will last a long time.

As a result of the Covid-19 pandemic, in the third quarter of 2020, the Indonesian economy officially entered into recession. This was indicated by the economic pace in the third quarter which recorded a negative return, namely 3.49 percent, after previously having fallen to minus 5.32 percent in the second quarter. According to the Central Statistics Agency (BPS), the economic contraction which triggered a recession occurred because the demand for as well as supply of goods and services was still experiencing a decline. This very unsatisfactory economic condition is inversely proportional to 2019, when the Indonesian economy was still growing at 5.02 percent.

Even though the economy is experiencing minus growth, referring to the IMF, Indonesia's position is in the second best position after China among the G-20 group countries. As a result of the pandemic, Indonesia is estimated to experience a contraction of 1.5 percent in 2020, while China will still grow positively by 1.9 percent. The countries which experienced negative growth after Indonesia were South Korea, which was projected at minus 1.9 percent, and Russia at minus 4.1 percent.

BPS data shows that out of 17 business sectors, seven of them are still growing positively, although on an annual basis it is slower than in the same period last year. Meanwhile, 10 sectors experienced decrease, although not as much as the second quarter of 2020. Among the sectors experiencing decrease were financial services and insurance, which includes banking. While it still grew positively by 1.05% in the second quarter of 2020, in the third quarter, it decreased by 0.95%. This is the first time for the financial service and insurance sector to experience negative growth since more than 20 years ago.

BNI Syariah Performance

As part of the banking industry, BNI Syariah has consistently supported government measures and policies in dealing with the Covid-19 pandemic. Support is provided since the Company believes that the best treatment will greatly affect the sustainability of all sectors, including the economic sector. If these sectors improve, then various corporations in Indonesia, including banking, will be able to run the business and achieve the targets that have been previously set. [GRI 103-1][F.1]



Secara khusus, terkait layanan terhadap nasabah, BNI Syariah berupaya memberikan solusi sehingga nasabah mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi melalui inovasi layanan transaksi keuangan dan digital. Langkah konkret yang diambil BNI Syariah adalah menyediakan *Hasanah Ultimate Service* sebagai transformasi layanan yang mampu menyentuh hati nasabah. Konsep layanan ini dikomunikasikan melalui empat aspek, yaitu *people*, *digital process*, *physical*, dan *business*. [GRI 103-2]

Aspek pertama, *people*, para pegawai harus memiliki *hospitality* atau keramah tamahan yang tinggi. Tak hanya itu, pegawai *frontliner* juga dipersiapkan menjadi *financial advisor* sehingga layanan menjadi lebih fleksibel, cepat dan mudah dengan *skill* pegawai yang mumpuni dalam memberikan berbagai solusi bagi nasabah; kedua, aspek *digital process*, yaitu pengembangan kualitas layanan dilakukan melalui proses digital yang merupakan kunci solusi digital sehingga proses transaksi menjadi lebih simpel (*simplicity*) dan disesuaikan dengan *lifestyle* nasabah; ketiga, aspek *physical*, yaitu proses layanan disesuaikan dengan protokoler kesehatan; keempat, aspek *business*, yaitu usaha yang berkelanjutan bagi BNI Syariah secara lebih luas.

Kebijakan lain yang diambil BNI Syariah adalah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan di masa pandemi dan lebih fokus kepada restrukturisasi pembiayaan yang terdampak Covid-19. Untuk itu, berbagai strategi diambil Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan dana dan pembiayaan. Antara lain, fokus ekspansi pada sektor ekonomi yang tahan terhadap kondisi pandemi dan mengoptimalkan ekspansi pada produk baru BNI Syariah. Misalnya, pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang potensinya masih cukup banyak.

Sebagaimana lembaga perbankan yang lain, BNI Syariah juga turut memanfaatkan penyaluran Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah. Untuk keperluan ini, Perseroan telah mengajukan perizinan untuk penyaluran dana PEN tersebut sebesar Rp3 triliun. Strategi lain yang tak kalah penting, BNI Syariah secara kontinyu melakukan sosialisasi Layanan Digital BNI Syariah dalam rangka ekspansi dana ritel, seperti produk Uang Elektronik Hasanahku dan Hasanah Mobile.

Di luar langkah dan kebijakan yang diambil berkaitan dengan pandemi Covid-19 tersebut di atas, BNI Syariah telah merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk mencapai target-target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020. Kebijakan-kebijakan strategis tersebut adalah sebagai berikut: [GRI 103-2]

NO	STRATEGI STRATEGY	REALISASI REALIZATION
1	Selective growth pada masa pandemic Selective growth during a pandemic	Telah dilakukan Stress Test dan selective growth dengan hasil ekspansi pembiayaan Divisi komersial, menengah dan kecil Stress Tests and selective growth have been carried out with the results of the expansion of financing from the commercial, medium and small divisions

In particular, regarding services to customers, BNI Syariah strives to provide solutions thereby customers find it easier to do transactions through innovation in financial and digital transaction services. Concrete steps taken by BNI Syariah is to provide Hasanah Ultimate Service as a service transformation that is able to touch the hearts of customers. The concept of this service is communicated through four aspects, namely people, digital process, physical, and business. [GRI 103-2]

To realize the first aspect, people, employees must have great hospitality. Not only that, frontliners are also prepared to become financial advisors thereby services can be more flexible, fast and easy with the skills of qualified employees in providing various solutions for customers. The digital process aspect is the development of service quality through a digital process which is the key to digital solutions thereby the transaction process becomes simpler (*simplicity*) and is adapted to the customer's lifestyle. The physical aspects refers to the service process which is adjusted to health protocols, and the fourth aspect, business, refers to a more extensive sustainable business for BNI Syariah.

Another policy taken by BNI Syariah is to be more careful in channeling financing during the pandemic and to focus more on restructuring financing affected by Covid-19. For this reason, the Company has taken various strategies to increase funding and financing growth. Among other things, the focus of expansion is on economic sectors which are resistant to pandemic conditions and optimizing expansion of new BNI Syariah products, for example, the housing financing for the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) and the People Business Credit (KUR), which have quite a lot of potential.

Like other banking institutions, BNI Syariah also takes advantage of the distribution of the National Economic Recovery Program (PEN) from the government. For this purpose, the Company has applied for a license to distribute the PEN funds amounting to IDR 3 trillion. Another strategy which is equally important is to continuously disseminates information concerning BNI Syariah Digital Services in the context of expanding retail funds, such as Hasanahku Electronic Money and Hasanah Mobile products.

In additions to the steps and policies taken in connection with the Covid-19 pandemic mentioned above, BNI Syariah has formulated various strategic policies to achieve the targets in the Bank's Business Plan (RBB) 2020. These strategic policies are as follows: (GRI) 103-2]



NO	STRATEGI STRATEGY	REALISASI REALIZATION
2	Sinergi pembiayaan dengan BNI Induk dengan menggarap Supply Chain Financing (SCF) nasabah-nasabah Korporasi BNI Induk Synergy in financing with BNI Parent Entity by working on Supply Chain Financing (SCF) for BNI Parent Corporate customers	Sudah dilakukan, diantaranya pembiayaan kepada vendor/kontraktor BUMN It has been conducted, including financing to SOEs vendors/contractors
3	Melakukan downsizing outstanding pembiayaan untuk mengontrol resiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi saat masa pandemi Downsizing outstanding financing to control the financing risk that might occur during the pandemic	Telah dilakukan, dengan melakukan beberapa pelunasan pembiayaan It has been conducted, by making several financing settlements
4	Mengoptimalkan potensi Fee Based Income (FBI) dengan cara mendorong Trade Finance di BNI Syariah, antara lain mendorong pembiayaan anjak hutang/piutang dari nasabah-nasabah BUMN Optimizing the potential for Fee Based Income (FBI) by encouraging Trade Finance in BNI Syariah, among others, by encouraging factoring/receivables financing from SOEs customers	Sudah dilakukan boosting pembiayaan anjak piutang Kepada kontraktor BUMN Boosting factoring financing to SOEs contractors has been conducted
5	Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pembiayaan serta penyempurnaan dan pengembangan fitur produk-produk eksisting Improvement of financing system policies and procedures as well as enhancement and development of existing product features	Sudah dilakukan penyempurnaan prosedur dan Kebijakan anjak piutang juklak MMQ MMQ factoring procedures and policies have been improved

Selama tahun pelaporan, segenap insan BNI Syariah telah berupaya secara maksimal untuk mengimplementasikan semua kebijakan tersebut di atas, baik kebijakan yang dirumuskan sebelum maupun setelah pandemi Covid-19 terjadi. Upaya tersebut membawa hasil dengan tercapainya semua target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020 hasil revisi, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut: [GRI 103-3][F.2]

Target dan Realisasi Tahun 2018-2020 (dalam miliar Rupiah)

No.	Indikator Indicators	2020		
		Realisasi Realization	Target* Target*	%
		1	2	1:2
1	Aset Assets	55.009	51.320	107,2%
2	Pembiayaan Financing	33.048	32.927	100,4%
3	DPK Third Party Fund	47.974	44.389	108,1%
4	Ekuitas Equity	5.459	5.444	100,3%
5	Laba Bersih Net Profit	505	457	110,6%

*Target RBB Revisi sebagai respons terhadap pandemi Covid-19

*Revised RBB Target in response to the Covid-19 pandemic

During the reporting year, all BNI Syariah personnel have made their best efforts to implement all of the above policies, both policies formulated before and after the Covid-19 pandemic occurred. These efforts led to the achievement of all the target in the Bank Business Plan (RBB) as shown in the following table: [GRI 103-3] [F.2]

Target and Realization for 2018-2020 (in billion Rupiah)



Distribusi Nilai Ekonomi

Dengan pencapaian kinerja tersebut di atas, maka distribusi nilai ekonomi BNI Syariah, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang ditahan, dapat dipetakan. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis Perseroan. Sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan merupakan sejumlah pengeluaran yang didistribusikan sebagai bentuk kontribusi Perseroan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pemangku kepentingan, seperti pembayaran gaji, pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk perwujudan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang diimplementasikan melalui berbagai Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Adapun nilai ekonomi yang ditahan adalah selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan. [GRI 103-3, 201-1]

Distribusi Nilai Ekonomi (dalam jutaan rupiah)

Uraian Description	2020	2019	2018
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated			
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib Revenue from the management of funds by banks as mudharib	4.094.693	4.082.829	3.599.100
Hak bagi hasil milik bank The profit sharing rights of the bank	3.174.874	3.092.332	2.591.259
Pendapatan operasional lainnya Other operating income	176.878	163.071	127.631
Pendapatan non operasional-neto Net non-operating income	(23.771)	(42.532)	(17.543)
Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan Total economic value generated	7.422.674	7.295.700	6.300.447
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan Direct Economic Value Distributed			
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer The rights of third parties to the profit-sharing of temporary syirkah funds	(919.819)	(990.497)	(1.007.841)
Beban Operasional (termasuk gaji dan tunjangan, umum dan administrasi, dan lain-lain) Operating expenses (including salaries and benefits, general and administrative affairs, etc.)	(2.086.857)	(1.820.264)	(1.587.270)
Cadangan kerugian aset produktif Provision for Asset Losses	(552.134)	(592.658)	(563.839)

Economic Value Distribution

With the aforementioned performance achievements, the distribution of BNI Syariah economic value, namely the direct economic value generated, the economic value distributed, and the economic value retained, can be mapped. The resulting direct economic value is the amount of revenue obtained from the results of the Company's business activities. The distributed economic value is a number of expenditures distributed as a form of the Company's contribution in increasing the rate of economic growth and the welfare of stakeholders, such as payment of salaries, taxes, dividends, payments for suppliers, and realization of funds for the community as a form of Social and Environmental responsibility (TJSL), which are implemented through various Corporate Social Responsibility (CSR) Programs. The economic value retained is the difference between the economic value generated minus the distributed economic value. [GRI 103-3, 201-1]

Economic Value Distribution (in million rupiah)



Uraian Description	2020	2019	2018
Beban pajak Tax burden	(183.884)	(196.796)	(134.158)
Zakat Perusahaan dan Pegawai Zakat of the Company and Employees	(25.770)	(25.058)	(20.315)
Jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan Total economic value distributed	(3.768.464)	3.625.273	3.313.423
Nilai Ekonomi yang Dipertahankan Economic value retained	3.654.210	3.670.427	2.987.024

Melalui pencapaian kinerja seperti tersebut di atas, Perseroan secara nyata turut berperan dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Per 31 Desember 2020, Bank BNI Syariah adalah bank umum syariah terbesar kedua di Indonesia berdasarkan aset di Indonesia dengan total aset per Desember 2020 mencapai Rp55,01 triliun. [GRI 103-3]

Kontribusi terhadap Negara

BNI Syariah memiliki peran sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak sebagai kontribusi kepada negara. Kontribusi terbesar Bank sebagai wajib pajak adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Selain itu, BNI Syariah berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pemotong pajak. BNI Syariah selalu tepat waktu dalam pembayaran kewajiban pajak atas PPh Badan, PPh Karyawan, PPN, dan PBB. BNI Syariah juga menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan seperti SPT tahunan maupun bulanan serta dokumen kewajiban pada lembaga regulator dengan tepat waktu. Tabel berikut menyajikan perincian setoran pajak Perseroan selama dua tahun terakhir sebagai salah satu wujud kontribusi terhadap negara:

Through these performance achievements, the Company has performed a significant role in developing the Sharia banking industry in Indonesia. As of December 31, 2020, Bank BNI Syariah is the second largest Sharia commercial bank based on assets in Indonesia with total assets as of December 2020 reaching IDR 55.01 trillion. [GRI 103-3]

Contribution to the State

BNI Syariah performs its role as a taxpayer and as a tax collector as a contribution to the state. The Bank's biggest contribution as a taxpayer is fulfilling Corporate Income Tax obligations. In addition, BNI Syariah performs an active role in deducting each taxable object in carrying out its function as a tax collector. BNI Syariah is always on time in paying tax obligations on Corporate Income Tax, Employee Income Tax, VAT, and Property Tax. BNI Syariah also submits tax obligation documents such as annual and monthly tax returns and documents of obligations to regulatory agencies in a timely manner. The following table provides the detail of the Company's tax payments for the last two years as a form of contribution to the state:

Tahun 2020 Year 2020	Total Disetor (Rp) Total Paid (Rp)
Jenis Pajak Type of Tax	
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	73.840.095.174
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	815.661.316
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	2.505.581.694
PPh Pasal 4 ayat (2) Income Tax Article 4 Paragraph (2)	163.114.458.155
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	140.521.034.000
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	43.768.851.886
PPn 1111 (PK) VAT 1111 (PK)	448.299.868
PPn 1111 (PM) VAT 1111 (PM)	38.563.377.014



Kewajiban Imbalan Pascakerja

BNI Syariah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk dalamnya berkaitan dengan uang pensiun atau imbalan pascakerja. Dengan memiliki uang pensiun, maka karyawan yang sudah selesai menjalankan tugas purnatugas masih memiliki penghasilan yang berkesinambungan. Berkaitan dengan program ini, Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti. [GRI 103-1]

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Sedangkan program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK"). Besarnya iuran program pensiun untuk karyawan tetap yaitu 11,50% atas beban Bank dan 3,50% atas beban karyawan. Selain itu, Perseroan juga memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang penghargaan dan BPJS Ketenagakerjaan. [GRI 103-2]

Pada 31 Desember 2020, BNI Syariah membukukan kewajiban imbalan pascakerja sebesar Rp692,30 miliar, naik Rp177,32 miliar atau 34,43% dibanding tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp514,98 miliar. Adapun penilaian aktuarial atas manfaat pensiun dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Towers Watson Purbajaga dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021 dan 7 Januari 2020. [GRI 103-3, 201-3]

Bersaing secara Sehat

Persaingan merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha, termasuk di industri perbankan. Bagi nasabah, kondisi itu memberikan keuntungan karena mereka bisa memilih bank yang mampu memberikan produk dan layanan terbaik. Pada sisi lain, bagi pelaku usaha di sektor perbankan, persaingan akan membuat mereka terpacu dan berlomba-lomba untuk memberikan produk dan layanan terbaik sesuai dengan harapan nasabah. [GRI 103-1]

Dalam menghadapi persaingan yang kian ketat, sekaligus untuk memenangkan persaingan, BNI Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menentang praktik monopoli dan trust. Perseroan berprinsip bahwa persaingan sehat merupakan salah satu cara untuk mempromosikan efisiensi ekonomi untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan komitmen itu, maka BNI Syariah tidak menenggang adanya tindakan Perusahaan atau karyawan yang dapat menyebabkan adanya kolusi dengan pesaing potensial dengan tujuan untuk membatasi efek kompetisi pasar. Misalnya, mengoordinasikan penawaran, mengalokasikan nasabah, pemasok, dan sebagainya. [GRI 103-2]

Obligations of Post-employment Benefits

BNI Syariah is committed to fulfilling employee rights as regulated in Law No. 13/2003 concerning Manpower, including in relation to pension or post-employment benefits. By having pension fund, employees who have completed their duties (retired) still have sustainable income. In connection with this program, the Company has a defined benefit and defined contribution pension plan. [GRI 103-1]

Defined benefit pension plans are pension plans which determine the amount of pension benefits which employees will receive at retirement, which usually depends on one or more factors, such as age, years of service, and the amount of compensation. Meanwhile, defined contribution pension plans are pension plans in which the Company will pay fixed contributions to a separate entity (pension fund) and have no legal or constructive obligation to pay further contributions. This program is managed by the Financial Institution Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK"). The amount of pension program contributions for permanent employees is 11.50% at the expense of the Bank and 3.50% at the expenses of the employees. In addition, the Company also provides other post-employment benefits, such as award money and BPJS Ketenagakerjaan (Employment Social Security). [GRI 103-2]

As of December 31, 2020, BNI Syariah recorded post-employment benefits of Rp692.30 billion, which is an increase of Rp177.32 billion or 34.43% compared to 2019, which was recorded at Rp514.98 billion. The actuarial assessment of pension benefits is carried out by a registered actuarial consultant, PT Towers Watson Purbajaga using the Projected Unit Credit method as stated in each report on 11 January 2021 and 7 January 2020. [GRI 103-3, 201-3]

Fair Competition

Competition is commonplace in the business world, including in the banking industry. For customers, this condition is beneficial because they can choose a bank that is able to provide the best products and services. On the other hand, for business doers in the banking sector, competition will motivate them to provide the best products and services that fulfill customer expectations. [GRI 103-1]

To face increasingly tight competition, as well as to win the competition, BNI Syariah is committed to continuously improving the quality of products and services, as well as opposing monopolistic and trust practices. The Company has the principle that healthy competition is one way to promote economic efficiency towards sustainable development. In line with this commitment, BNI Syariah does not tolerate actions by the Company or employees which can cause collusion with potential competitors with the aim of limiting the effects of market competition. For example, coordinating offers, allocating customers, suppliers, and so on. [GRI 103-2]



Sebagai korporasi yang mendukung nilai-nilai hasanah, BNI Syariah mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Antara lain, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komitmen insan Perseroan untuk mendukung praktik bersaing secara sehat, antimonopoli dan *trust*, membawa hasil dengan tidak adanya tindakan/langkah-langkah hukum atau sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang berwenang menangani dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat selama tahun 2020. [GRI 103-3, 206-1]

As a corporation which supports Hasanah values, BNI Syariah supports the principles of fair business competition in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Among other things, Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The commitment of the Company's personnel to support the practice of healthy competition, antimonopoly and trust, brings results in the absence of legal action or sanctions from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as the authority appointed to handle allegations of monopolistic practices and or unfair business competition in 2020. [GRI 103-3, 206-1]

Halaman ini sengaja dikosongkan
This Page is Intentionally Left Blank





BNI
Syariah

Kinerja Lingkungan

*Environmental
Performance*

2020



MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

REALIZING SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY



Usaha perbankan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan. Namun demikian, sebagai lembaga jasa keuangan yang menyalurkan kredit, perbankan memiliki peran sentral untuk turut mencegah kerusakan lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh debiturnya. Komitmen itu sejalan dengan spirit dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang di dalamnya mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dalam hal ini, perbankan harus memberikan perhatian serius terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Hal yang sama berlaku bagi bank yang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah. Dengan mencermati AMDAL, diharapkan agar proyek-proyek yang dibiayai perbankan tetap menjaga kelestarian lingkungan. [GRI 103-1]

Keberadaan perbankan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan secara implisit telah pula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 43, ayat (3), huruf c terdapat klausul, "Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup." Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan "sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

The banking business has no direct relationship with the environment. However, as a financial service institution that extends credit, banks have a central role in preventing environmental damage from projects financed by their debtors. That commitment is in line with the essence of the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 on the Amendment of the Law No. 7 of 1992 concerning Banking, which regulates the principle of prudence in lending. In this case, banks must pay serious attention to Environmental Impact Analysis (AMDAL) for large-scale and/or high-risk companies. The same applies to banks that provide credit or financing based on sharia. By observing the AMDAL, it is hoped that projects financed by banks will continue to preserve the environment. [GRI 103-1]

The existence of banks that cares for environmental sustainability implicitly also regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment. In Article 43, paragraph (3), letter c, there is a clause which says, "Development of an environmentally friendly financial institution and capital market system." According to this Law, what is meant by "environmentally friendly financial institution system" is a financial institution system that implements environmental protection and management requirements in financing policies and system practices for bank financial institutions and non-bank financial institutions.



Pentingnya peningkatan peran perbankan terhadap lingkungan diperkuat dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004 lalu. Menurut Bank Indonesia, bank-bank yang membiayai proyek berwawasan lingkungan terbukti memberi keunggulan tersendiri, bahkan dapat meningkatkan daya saing mereka. Sebab itu, Bank Indonesia agar bank-bank terpacu untuk membiayai proyek-proyek yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Ketentuan yang lebih tegas tentang pentingnya perbankan terhadap lingkungan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan peraturan ini, maka perbankan sebagai lembaga jasa keuangan wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance*. Di Indonesia, keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan diperlukan sebagai modal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. [GRI 103-2]

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *sustainable finance* memiliki lima dimensi, yaitu pencapaian keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global serta pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya, pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif, promosi investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi, dan pemberian dukungan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan Indonesia 4P (*pro-growth, projobs, pro-poor, and pro-environment*).

Secara tidak langsung, penerapan *sustainable finance* merupakan bentuk dukungan industri perbankan terhadap Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia. Piagam Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim diserahkan oleh Wakil Tetap RI pada PBB di New York pada 31 Oktober 2016. Perjanjian Paris adalah komitmen warga dunia untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C guna mengurangi risiko dan dampak merugikan akibat perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Komitmen BNI Syariah

Sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, BNI Syariah berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yakni usaha pembangunan yang didasari tiga aspek orientasi, yaitu *profit* (keuntungan), *people* (hubungan sosial masyarakat), serta *planet* (perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup). Langkah nyata dukungan itu, antara lain, diwujudkan melalui penerapan POJK No. 51/POJK.03/2017 per 1 Januari 2020. Penerapan keuangan berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari BNI Syariah untuk

The importance of enhancing the role of banking in the environment was strengthened by the signing of an agreement between Bank Indonesia and the Ministry of Environment in 2004. According to Bank Indonesia, banks that finance environmentally friendly projects have proven to be beneficial, and can even increase their competitiveness. Therefore, Bank Indonesia encourages banks to be motivated to finance projects that are concerned with improving the quality of the environment.

Stricter provisions regarding the importance of banking to the environment are regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies. With this regulation, banks as financial service institutions are required to apply the principles of sustainable finance. In Indonesia, sustainable finance is defined as the comprehensive support from the financial services industry for sustainable growth that results from the alignment of economic, social and environmental interests. The implementation of sustainable finance is needed as an important asset to achieve sustainable development. [GRI 103-2]

According to the Financial Services Authority (FSA), sustainable finance has five dimensions, namely the achievement of industrial, social and economic excellence in the context of reducing the threat of global warming and preventing other environmental and social problems, shifting targets towards a competitive low-carbon economy, promoting environmentally friendly investment in various business/economic sectors, and providing support for the implementation of the 4Ps of development principles in Indonesia (*pro-growth, projobs, pro-poor, and pro-environment*).

Indirectly, the implementation of sustainable finance is a form of banking industry support for the Paris Agreement that has been signed by the Indonesian government. The Charter for Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change was submitted by the Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations in New York on 31 October 2016. The Paris Agreement is the commitment of global citizens to hold the rate of increase in global average temperatures below 2° C in order to reduce risk and the adverse impacts of climate change. Indonesia's commitment to the Paris Agreement is manifested by the issuance of Law No. 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change.

BNI Syariah Commitment

As part of a financial service institution in Indonesia, BNI Syariah is committed to supporting the realization of sustainable development, namely development efforts based on three aspects of orientation, namely profit, people (community social relations), and planet (protection of natural resources and the environment life). This concrete step of support, among others, was realized through the implementation of POJK No. 51/POJK.03/2017 as of 1 January 2020. The implementation of sustainable finance is a comprehensive support from BNI Syariah for growth resulting from harmony



pertumbuhan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. [GRI 103-2]

Walaupun tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi BNI Syariah menerapkan POJK No. 51/POJK.03/2017 sehingga wajib membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), namun prinsip-prinsip universal keuangan berkelanjutan sudah diimplementasikan di BNI Syariah, bahkan sejak berdiri pada tahun 2010. Misi pertama BNI Syariah, sekadar gambaran, seiring dan sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan, yaitu "memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan". Di samping itu, esensi kehadiran perbankan syariah yakni untuk menjalankan tujuan syariah atau *maqoshid syariah* yang terdiri atas *Hifdz Diin* (menjaga agama), *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz Aql* (menjaga akal), *Hifdz Nasb* (menjaga keturunan) dan *Hifdz Maal* (menjaga harta) adalah sangat sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. [GRI 103-2]

BNI Syariah meyakini komitmen untuk menyelaraskan aspek *profit* (keuntungan), *people* (hubungan sosial masyarakat), serta *planet* (perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup) merupakan kunci keberlangsungan dan keberlanjutan Perusahaan. Khusus terkait dengan aspek lingkungan, RAKB yang disusun BNI Syariah telah mengatur tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai konsep keberlanjutan, dalam pembiayaan kepada penggiat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) misalnya, nasabah diimbau agar memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah.

Sementara itu, dalam operasional kantor sehari-hari, kebijakan BNI Syariah terkait pengelolaan dan perlindungan hidup diwujudkan dalam bentuk imbauan, maklumat dan Peraturan Perusahaan, sebagaimana bagan berikut: [GRI 103-3]

between economic, social and environmental interests. [GRI 103-2]

Even though 2020 is the first year for BNI Syariah to implement POJK No. 51/POJK.03/2017 which makes it mandatory to make a Sustainable Finance Action Plan (RAKB), the universal principles of sustainable finance have been implemented in BNI Syariah, even since its establishment in 2010. The first mission of BNI Syariah, in line with the principle of sustainable finance, is to "make a positive contribution to society and care for environmental sustainability". In addition, the essence of the presence of Islamic banking, which is to carry out the objectives of sharia maqoshid which consists of *Hifdz Diin* (preserve religious faith), *Hifdz Nafs* (preserve the soul), *Hifdz Aql* (preserve the mind), *Hifdz Nasb* (preserve the descendants) and *Hifdz Maal* (preserve property), is very much in accordance with the principles of sustainable finance. [GRI 103-2]

BNI Syariah believes that the commitment to align the aspects of profit, people, and planet is the key to the sustainability of the company. Specifically related to environmental aspects, the RAKB prepared by BNI Syariah has regulated the importance of preserving the environment. According to the concept of sustainability, in financing micro, small and medium enterprises (MSMEs), for example, customers are encouraged to pay attention to environmental sustainability and waste management.

Meanwhile, in daily office operations, BNI Syariah policies regarding life management and protection are manifested in the form of appeals, notices and Company Regulations. [GRI 103-3]



Pembiayaan Hijau sebagai Produk Ramah Lingkungan [F.3]

Sejalan dengan spirit POJK No. 51/POJK.03/2017, salah satu produk/jasa ramah lingkungan yang dikerjakan BNI Syariah adalah pembiayaan Griya Konstruksi. Dalam Perjanjian Kerja Sama dengan pengembang properti, BNI Syariah mencantumkan persyaratan terkait pelestarian lingkungan dengan mewajibkan tersedianya dokumentasi berikut:

1. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
2. Izin Lingkungan;
3. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
4. Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir;
5. Surat Rekomendasi Proteksi Kebakaran;
6. Izin Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan;
7. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan;
8. Rekomendasi Teknis Bangunan;
9. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak;
10. Rekomendasi Dokumen UKL & UPL;
11. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
12. Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA);
13. Ijin Pemanfaatan Ruang;
14. Surat Ijin Pengeboran.

Bahkan, sejak semester 2 tahun 2016, BNI Syariah menambahkan lagi persyaratan-persyaratan pelestarian lingkungan bagi pengembang dalam setiap Perjanjian Kerja Sama dan Pembiayaan Griya Konstruksi, yaitu: [F.10]

1. Pengembang Properti wajib berkomitmen untuk menjaga lingkungan perumahan yang dikembangkan dengan menanam/memberikan 1 pohon/bibit pohon kepada konsumen saat serah terima unit rumah;

Green Financing as an Environmentally Friendly Product [F.3]

In line with the essence of POJK No. 51/POJK.03/2017, one of the environmentally friendly products/services carried out by BNI Syariah is financing for Griya Konstruksi. In the Cooperation Agreement with property developers, BNI Syariah includes requirements related to environmental conservation by requiring the following documents to be available:

1. Traffic Impact Analysis (Andalalin);
2. Environmental Permit;
3. Environmental Impact Analysis (AMDAL);
4. Recommendations for Peil Flood Technical Advice;
5. Fire Protection Recommendation Letter;
6. Location Permit for Housing Development Activities;
7. Building Construction Implementation Permit;
8. Building Technical Recommendations;
9. Land Allocation Permit and Site Plan;
10. Recommendations for UKL & UPL documents;
11. Land Technical Considerations;
12. Water Intake Permit (SIPA);
13. Space Utilization Permit;
14. Drilling Permit.

In fact, since the 2nd semester of 2016, BNI Syariah has added more environmental conservation requirements for developers in each Cooperation Agreement and Griya Konstruksi Financing, they are: [F.10]

1. Property Developers must be committed to maintaining housing environment by planting/giving 1 tree/tree seedling to consumers during handover of housing units;



2. Penerangan rumah yang dikembangkan para Pengembang Properti diupayakan menggunakan lampu LED.

Kewajiban menanam satu pohon setiap rumah sangat penting karena pohon memiliki banyak manfaat. Antara lain, mengurangi pemanasan global dengan kemampuannya menyerap emisi karbon, menghasilkan oksigen, potensial mencegah erosi, dan sebagainya.

Sebagai implementasi Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kepada pengembang properti yang hendak bekerja sama, BNI Syariah juga mempersyaratkan adanya dokumen AMDAL dari proyek yang dibiayai. Tak hanya itu, penilaian kelayakan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada aspek profitabilitas (*cash flow*) dan ketersediaan jaminan (*collateral*), namun BNI Syariah melakukan identifikasi program yang dilakukan oleh debitur untuk mengantisipasi dampak negatif dari operasional perusahaan atau proyek.

Hal yang tak kalah penting, kepada para pengembang, BNI Syariah juga mensyaratkan bahwa lokasi yang hendak dibangun dipastikan sesuai dengan peruntukan, misalnya tidak berada di kawasan konservasi atau kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Hal itu merupakan komitmen BNI Syariah dalam menjaga keanekaragaman hayati agar keberadaannya tidak terancam. Syarat serupa berlaku bagi BNI Syariah ketika hendak membangun atau mendirikan kantor.

Komitmen tersebut membawa hasil, yaitu selama tahun pelaporan, tidak ada lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola BNI Syariah yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Dengan demikian, tidak ada dampak negatif yang signifikan terhadap kawasan lindung atau kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. [103-3 , 304-1]

Selain membiayai pengembang properti sesuai prinsip keberlanjutan, BNI Syariah juga menyalurkan danaanya ke sektor-sektor usaha hijau. Antara lain, pembiayaan untuk pengusaha daur ulang plastik, kain perca di segmen mikro, pengelolaan limbah plastik, beras organik, pengelolaan air bersih, pupuk organik, dan sebagainya.

Operasional Kantor Ramah Lingkungan

Komitmen BNI Syariah terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan, antara lain, dengan menerapkan operasional kantor yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, Perseroan berpegang pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*). Pengurangan, antara lain, dilakukan dalam hal penggunaan sumber daya alam, seperti energi listrik, bahan bakar minyak, air dan kertas. Penggunaan ulang yang dilakukan, di antaranya dengan menggunakan material bekas, seperti kertas. Sedangkan untuk daur ulang, BNI Syariah lebih banyak menyerahkan berbagai bahan material yang memungkinkan didaur ulang kepada pihak ketiga.

Operasional kantor yang ramah lingkungan merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009), Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,

2. The home lighting developed by property developers is sought to use LED lights.

The obligation to plant one tree per house is very important because trees have many benefits. Among other things, they reduce global warming by their ability to absorb carbon emissions, produce oxygen, potentially prevent erosion, and so on.

As the implementation of the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 on the Amendment of the Law No. 7 of 1992 concerning Banking, for property developers who wish to cooperate, BNI Syariah also requires an AMDAL document of the project being financed. Not only that, the assessment of the feasibility of financing is not only based on the aspects of profitability (*cash flow*) and the availability of collateral, but also on the BNIS identification of programs carried out by debtors to anticipate negative impacts from company or project operations.

Equally important, for the developers, BNI Syariah also requires that the location to be built is confirmed according to its designation, for example not in a conservation area or an area with high biodiversity. This is a commitment of BNI Syariah in protecting biodiversity so that its existence is not threatened. Similar conditions apply to BNI Syariah when they want to build or establish an office.

This commitment brought results, namely that during the reporting year, BNI Syariah didn't own, lease, manage any operating locations that were adjacent to protected areas or areas with high biodiversity value outside protected areas. Thus, there is no significant negative impact on protected areas or areas with high biodiversity. [103-3 , 304-1]

In addition to financing property developers according to the principles of sustainability, BNI Syariah also distributes funds to green business sectors. Among other things, financing for plastic recycling entrepreneurs, patchwork in the micro segment, plastic waste management, organic rice, clean water management, organic fertilizers, and so on.

Environmentally Friendly Office Operations

BNI Syariah's commitment to environmental sustainability is manifested, among others, by implementing environmentally friendly office operations. In this case, the Company adheres to the 3R principle (*Reduce, Reuse and Recycle*). Reduction, among others, is carried out in terms of the use of natural resources, such as electricity, fuel oil, water and paper. Reuse is done, including using used materials, such as paper. As for recycling, BNI Syariah provides more materials that allow recycling to third parties.

Environmentally friendly office operations refer to the number of regulations, among others, Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment (Law No. 32/2009), Republic Indonesia No. 17 of 2019 on Water Resources, Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2008



Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan sebagainya. Uraian selengkapnya tentang komitmen dan dukungan BNI Syariah terhadap kelestarian lingkungan disampaikan sebagai berikut: [GRI 103-2, 103-3]

1. Pengelolaan Bahan Baku/Material

Kertas merupakan salah satu kebutuhan bahan baku atau material dalam operasional BNI Syariah sehari-hari. Kertas digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, surat-menjurut, mencetak dokumen, transaksi nasabah, dan sebagainya. BNI Syariah menyadari bahwa bahan baku kertas adalah pohon yang diolah menjadi bubur kertas. Dengan demikian, semakin banyak menggunakan kertas, otomatis sejalan dengan penambahan pohon yang ditebang sebagai bahan baku kertas. Begitu pula sebaliknya.

Dalam upaya menghemat penggunaan kertas, BNI Syariah menerapkan Sheco (*Sharia Email Correspondence*), yakni sistem surat-menjurut secara digital yang dilakukan di seluruh Kantor Cabang dan Divisi BNI Syariah. Korespondensi melalui piranti ini, otomatis bisa mengurangi penggunaan kertas, mengurangi gas karbon, sekaligus membudayakan green banking sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain Sheco, BNI Syariah juga mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kertas melalui program e-billing, program e-katalog, dan program apply online. [F.5]

Langkah nyata untuk menghemat kertas dilakukan dengan mengurangi pencetakan dokumen, jika harus mencetak dan dimungkinkan bolak-balik, maka akan dilakukan bolak-balik. Koreksi secara optimal sebelum naskah dicetak perlu dilakukan sehingga meminimalkan pencetakan ulang. Adapun pencetakan untuk *draft* atau konsep dokumen dianjurkan untuk menggunakan kertas bekas (kertas yang salah satu sisinya sudah dipakai). Adapun kertas bekas yang sudah tidak terpakai dan tidak mengandung informasi penting perusahaan, BNI Syariah mengumpulkan kertas-kertas tersebut dan menyerahkannya ke pihak ketiga untuk didaur ulang.

Adapun penggunaan material kertas selama tahun 2020 adalah sebanyak 2.401 rim, turun dibandingkan tahun 2019, yang penggunaannya sebanyak 3.753 rim. Penurunan terjadi karena adanya pandemi Covid-19 sehingga operasional BNI Syariah menjadi lebih terbatas.

2. Pengelolaan Energi

Selain kertas, energi merupakan kebutuhan vital bagi operasional keseharian BNI Syariah. Energi yang digunakan Perseroan adalah listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Ketersediaan listrik dipasok oleh PT PLN (Persero), yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyalaan berbagai peralatan elektronik, penerangan, dan sebagainya. Sedangkan energi BBM diperoleh dengan pembelian ke PT Pertamina atau

concerning Waste Management, Government Regulation No. 101 of 2014 concerning Hazardous Waste Management, Government Regulation No. 74 concerning Management of Hazardous and Toxic Materials, and so on. A complete description of BNI Syariah's commitment and support to environmental sustainability is as follows: [GRI 103-2, 103-3]

1. Raw Material/Material Management

Paper is one of the raw materials used in the Company's daily operations. Paper is used for various administrative purposes, correspondence, printing documents, customer transactions, and so on. BNI Syariah realizes that the raw material for paper Are trees which are processed into pulp. With more and more paper is used, more trees are cut down as raw material for paper.

In an effort to save paper usage, BNI Syariah implements Sheco (Sharia Email Correspondence), which is a digital correspondence system that is carried out in all BNI Syariah Branch Offices and Divisions. Correspondence through this tool can automatically reduce paper use, reduce carbon gas, and at the same time cultivate green banking in accordance with the guidance of the Financial Services Authority (FSA). Besides Sheco, BNI Syariah also issued a policy to reduce the use of paper through e-billing, e-catalog program, and the apply online program [F.5]

Other concrete step to save paper is by reducing the printing of documents, if somethings need to be printed, if it is possible to do it in both the back and front of a paper, then it will be done so. Optimal correcting before the manuscript is printed needs to be done so as to minimize reprinting. As for printing drafts or draft documents, it is recommended to use used paper (paper that has one side already used). As for used paper that is no longer used and does not contain important company information, BNI Syariah collects the papers and hands them over to a third party for recycling.

The use of paper material during 2020 was 2,401 reams, a decrease compared to 2019, which used 3,753 reams. The decline occurred due to the Covid-19 pandemic so that BNI Syariah operations became more limited.

2. Energy Management

Apart from paper, energy is a vital requirement for the daily operations of BNI Syariah. The energy used by the Company is electricity and fuel oil (BBM). The availability of electricity is supplied by PT PLN (Persero), which is used for various purposes, such as turning on various electronic equipment, lighting, and so on. Meanwhile, fuel energy is obtained by purchasing from PT Pertamina or other companies. For the most part, fuel is used



perusahaan lain. Sebagian besar, BBM digunakan sebagai sumber energi kendaraan operasional. Oleh karena listrik maupun BBM merupakan sumber energi tak terbarukan dan ketersediaannya semakin terbatas, maka BNI Syariah berkomitmen untuk melakukanbagai langkah penghematan. [GRI 103-1, GRI 103-2]

Upaya nyata untuk menghemat listrik dilakukan melalui berbagai kebijakan. Antara lain, pada siang hari diupayakan untuk memanfaatkan sinar matahari karena banyak ruangan yang memiliki panel kaca, memilih lampu led (*light emitting diode*) untuk penerangan, memastikan komputer dan lampu mati saat tak digunakan. Sementara itu, untuk kantor BNI Syariah yang bersifat mandiri, tidak bersama dengan kantor lain dalam satu gedung, sangat ditekankan agar menggunakan *air conditioning* yang hemat listrik, suhu ruangan ber-AC diatur sesuai kebutuhan (tidak terlalu dingin), rutin membersihkan perangkat AC. Bahkan, ada kebijakan setengah jam sebelum kantor layanan tutup, AC dimatikan. [GRI 103-3, 302-4][F.7]

Sementara itu, langkah penghematan BBM dilakukan dengan mengurangi perjalanan dinas, dan memperbanyak rapat jarak jauh dengan telekonferensi atau aplikasi lainnya. Selama pandemi Covid-19, penyelenggaraan rapat jarak jauh naik secara signifikan. Perawatan rutin mobil operasional dan menggantinya dengan mobil baru setelah mobil berumur 3 tahun juga menjadi kebijakan guna menghemat energi. [GRI 103-3, 302-4][F.7]

Berdasarkan data dari Divisi PFD, penggunaan listrik Kantor Pusat selama tahun 2020 adalah sebesar 307.583 kWh atau setara dengan 1.107,30 Gigajoules, turun dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 362.728 kWh atau setara dengan 1.305,82 Gigajoules. Penurunan terjadi karena pandemi Covid-19 yang membuat kebijakan Manajemen untuk membuat operasional terbatas untuk unit kritis. Untuk intensitas energi listrik, pada tahun pelaporan, BNI Syariah belum bisa melaporkan karena Perseroan belum melakukan audit energi penggunaan listrik di Kantor Pusat. [GRI 103-3, 302-1][F.6]

Adapun penggunaan BBM untuk Kantor Pusat selama tahun 2020 tercatat sebesar 28.841 liter atau setara dengan 986,36 Gigajoules, naik dibandingkan dengan tahun 2019, yang penggunaannya tercatat sebesar 28.171 liter atau setara dengan 963,45 Gigajoules. Kenaikan terjadi karena sebagai bentuk pencegahan Covid-19 di lingkungan pegawai, sehingga Manajemen memberikan kebijakan berupa penyediaan mobil operasional untuk antar jemput pegawai BNI Syariah dari rumah pegawai ke kantor, menghindari penggunaan transportasi umum bagi pegawai. [GRI 103-3, 302-1][F.6]

3. Pengelolaan Air

Air merupakan salah satu kebutuhan vital pagi operasional sehari-hari BNI Syariah. Air digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembilasan di kamar kecil, wudhu, mencuci peralatan dapur, dan lain-lain.

for operational vehicles. Since electricity and fuel are non-renewable energy sources and their availability is increasingly limited, BNI Syariah is committed to taking various savings measures. [GRI 103-1, GRI 103-2]

Real efforts to save electricity are made through various policies. Among others are by taking advantage of sunlight during the day to light the office, choosing led lights (*light emitting diodes*) for lighting, and ensuring computers and lights are turned off when not in use. Meanwhile, for independent BNI Syariah offices, in other words, not sharing building with other office, it is strongly emphasized to use energy efficient air conditioning, to set the temperature of the air-conditioner accordingly (not too cold), and to regularly clean the devices. In fact, there is a policy of half an hour before the service office closes, the air conditioner must be turned off. [GRI 103-3, 302-4] [F.7]

Meanwhile, fuel savings measures were taken by reducing official trips, and increasing long-distance meetings by means of teleconferencing or other applications. During the Covid-19 pandemic, the holding of remote meetings increased significantly. Routine maintenance of operational cars and replacing them with new cars after the car is 3 years old is also a policy to save energy. [GRI 103-3, 302-4] [F.7]

Based on data from the PFD Division, the use of electricity at the Head Office in 2020 is 307,583 kWh or equivalent to 1,107.30 Gigajoules, which was a decrease compared to 2019, which reached 362,728 kWh or equivalent to 1,305.82 Gigajoules. The decline occurred due to the Covid-19 pandemic, which made Management's policy to make operations limited to critical units. For the intensity of electrical energy, in the reporting year, BNI Syariah has not been able to report it because the Company has not audited the energy use of electricity at the Head Office. [GRI 103-3, 302-1] [F.6]

The use of fuel for the Head Office during 2020 was recorded at 28,841 liters or equivalent to 986.36 Gigajoules, an increase compared to 2019, which was recorded at 28,171 liters or equivalent to 963.45 Gigajoules. The increase occurred because it was a form of Covid-19 prevention in the employee environment. The Management made a policy of providing operational vehicles to shuttle BNI Syariah employees from the employee's house to the office, to avoid the use of public transportation for employees. [GRI 103-3, 302-1] [F.6]

3. Water Management

Water is one of the vital needs of BNI Syariah's daily operations. Water is used for various purposes, such as rinsing in the restroom, ablution, washing kitchen utensils, and so on. The water used by the



Air yang digunakan Perseroan bersumber dari PDAM. Oleh karena sumber air bersih kian terbatas, dan butuh biaya besar untuk mengolah air baku menjadi air PDAM, maka BNI Syariah menerapkan kebijakan penghematan air. Selain memasang anjuran untuk menggunakan air secara bijaksana, Perseroan juga melakukan pengecekan instalasi air secara berkala sehingga bisa dilakukan perbaikan apabila terjadi kebocoran atau kerusakan lainnya. Selain itu, Perseroan juga melansir kebijakan wudhu hemat berupa pemasangan regulator sensor pada keran wudhu di Kantor Pusat dan beberapa cabang BNI Syariah dengan tujuan penghematan air hingga 30-50%. [GRI 103-1, 103-2]

Namun demikian, seperti tahun sebelumnya, BNI Syariah tidak bisa menyampaikan informasi tentang volume air yang digunakan. Sebab, penggunaan air PDAM di Kantor Pusat menjadi satu dalam tagihan "service charge" *building management*. Dalam hal ini, pengelola gedung tidak memberikan rincian pemakaian air PDAM dan berapa yang dikeluarkan untuk pemakaian air karena sudah menjadi satu dalam komponen "service charge" Gedung Tempo Pavilion 1. [GRI 103-3, 303-1][F.8]

4. Pengelolaan Limbah

Dalam operasional usaha, BNI Syariah menghasilkan limbah, baik cair maupun padat, B3 maupun non-B3. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka air limbah maupun limbah akan menjadi sumber pencematan dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, Perseroan menyediakan tempat sampah yang cukup. Sampah yang terkumpul akan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan pengelola gedung.

Khusus untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, antara lain, berupa oli bekas dari kendaraan operasional, BNI Syariah menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga yang memiliki izin penyimpanan, pengumpulan dan pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk limbah tidak berbahaya berupa kertas, BNI Syariah menyerahkannya kepada pihak ketiga untuk didaur ulang.

Sejalan dengan upaya mengurangi limbah, BNI Syariah menerapkan *less plastic waste* yaitu seluruh jaringan BNI Syariah meminimalisir penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK) di *Banking Hall* maupun operasional secara umum. Akan tetapi karena pandemi Covid-19, pencapaian program ini belum bisa berjalan sepenuhnya dengan konsiderasi pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2.

5. Pengelolaan Emisi Udara

Emisi gas buang merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Salah satu sumber emisi gas buang adalah hasil pembakaran mesin kendaraan bermotor, termasuk

Company comes from PDAM. Because clean water sources are increasingly limited, and it costs a lot to process raw water into PDAM water, BNI Syariah implements a water saving policy. Apart from installing recommendations to use water wisely, the Company also checks water installations periodically so that repairs can be made in the event of a leak or other damage. In addition, the Company also launched a wudhu-saving policy in the form of installing sensor regulators on ablation taps at the Head Office and several BNI Syariah branches with the aim of saving water up to 30-50%. [GRI 103-1, 103-2]

However, as with the previous year, BNI Syariah was unable to convey information on the volume of water used. This is because the use of PDAM water at the Head Office is included in the building management service charge. In this case, the building manager did not provide details of the PDAM water usage and how much was spent on water use because it was part of the "service charge" component of the Tempo Pavilion 1 Building. [GRI 103-3, 303-1] [F.8]

4. Waste Management

In business operations, BNI Syariah produces both liquid and solid, as well as hazardous and non-hazardous waste. If it is not managed properly, waste water and waste will be a source of pollution and environmental damage. For this reason, in order to avoid environmental problems, the Company provides sufficient trash cans. The collected waste will be disposed of at the final disposal site (TPA) by a third party in collaboration with the building management.

Specifically for the management of Hazardous and Toxic Waste, among others, in the form of used oil from operational vehicles, BNI Syariah hands over its management to a third party who has a storage, collection and utilization permit from the Ministry of Environment. For non-hazardous waste in the form of paper, BNI Syariah hands it over to a third party for recycling.

In line with efforts to reduce waste, BNI Syariah implements less plastic waste, namely the entire BNI Syariah network minimizes the use of bottled drinking water (AMDK) in the Banking Hall and in general operations. However, due to the Covid-19 pandemic, the achievement of this program has not been able to performed fully with the consideration of preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus.

5. Air Emission Management

Exhaust gas emissions are a source of air pollution that is harmful to human health. One of the sources of exhaust emissions is the combustion of motorized vehicles, including BNI Syariah operational vehicles. For



mobil-mobil operasional BNI Syariah. Untuk mobil operasional, BNI Syariah menggunakan *vendor leasing* mobil operasional, dan *leasing* tersebut termasuk dengan perawatan rutin. Sebab itu, dalam upaya mengurangi emisi gas buang, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh *leasing* tersebut adalah semua mobil operasional harus lolos uji emisi gas buang.

Pada tahun 2020, Kantor Pusat mengoperasikan kendaraan operasional sewa sebanyak 30 buah. Sementara itu, dalam operasional sehari-hari, agar sejalan dengan upaya mengurangi emisi udara, bahan bakar yang digunakan untuk mobil operasional dipilih yang beroktan tinggi sehingga pembakarannya lebih sempurna.

6. Pengelolaan Bahan Perusak Ozon

Lapisan ozon memiliki manfaat yang sangat besar bagi bumi dan makhluk hidup di atasnya. Manfaat itu, antara lain, mencegah masuknya radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan dari matahari ke permukaan bumi. Radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan berbahaya bagi makhluk hidup, seperti menyebabkan kanker kulit atau berkangnya produktivitas tanaman. Salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon adalah penggunaan berbagai piranti yang mengandung bahan perusak ozon (BPO), seperti mesin pendingin ruangan (AC), kulkas, dan tabung pemadam api. Ada 23 senyawa kimia yang dikategorikan sebagai BPO oleh pemerintah, yakni CC-I4, CH-3, CC-13, CH3BR, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-13, CFC-111, CFC-217, CFC-216, CFC-215, CFC-214, CFC-213, CFC-212, CFC-211, Halon-1211, Halon-1301, Halon-2402, R-500, R-502.

Komitmen BNI Syariah untuk mencegah penipisan lapisan ozon agar tidak membahayakan bagi bumi dan makhluk hidup di atasnya, antara lain, dengan menggunakan refrigeran AC yang ramah lingkungan, seperti R410 atau R32. Sedangkan untuk alat pemadam api ringan, Perseroan juga memilih zat pemadam api yang lebih ramah lingkungan, seperti AF11, tidak lagi memanfaatkan zat pemadam berupa halon.

7. Kampanye Pelestarian Lingkungan

Selain operasional kantor yang ramah lingkungan, dukungan BNI Syariah untuk kelestarian lingkungan diwujudkan juga melalui berbagai kegiatan bertepatan dengan Hari Bumi Internasional setiap tanggal 22 April. Pada tahun 2020, Perseroan melakukan kegiatan berupa pembuatan 1.220 Lubang Resapan Biopori (LRB) di seluruh outlet BNI Syariah. Program dengan tema "Langkah Kecil untuk Bumi Lestari" ini dipilih karena selaras dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan beberapa institusi lainnya, yaitu gerakan 5 juta Lubang Resapan Biopori di Indonesia. Keberadaan lubang biopori memiliki berbagai manfaat, antara lain, mencegah banjir, meningkatkan cadangan air bersih serta pembentukan kompos dan penyuburan tanah.

operational vehicles, BNI Syariah uses operational car leasing vendors, and this leasing includes routine maintenance. Therefore, in an effort to reduce exhaust emissions, one of the conditions that must be met by the vendors is that all operational cars must pass the exhaust emission test.

In 2020, the Head Office operates as many as 30 rental operational vehicles. Meanwhile, in daily operations, in order to be in line with efforts to reduce air emissions, the fuel used for operational cars is chosen with high octane so that its combustion is more complete.

6. Ozone Depleting Substances Management

The ozone layer has enormous benefits for the earth and living creatures on it. These benefits, among other things, prevent the entry of excessive ultraviolet radiation from the sun to the earth's surface. Excessive ultraviolet radiation is harmful to living things, such as causing skin cancer or reduced productivity of plants. One of the causes of the depletion of the ozone layer is the use of various devices containing ozone depleting substances (BPO), such as air conditioning machines (AC), refrigerators, and fire extinguishers. There are 23 chemical compounds that are categorized as BPO by the government, namely CC-I4, CH-3, CC-13, CH3BR, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-13, CFC-111, CFC-217, CFC-216, CFC-215, CFC-214, CFC-213, CFC-212, CFC-211, Halon-1211, Halon-1301, Halon-2402, R-500, and R- 502.

BNI Syariah's commitment to prevent the depletion of the ozone layer so as not to harm the earth and living creatures on it, among others, is by using environmentally friendly refrigerants such as R410 or R32. As for light fire extinguishers, the Company also chooses a fire extinguisher that is more environmentally friendly, such as AF11, which no longer uses halon extinguishers.

7. Environmental Conservation Campaign

In addition to environmentally friendly office operations, BNI Syariah support for environmental preservation is also realized through various activities to coincide with International Earth Day every 22 April. In 2020, the Company carried out activities in the form of making 1,220 Biopore Infiltration Holes (LRB) at all BNI Syariah outlets. The program, with the theme "Small Steps for a Sustainable Earth", was chosen because it is in line with the Ministry of Environment and Forestry program which is supported by the local government and several other institutions, namely the 5 million Biopore Infiltration Holes movement in Indonesia. The existence of biopore holes has various benefits, including preventing flooding, increasing clean water reserves, and forming compost and soil fertility.



Biaya Lingkungan

Untuk mewujudkan dukungan terhadap kelestarian lingkungan, selama tahun 2020, BNI Syariah mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp245.950.000, turun dibandingkan tahun 2019, yang mencapai sebesar Rp289.615.000. Uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain, untuk bantuan pengadaan air bersih, pembuatan sumur, dan pembangunan MCK. [F.4]

Kepatuhan Lingkungan

BNI Syariah melaksanakan kegiatan bisnis di bidang perbankan dengan senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Untuk mendukung upaya tersebut, Perseroan berusaha untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. [GRI 103-1, 103-2]

Konsistensi BNI Syariah dalam hal kepedulian lingkungan, yang sejalan dengan misi pertama Perseroan, membawa hasil dengan tidak adanya pengaduan yang berkait dengan masalah lingkungan. Selain itu, juga tidak terdapat denda/sanksi yang dijatuhkan kepada Perseroan karena ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan tentang lingkungan hidup. [GRI 103-3, 307-1]

Environmental Costs

To realize support for environmental sustainability, in 2020, BNI Syariah incurred environmental costs of IDR 245,950,000 million, a decrease compared to 2019, which reached IDR 289,615,000 million. The money is used for various purposes, among others, for assistance in supplying clean water, constructing wells, and constructing toilets. [F.4]

Environmental Compliance

BNI Syariah carries out business activities in the banking sector by always paying attention to environmental aspects. To support these efforts, the Company strives to always comply with regulations relating to environmental management. [GRI 103-1, 103-2]

The consistency of BNI Syariah in terms of environmental concern, which is in line with the Company's first mission, has resulted in the absence of complaints related to environmental issues. In addition, there are also no fines/sanctions imposed on the Company for disobedience or violation of the rules and regulations concerning the environment. [GRI 103-3, 307-1]





Kinerja Sosial

Social Performance

2020



SUMBER DAYA INSANI SEBAGAI PENOPANG KEMAJUAN

HUMAN RESOURCES AS THE SUPPORT OF PROGRESS



Sumber daya insani yang siap, mampu dan siaga untuk bergerak bersama mencapai tujuan merupakan faktor penting bagi kemajuan dan perkembangan BNI Syariah. Keberadaan mereka semakin bermakna, sekaligus menjadi jawaban, atas meningkatnya gairah dan kepercayaan umat Islam untuk menghidupkan lembaga keuangan syariah, terutama perbankan. Berbekal ilmu dan pemahaman yang matang dan berbasis syariah, mereka dengan penuh semangat memberikan sumbangan pemikiran dan menunaikan berbagai jenis pekerjaan sehingga target-target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI Syariah bisa tercapai. [GRI 103-1]

Untuk menghadirkan sumber daya insani yang berkualitas dan profesional di bidangnya, BNI Syariah memerlukan proses yang sangat panjang, terintegrasi antara satu dengan yang lain. Pengelolaannya pun memerlukan ilmu dan seni tersendiri sehingga semua potensi yang ada di setiap insan tergali dan bisa diterapkan secara optimal. Dalam upaya mengelola sumber daya insani itulah, BNI Syariah membentuk Divisi Sumber Daya Insani. Pada tahun 2020, divisi ini didukung 57 pegawai, termasuk seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Selain berpedoman pada sifat-sifat Rasulullah, yaitu *siddiq, amanah, tabligh, fathanah, dan istiqamah* pengelolaan sumber daya insani di BNI Syariah merujuk pada aturan dan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, seperti Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan-aturan turunannya. Dalam mengelola sumber daya insani, Perseroan berkomitmen untuk memperlakukan semua secara sama dan setara (non diskriminatif) karena BNI Syariah menyadari bahwa keberagaman merupakan keniscayaan dan sunatullah. [GRI 103-2]

Human resources who are ready, capable and ready to work together to achieve goals are important factors for the progress and development of BNI Syariah. Their existence is increasingly meaningful, as well as becoming the answer, for the increasing passion and confidence of Muslims to revive Islamic financial institutions, especially in banking. Armed with mature and sharia-based knowledge and understanding, they enthusiastically contribute ideas and carry out various types of work so that the targets set in the BNI Syariah Bank Business Plan (RBB) can be achieved. [GRI 103-1]

To present quality and professional human resources in their fields, BNI Syariah requires a very long process, integrated with one another. Its management also requires its own knowledge and art so that all the potential that exists in every human being is explored and can be optimally applied. In an effort to manage human resources, BNI Syariah formed the Human Resources Division. In 2020, this division is supported by 57 employees, including a Division Head who reports directly to the President Director.

In addition to referring to the properties of the Prophet of Siddiq, trustworthy, sermons, fathanah, and istiqamah, the management of human resources in BNI Syariah refers to the rules and regulations applicable in the field of employment, such as Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and its derivative regulations. In managing human resources, the Company is committed to treating all equally (non-discriminatory) because BNI Syariah realizes that diversity is a necessity and sunatullah. [GRI 103-2]



Strategi Pengembangan SDI

Pengelolaan sumber daya insani di BNI Syariah dilakukan berbasis kompetensi. Model kompetensi yang ditetapkan telah disesuaikan dengan visi, misi dan nilai budaya kerja BNI Syariah. Pada tahun 2020, pengembangan sumber daya insani difokuskan pada program pengembangan berdasarkan pemetaan talent classification seluruh pegawai. Pemetaaan diiperoleh dari penilaian kinerja dan kompetensi pegawai. [GRI 103-1]

Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya insani, sejak tahun 2019, seluruh pegawai wajib mengikuti assessment dalam rangka menilai level kompetensi yang dimiliki, kemudian dibandingkan dengan standard kompetensi jenjang jabatan. Beberapa metode pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan BNI Syariah antara lain dengan memastikan pembuatan dan pelaksanaan *Individual Development Program* (IDP) dan percepatan job-promotion pada pegawai dengan klasifikasi Hasanah Star dan Promotable, *job enhancement, training, coaching, mentoring* dan *project assignment*.

Selanjutnya, dalam rangka sinergi setiap program pengembangan secara lebih komprehensif dan berbasis digital, maka pada tahun 2020 dilaksanakan project e-coaching, mentoring dan IDP online yang masuk dalam pengembangan HCIS fase 2. E-coaching mentoring bertujuan untuk memudahkan setiap pegawai menjalankan coaching dan mentoring dengan lebih terstruktur dan terdokumentasi. Adapun IDP Online dilaksanakan untuk menjadi tools para pegawai untuk dapat mengetahui dan rancangan program pengembangan yang ditawarkan dan disepakati di setiap tahunnya.

Selama tahun 2020, Divisi Sumber Daya Insani juga melanjutkan program pengembangan pegawai berdasarkan spesifikasi dan tujuan penempatan pegawai.

Secara rinci, pengembangan pegawai pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut: [GRI 103-2]

1. Penyusunan *Individual Development Program* online untuk pengembangan kompetensi pegawai;
2. Pelaksanaan *Leadership Development Program* sebagai program pengembangan pegawai yang akan menjadi successor pimpinan;
3. Pelaksanaan program-program retensi talent pool, seperti beasiswa S2 dan e-wallet;
4. Penyusunan program e-coaching dan mentoring.

Secara khusus, menghadapi kondisi pandemi Covid-19, BNI Syariah telah mengambil berbagai kebijakan strategis di bidang sumber daya insani guna mendukung terjaganya kinerja sebagai berikut: [GRI 103-3]

1. Mengembangkan dan menerapkan Hasanah Working Style dalam menghadapi New Normal;
2. Menjaga keberlangsungan aktivitas layanan, operasional, dan pengembangan bisnis dengan menerapkan kebijakan SDM sesuai dengan protokol kesehatan melalui Work From Home (WFH), Split Operation, Shift Operation;
3. Mengendalikan pertumbuhan jumlah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai melalui digital learning dan kerja sama dengan pihak Ketiga;
5. Memanfaatkan media digital dalam rangka pengelolaan dan monitoring aktivitas pegawai melalui Employee Apps;

SDI Development Strategy

Human resource management at BNI Syariah is carried out based on competence. The established competency model has been adjusted to the vision, mission and work culture values of BNI Syariah. In 2020, human resource development will be focused on development programs based on the mapping of talent classification for all employees. Mapping is obtained from employee performance and competency appraisals. [GRI 103-1]

To support the success of human resource management, since 2019, all employees are required to take an assessment to assess their competency level, then compare it with the competency standards for job levels. Some of the employee competency development methods implemented by BNI Syariah include ensuring the creation and implementation of the Individual Development Program (IDP) and accelerating job-promotion for employees with Hasanah Star and Promotable classifications, job enhancement, training, coaching, mentoring and project assignments.

Furthermore, to synergize each development program more comprehensively and digitally, in 2020, e-coaching, mentoring and online IDP projects are implemented. This is included in the development of HCIS phase 2. E-coaching mentoring aims to make it easier for every employee to carry out coaching and mentoring more structured and documented. The IDP Online is implemented as a tool for employees to be able to find out and design development programs that are offered and agreed upon every year.

In 2020, the Human Resources Division will also continue the employee development program based on the specifications and objectives for employee placement. In detail, the development of employees in the reporting year is as follows: [GRI 103-2]

1. Preparation of an online Individual Development Program for employee competency development;
2. Implementing the Leadership Development Program as an employee development program to appoint those who will become the successor of the leadership;
3. Implementation of talent pool retention programs, such as scholarships S2 and e-wallet.
4. E-coaching and mentoring programs.

In particular, in facing the Covid-19 pandemic conditions, BNI Syariah has taken various strategic policies in the field of human resources to support the following: [GRI 103-3]

1. Develop and apply the Hasanah Working Style in dealing with the New Normal;
2. Maintaining the continuity of service, operational and business development activities by implementing HR policies in accordance with health protocols through Work From Home (WFH), Split Operation, and Shift Operation;
3. Controlling the growth in number by optimizing existing resources;
4. Conducting training and employee development through digital learning and collaboration with third parties;
5. Utilizing digital media in the context of managing and monitoring employee activities through Employee Apps;



6. Meninjau kembali kebijakan remunerasi dan career path management di BNI Syariah dalam rangka Attract, Motivate, Retain.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai [F.22]

Kebijakan tentang pelatihan dan pengembangan kemampuan atau kompetensi pegawai BNI Syariah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Karir dan Talenta No. PP/S04/019-00/2020. Pada tahun 2020, Perseroan telah memberlakukan *Management Development Program* (MDP) yang merupakan program sertifikasi untuk pegawai dengan klasifikasi tertentu yang dilaksanakan untuk memenuhi/meningkatkan kompetensi untuk pegawai berbakat yang akan dipromosikan menjadi Pimpinan dengan jenjang Senior Manager. [GRI 103-2]

Mulai tahun 2020, BNI Syariah juga memulai pemberlakuan *Hasanah Learning Wallet* (HLW) yang merupakan diversifikasi pemberian program pengembangan pegawai yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masing-masing pegawai. Pelatihan *softskill* untuk pegawai pada level pimpinan juga tetap diberikan dengan intens dengan program yang bernama *Leadership Development Program* (LDP).

Sementara itu, sebagai respons terjadinya pandemi Covid-19, BNI Syariah melakukan penyesuaian model pelatihan dan pengembangan kompetensi, yaitu pembelajaran secara *online learning*. Bagi Perseroan, Covid-19 seolah menjadi semacam *blessing in disguise*, karena membuat pegawai semakin terbiasa melakukan pembelajaran secara *online*. Sebelum pandemi, rencana pembelajaran serupa telah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Media pembelajaran digital juga dapat diakses oleh seluruh pegawai kapan pun dan di mana pun melalui *Learning Management System* yang baru yaitu "Hasanah Digital Learning" disingkat Handle. Hal ini pun dilakukan sembari terus melakukan standarisasi modul pelatihan pada *Assistant Development Program* (ADP), *Officer Development Program* (ODP), dan *Management Development Program* (MDP). Penyusunan program pelatihan dilakukan dengan mendesain kebutuhan berdasarkan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi. Kemudahan dalam melaksanakan proses usulan pelatihan secara digital bagi seluruh pegawai melalui aplikasi Handle dengan adanya mekanisme persetujuan usulan program Hasanah *Learning Wallet* (HLW) yang dapat dilakukan monitoring secara langsung melalui aplikasi Handle.

Sesuai dengan komitmen perlakuan yang sama dan setara, pengembangan kompetensi di BNI Syariah dilakukan pada setiap level pegawai di organisasi. Dari level Clerk sampai dengan Executive Manager, semua mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang dihitung berdasarkan *Learning Need Analysis*. Selama tahun 2020, tercatat 61 pelatihan yang telah diselenggarkan oleh BNI Syariah yang diikuti oleh 10.265 peserta dengan total biaya sebesar Rp306.664.105. Sementara itu, untuk pegawai yang akan pensiun, BNI Syariah menyelenggarakan pelatihan sebagai berikut: [GRI 103-3, 404-2]

6. Reviewing remuneration policies and career path management at BNI Syariah in the context of Attract, Motivate, and Retain.

Employee Training and Capacity Building [F.22]

Policies regarding training and developing the ability or competency of BNI Syariah employees are regulated in the Career and Talent Management Implementation Guidelines No. PP/S04/019-00/2020. In 2020, the Company has implemented a Management Development Program (MDP), which is a certification program for employees with certain classifications that are implemented to fulfill/improve competencies for talented employees who will be promoted to Leaders with the level of Senior Manager. [GRI 103-2]

Starting in 2020, BNI Syariah has also started the implementation of the Hasanah Learning Wallet (HLW), which is a diversification of employee development programs tailored to the interests and needs of each employee. Soft skill training for employees at the leadership level is still given intensely with a program called the Leadership Development Program (LDP).

Meanwhile, in response to the Covid-19 pandemic, BNI Syariah made adjustments to the training model and competency development, namely by conducting online learning. For the Company, Covid-19 seems to be a kind of blessing in disguise, because it makes employees more accustomed to learning online. Prior to the pandemic, similar learning plans were planned and will be implemented in 2020.

Digital learning media can also be accessed by all employees anytime and anywhere via the Learning Management System in the form of the new "Hasanah Digital Learning" which is abbreviated into 'Handle'. This is also done while continuing to standardize training modules in the Assistant Development Program (ADP), the Officer Development Program (ODP), and the Management Development Program (MDP). The preparation of training programs is carried out by designing needs based on a competency-based curriculum and syllabus. The ease of carrying out the process of digital training proposals for all employees through the 'Handle' application with the Hasanah Learning Wallet (HLW) program proposal approval mechanism that can be monitored directly through the 'Handle' application.

In accordance with the commitment to equal and fair treatment, competency development in BNI Syariah is carried out at every level of the employee in the organization. From the Clerk to the Executive Manager, all receive training according to their needs calculated based on Learning Need Analysis. In 2020, there were 61 trainings held by BNI Syariah which were attended by 10,265 participants with a total cost of IDR 306,664.105. For employees who will retire, BNI Syariah organizes the following training: [GRI 103-3, 404-2]



Pelatihan Menjelang Pensiun/Program Bantuan Peralihan Tahun 2020

Training for Retirement/Transitional Assistance Program in 2020

Materi Pelatihan Training Materials	Tujuan Objectives	Waktu/Tempat Date/Place	Syarat Peserta Requirements	Jumlah Peserta Number of Participants
Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation	<ul style="list-style-type: none"> Memberi bantuan pengetahuan, pengalaman dan pemikiran kepada para calon pensiunan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun Mempersiapkan psikologis para calon pensiunan agar merasa lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, lebih mengetahui arah tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan setelah masa pensiun Memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan keluarga Memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mentransformasikan diri dari karyawan menjadi wiraswasta (bagi para pensiunan yang tertarik untuk berwirausaha) Provide knowledge, experience and thoughts to prospective retirees in preparing for retirement Psychologically preparing prospective retirees to feel calmer, more peaceful, happier, and more aware of the direction of goals to be achieved in life after retirement Have the skills necessary to manage family finances Have a more comprehensive picture of how to transform themselves from employees to entrepreneurs (for retirees who are interested in entrepreneurship) 	08.00 sd 15.00 WIB 05-07 Oktober 2020	Batch 1 Pegawai dengan range usia 54-55 tahun Batch 1 - Employees with an age range of 54 to 55 years	15

Tinjauan dan Penilaian Kinerja Pegawai

BNI Syariah melakukan peninjauan atau penilaian atas pencapaian kinerja pegawai secara berkala. Ketentuan penilaian kinerja mengacu pada Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Penilaian *Performance Management System* (PMS) No. PT/S04-HROD/007/2020 tanggal 3 Februari 2020. Penilaian kinerja mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Penilaian atas pencapaian target kerja (KPI pegawai);
- Penilaian atas cara kerja (kompetensi pegawai).

Selanjutnya, hasil tinjauan atau penilaian kinerja pegawai tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi BNI Syariah untuk penentuan jenjang karier, yaitu promosi, mutasi, rotasi atau demosi. Hasil tinjauan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Employee Performance Review and Assessment

BNI Syariah conducts periodic reviews or assessments of employee performance achievement. Provisions on Performance assessment refer to the Technical Guidelines for the Implementation of the Performance Management System (PMS) Assessment No. PT/S04-HROD/007/2020 dated February 3, 2020. Performance assessment includes the following:

- Assessment of the achievement of work targets (employee KPI);
- Assessment of working methods (employee competence).

Furthermore, the results of the employee performance review or assessment are taken into consideration for BNI Syariah to determine career paths, namely promotion, transfer, rotation or demotion. The full review results are presented in the following table:



Tinjauan Rutin Karyawan dan Jenjang Karier

Tahun Year	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Peninjauan/Review Number of Employees Reviewed	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Results of the Assessment and Career Development Relevance		
		Promosi Promotion	Mutasi Mutation	Demosi Demotion
2018	3.304 (67% dari total karyawan = 4942) 3.304 (67% of total employees = 4942)	1.124	2.098	82
2019	2671 (47% dari total karyawan = 5723) 2.671 (47% of total employees = 5.723)	1.428	1.201	42
2020	2.921 (51% dari total karyawan = 5738) 2.921 (51% of total employees = 5.738)	1.507	1.349	65

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [F.18]

BNI Syariah menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan antar manusia, baik dari segi jenis kelamin, golongan, suku dan ras. Sejalan dengan itu, Perseroan berkomitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai secara setara dalam kesempatan bekerja, mendapatkan penilaian kinerja, termasuk untuk mendapatkan kenaikan jenjang karier, pengembangan kompetensi, remunerasi dan lain-lain. Berdasarkan komitmen itu, maka BNI Syariah banyak memiliki pegawai wanita berbagai yang menduduki jabatan atau posisi penting.

Komitmen BNI Syariah dalam menerapkan kesetaraan, selain diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, juga menjadi bentuk ketiaataan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan), Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Rekrutmen dan Turnover Pegawai

Rekrutmen pegawai merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai baru sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan BNI Syariah. Proses rekrutmen merupakan bagian dari siklus *Human Capital* yang difokuskan pada penuhan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan Perusahaan. [GRI 103-1]

Saat ini, terdapat tiga jenis rekrutmen di BNI Syariah, yaitu rekrutmen internal, eksternal serta dan penugasan dari Perusahaan Induk. Alur rekrutmen dan seleksi sumber rekrutmen internal dan eksternal diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai No. PP/S04/019-00/2020. Sementara itu, alur rekrutmen dan seleksi sumber rekrutmen Penugasan dari Perusahaan Induk mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Pegawai dari Perusahaan Induk ke BNI Syariah dan Penugasan Pegawai BNI Syariah ke Institusi Terhubung BNI Syariah No. PP/S04/011-00/2018 tanggal 20 Desember 2018 berserta perubahannya. [GRI 103-2]

Employee Routine Reviews and Career Paths

Tahun Year	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Peninjauan/Review Number of Employees Reviewed	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Results of the Assessment and Career Development Relevance		
		Promosi Promotion	Mutasi Mutation	Demosi Demotion
2018	3.304 (67% dari total karyawan = 4942) 3.304 (67% of total employees = 4942)	1.124	2.098	82
2019	2671 (47% dari total karyawan = 5723) 2.671 (47% of total employees = 5.723)	1.428	1.201	42
2020	2.921 (51% dari total karyawan = 5738) 2.921 (51% of total employees = 5.738)	1.507	1.349	65

Equal Opportunity to Work [F.18]

BNI Syariah respects and upholds the difference between people, both in terms of gender, class, ethnicity and race. In line with that, the Company is committed to treating all employees equally in terms of working opportunities, getting performance assessment, career advancement, competency development, remuneration and others. Based on this commitment, BNI Syariah has many female employees who hold important positions.

BNI Syariah commitment to implement equality, other than stipulated in the Collective Labor Agreement, also is a form of obedience to the Law No. 21 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, Employment Act No. 13 of 2003 concerning Manpower, and Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia).

Employee Recruitment and Turnover

Employee recruitment is an activity aimed at meeting the needs of new employees as stipulated in the BNI Syariah annual work plan. The recruitment process is a part of the Human Capital cycle which focuses on recruiting employees according to the qualifications and competencies set by the Company. [GRI 103-1]

Currently, there are three types of recruitment at BNI Syariah, namely internal, external recruitment, and assignments from the Parent Company. The flow of recruitment and selection of internal and external recruitment sources is regulated through the Employee Recruitment Implementation Guidelines No. PP/S04/019-00/2020. Meanwhile, the recruitment flow and selection of recruitment which originates from the assignments from the Parent Company refer to the Instructions for Implementing Employee Assignments from the Parent Company to BNI Syariah and Assignment of BNI Syariah Employees to BNI Syariah Connected Institutions No. PP/S04/011-00/2018 dated December 20, 2018 along with the amendments. [GRI 103-2]



Selama tahun 2020, BNI Syariah merekrut pegawai baru sebanyak 447 orang, turun dibandingkan tahun 2019, dengan rekrutmen sebanyak 1.069 orang. Penurunan rekrutmen sejalan dengan kondisi pandemi yang berdampak pada aspek bisnis dan efektifitas kinerja pegawai. Selain itu, kebijakan menahan laju rekrutmen juga dalam rangka efektivitas proses merger yang akan berlangsung di tahun 2021. Komposisi pegawai baru selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut: [GRI 103-3, 401-1]

In 2020, BNI Syariah recruited 447 new employees, a decrease compared to 2019, with a recruitment of 1,069 people. The decline in recruitment is in line with the pandemic conditions which have an impact on the business aspect and the effectiveness of employee performance. In addition, the policy of holding back the recruitment rate is also in the context of the effectiveness of the merger process which will take place in 2021. The complete composition of new employees is presented in the following tables: [GRI 103-3, 401-1]

Komposisi pegawai baru berdasarkan usia

Usia Age	2020	2019	2018
> 50 tahun	3	4	6
> 50 y.o.			
> 40-49 tahun	9	22	13
> 40-49 y.o.			
> 30-39 tahun	26	81	32
> 30-39 y.o.			
≤ 30 tahun	409	962	576
≤ 30 y.o.			
Total	447	1.069	627

Komposisi pegawai baru berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin Gender	2020	2019	2018
Laki-laki Male	222	500	289
Perempuan Female	225	569	338
Jumlah Total	447	1.069	627

Komposisi pegawai baru berdasarkan wilayah kerja

Wilayah Kerja Work Location	2020	2019	2018
Kantor Pusat Head Office	131	212	118
Kantor Wilayah/Cabang Branch/Regional Office	316	857	509
Jumlah Total	447	1.069	627

Selain bertambah melalui rekrutmen, jumlah pegawai BNI Syariah berkurang karena adanya pegawai yang meninggalkan Perseroan dengan alasan-alasan yang dibenarkan undang-undang. Jumlah pegawai yang meninggalkan BNI Syariah selama tahun 2020 tercatat sebanyak 418 orang, turun dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 452 orang. Penurunan terjadi karena tingkat kepuasan kerja yang meningkat. Komposisi pegawai yang meninggalkan Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut: [GRI 103-3, 401-1]

New employee composition based on work location

In addition to increase of number due to recruitment, the number of BNI Syariah employees has decreased due to employees leaving the Company for reasons justified by law. The number of employees who left BNI Syariah during 2020 was recorded at 418 people, a decrease compared to 2019, which reached 452 people. The decline occurred because the level of job satisfaction increased. The complete composition of employees leaving the Company is as follows: [GRI 103-3, 401-1]



Komposisi pegawai meninggalkan Perseroan berdasarkan usia

The composition of employees leaving the Company based on age

Usia Age	2020	2019	2018
> 50 tahun > 50 y.o.	3	6	8
> 40-49 tahun > 40-49 y.o.	33	28	21
> 30-39 tahun > 30-39 y.o.	131	145	109
≤ 30 tahun ≤ 30 y.o.	262	273	257
Total	418	452	395

Komposisi pegawai meninggalkan Perseroan berdasarkan jenis kelamin

The composition of employees leaving the Company based on gender

Jenis Kelamin Gender	2020	2019	2018
Laki-laki Male	234	245	207
Perempuan Female	184	207	188
Jumlah Total	418	452	395

Komposisi pegawai meninggalkan Perseroan berdasarkan wilayah kerja

The composition of employees leaving the Company based on work location

Wilayah Kerja Work Location	2020	2019	2018
Kantor Pusat Head Office	56	50	71
Kantor Wilayah/Cabang Branch/Regional Office	362	402	324
Jumlah Total	418	452	395

Ada enam penyebab yang membuat pegawai meninggalkan BNI Syariah, yaitu pensiun alami, pensiun dini, meninggal, mengundurkan diri, dan habis kontrak. Khusus bagi pegawai yang mengajukan pengunduran diri, sesuai Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada atasan minimum 1 bulan sebelumnya. Rincian penyebab pegawai mengundurkan diri disajikan pada tabel berikut: [GRI 103-3]

There are six reasons which make employees leave BNI Syariah, natural retirement, early retirement, death, resignation, and contract expiration. For employees who submit resignation, according to the Manpower Act 13, the resignation letter must be submitted to the supervisor at least 1 month in advance. Details of the reasons for employees resigning are presented in the following table: [GRI 103-3]

Penyebab pegawai meninggalkan Perseroan

The reasons employees leaving the Company

Keterangan Description	2020	2019	2018
Pensiun alami Natural retirement	10	5	3
Pensiun dini Early retirement	-	-	-
Meninggal Death	7	-	-



Keterangan Description	2020	2019	2018
Mengundurkan diri Resignation	285	384	298
Habis kontrak Contract expiration	50	48	80
Sebab lain Other reasons	66	15	12
Jumlah Pegawai Keluar Total of Employees Leaving the Company	418	452	395
Berdasarkan data pegawai yang masuk dan meninggalkan Perseroan, maka diperoleh angka turnover atau pergantian pegawai pada tahun 2020, yang angkanya semakin turun dari tahun ke tahun. Dalam laporan ini, turnover diartikan sebagai kecenderungan atau intensitas individu untuk meninggalkan organisasi dengan berbagai alasan dan di antaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, pegawai yang keluar karena pensiun normal atau meninggal tidak dihitung sebagai faktor tinggi atau rendahnya tingkat turnover di BNI Syariah.	Based on data from employees who enter and leave the Company, the number of employee turnover are obtained in 2020, of which number is decreasing from year to year. In this report, turnover is defined as the tendency or intensity of individuals to leave the organization for various reasons, and among them, the desire to get a better job. With this, employees who left the Company due to normal retirement or death is not counted as a factor in the high or low levels of turnover in BNI Syariah.		

Tabel Tingkat Turnover Pegawai

Keterangan Description	2020	2019	2018
Jumlah pegawai baru Total number of new employees	485	1.069	627
Jumlah pegawai meninggalkan Perseroan (mengundurkan diri, habis kontrak, dan sebab lain) Total Number of employees leaving the Company (resigned, expired contract, and other reasons)	401	447	390
Jumlah pegawai awal tahun Total Number of employees in the beginning of the year	5.723	4.942	4.737
Jumlah pegawai akhir tahun Total Number of employees at the end of the year	5.738	5.723	4.942
Tingkat Turnover Turnover Rate	1,47%	6,26%	7,07%

Walaupun pergantian karyawan merupakan hal yang lazim terjadi, BNI Syariah telah merumuskan kebijakan untuk menekan angka turnover, terutama pegawai yang meninggalkan Perseroan karena mengundurkan diri. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: [GRI 103-3]

1. Melakukan update range gaji pegawai dengan menyesuaikan data rata-rata gaji pada industri sejenis (lebih kompetitif);
2. Memberikan pendidikan pelatihan dan pengembangan pegawai sesuai dengan persyaratan kompetensi posisi jabatan (*training based competency*), sehingga pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya;

Although employee turnover is a common thing, BNI Syariah has formulated a policy to reduce turnover, especially on those who leave the Company due to resignation. The policy is as follows: [GRI 103-3]

1. Conducting an update on the salary range for employees by adjusting the data the average salary in similar industries (more competitive);
2. Providing training and employee development education in accordance with the competency requirements of the position (*training based competency*), so that employees have the ability according to the demands of their work;



3. Memberikan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya di luar gaji dengan mengacu kepada hasil *benchmark* dan *salary survey* pada industri sejenis.

3. Providing other additional facilities beyond salary by referring to the results of benchmarks and salary surveys in similar industries.

Tunjangan Pegawai Berdasarkan Status

Berdasarkan statusnya, Sumber Daya Insani sebagai penggerak kemajuan BNI Syariah terbagi menjadi empat, yaitu pegawai tetap, trainee, kontrak dan prohire. Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap jenis tunjangan yang diterimanya. Jenis tunjangan berdasarkan status pegawai selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 401-2]

Employee Benefits Based on Status

Based on their status, BNI Syariah's Human Capital as a driving force for the progress are divided into four, namely permanent employees, trainees, contracts and prohire. The difference in status affects the type of benefits they receive. Types of benefits based on employee status are presented in the following table: [GRI 103-3, 401-2]

Tabel Tunjangan Pegawai

Jenis Tunjangan Type of Benefits	Pegawai Tetap/ Permanen		Pegawai Trainee Trainees		Pegawai Kontrak Contract Employees		Pegawai Prohire Prohires	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Tunjangan Pensiun (DPLK) Pension Benefits (DPLK)	✓	-	-	✓	-	-	✓	-
Tunjangan Perumahan Housing	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
Kesehatan Health Benefits	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
Rekreasi Recreation	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
Tunjangan Kematian Death Allowance	✓	-	✓	-		✓	✓	-

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19]

BNI Syariah senantiasa tunduk terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan usia minimal dan jam kerja pekerja. Perseroan memastikan bahwa seluruh pegawai, baik pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, telah berusia di atas 18 tahun. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan rekrutmen pegawai (Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai, yang mensyaratkan setiap calon pegawai harus berusia minimal 18 tahun atau telah menamatkan jenjang pendidikan minimal D3.

Sementara itu, BNI Syariah telah menetapkan waktu kerja, yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan itu sesuai dengan pasal 77, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan ketentuan seperti itu, maka pegawai memiliki waktu istirahat yang cukup. Pengaturan jam kerja selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Jam Kerja Normal

Senin-Kamis: 08.00 s/d 17.00, istirahat 12.00 s/d 13.00
Jum'at: 07.30 s/d 17.00, istirahat 11.30 s/d 13.00

2. Jam Kerja Bulan Ramadhan

Senin-Kamis: 07.30 s/d 16.00, istirahat 12.00 s/d 12.30
Jum'at: 07.30 s/d 16.00, istirahat 11.30 s/d 12.30

Selain merupakan implementasi undang-undang ketenagakerjaan, ketentuan tentang usia pekerja di

Child Labor and Forced Labor [F.19]

BNI Syariah always complies with various labor regulations in Indonesia, including those relating to the minimum age and working hours. The Company ensures that all employees, both full time and part time employees, are over 18 years of age. This is in accordance with the employee recruitment policy (Employee Recruitment Implementation Guidelines, which require that every prospective employee must be at least 18 years old or have completed a minimum education level of Diploma III.

Meanwhile, BNI Syariah has set working hours, namely 8 (eight) hours 1 (one) day and 40 (forty) hours 1 (one) week for 5 (five) working days in 1 (one) week. This provision is in accordance with Article 77, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. With such provisions, employees have sufficient rest time. The complete working hour settings are as follows:

1. Normal Working Hours

Monday-Thursday: 08.00 to 17.00, break at 12.00 to 13.00
Friday: 07.30 to 17.00, break at 11.30 to 13.00

2. Working Hours of the Month of Ramadan

Monday-Thursday: 07.30 to 16.00, break at 12.00 to 12.30
Friday: 07.30 to 16.00, break at 11.30 to 12.30

In addition to the implementation of the labor law, provisions on worker's age at BNI Syariah aligned with the Law of the



BNI Syariah selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Sementara itu, pemberlakuan jam kerja dengan batasan waktu yang jelas sehingga tidak terjadi kerja paksa sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 *Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Ketaatan terhadap regulasi ketenagakerjaan dengan tidak mempekerjakan anak serta tidak ada kerja paksa membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif dan potensial terhadap praktik ketenagakerjaan di BNI Syariah. Selain itu, juga tidak terdapat sanksi, denda maupun pengaduan terkait kedua isu tersebut.

Upah Minimum Regional [F.20]

BNI Syariah senantiasa taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, termasuk mengenai upah atau gaji karyawan, khususnya terkait Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi. Dalam pemberian upah, Perseroan tidak membedakan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Upah yang diberikan BNI Syariah untuk karyawan tetap baru minimal sama dengan UMR. Namun demikian, upah tersebut masih ditambah dengan uang makan sehingga total uang yang diterima karyawan menjadi lebih tinggi dibanding UMR.

Tabel Upah Pegawai Dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2020

No.	Unit Usaha Business Units	Provinsi/ Daerah Province/Region	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest Level of Employee Fees	Percentase Percentage
1	KANTOR PUSAT	DKI JAKARTA	4.490.168	4.490.168	100%
2	YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	2.004.000	2.618.297	131%
3	PEKALONGAN	PEKALONGAN	2.072.000	2.618.297	126%
4	SEMARANG	SEMARANG	2.715.000	2.715.000	100%
5	MALANG	MALANG	3.018.275	3.018.275	100%
6	BANJARMASIN	BANJARMASIN	2.918.227	2.918.227	100%
7	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	4.490.168	4.490.168	100%
8	FATMAWATI	DKI JAKARTA	4.490.168	4.490.168	100%
9	BANDUNG	BANDUNG	3.623.779	3.623.779	100%
10	PADANG	PADANG	2.484.041	3.000.000	121%
11	MAKASSAR	MAKASSAR	3.191.572	3.191.572	100%
12	MEDAN	MEDAN	3.222.557	3.222.557	100%
13	PALEMBANG	PALEMBANG	3.165.519	3.165.519	100%

Republic of Indonesia No. 20 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 138 Concerning the Minimum Age for Admission to Employment, and Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2000 concerning Ratification of the ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition And Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. Meanwhile, the application of working hours with clear time limits ensures that forced labor does not occur is in line with Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labor.

Adherence to labor regulations by not employing children and no forced labor brings results in the absence of negative and potential impacts on labor practices at BNI Syariah. In addition, there are also no sanctions, fines or complaints regarding these two issues.

Regional Minimum Wage [F.20]

BNI Syariah always adheres to the applicable laws and regulations in the field of manpower, including regarding employee wages or salaries, particularly regarding the Provincial Minimum Wage (UMR). In providing wages, the Company does not differentiate based on gender. The wage given by BNI Syariah for new permanent employees is at least the same as UMR. However, this wage is still added with food allowance so that the total money received by employees is higher than the UMR.

Table of Employee Wages vs Provincial Minimum Wages in 2020



No.	Unit Usaha Business Units	Provinsi/ Daerah Province/Region	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest Level of Employee Fees	Percentase Percentage
14	BENDUNGAN HILIR	DKI JAKARTA	4.490.168	4.490.168	100%
15	SURABAYA	SURABAYA	4.494.513	4.494.513	100%
16	PEKANBARU	PEKANBARU	3.005.582	3.005.582	100%
17	CIREBON	CIREBON	2.219.488	3.000.000	135%
18	SURAKARTA	SURAKARTA	1.956.200	2.618.297	134%
19	BOGOR	BOGOR	4.169.807	4.169.807	100%
20	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	3.069.316	3.069.316	100%
21	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	4.490.168	4.490.168	100%
22	BUMI SERPONG DAMAI	TANGERANG SELATAN	4.828.884	4.828.884	100%
23	TANJUNGKARANG	TANJUNGKARANG	2.653.223	2.653.223	100%
24	KEDIRI	KEDIRI	2.060.925	2.618.297	127%
25	JEMBER	JEMBER	2.355.663	3.000.000	127%
26	BANDA ACEH	BANDA ACEH	3.200.000	3.200.000	100%
27	BEKASI	BEKASI	4.589.709	4.589.709	100%
28	BATAM	BATAM	4.130.279	4.130.279	100%
29	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	4.490.168	4.490.168	100%
30	CILEGON	CILEGON	4.521.081	4.521.081	100%
31	TANGERANG	TANGERANG	4.828.884	4.828.884	100%
32	DEPOK	DEPOK	4.202.106	4.202.106	100%
33	SAMARINDA	SAMARINDA	3.756.825	3.756.825	100%
34	PONTIANAK	PONTIANAK	2.596.644	3.000.000	116%
35	PURWOKERTO	PURWOKERTO	2.310.857	2.618.297	113%
36	SURABAYA DHARMAWANGSA	SURABAYA	4.494.513	4.494.513	100%
37	JAMBI	JAMBI	2.839.729	2.839.729	100%
38	DENPASAR	DENPASAR	2.770.300	2.770.300	100%
39	MATARAM	MATARAM	2.192.987	2.618.297	119%
40	BUKITTINGGI	BUKITTINGGI	2.484.041	3.150.000	127%
41	BENGKULU	BENGKULU	2.387.220	2.618.297	110%
42	KARAWANG	KARAWANG	4.594.325	4.594.325	100%
43	TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	2.264.093	3.000.000	133%
44	KUDUS	KUDUS	2.218.452	2.618.297	118%
45	PALANGKARAYA	PALANGKARAYA	2.931.674	3.000.000	102%
46	BANJARBARU	BANJARBARU	2.877.449	3.000.000	104%
47	PALU	PALU	2.620.988	3.000.000	114%
48	KENDARI	KENDARI	2.768.593	3.000.000	108%
49	SUKABUMI	SUKABUMI	2.534.799	3.000.000	118%
50	LHOKSEUMAWE	LHOKSEUMAWE	3.165.031	3.165.031	100%
51	PROBOLINGGO	PROBOLINGGO	2.319.797	3.000.000	129%



No.	Unit Usaha Business Units	Provinsi/ Daerah Province/Region	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Lowest Level of Employee Fees	Percentase Percentage
52	TANAH SAREAL	BOGOR	4.169.807	4.169.807	100%
53	VETERAN MAKASSAR	MAKASSAR	3.191.572	3.191.572	100%
54	TELUK BETUNG	LAMPUNG	2.653.223	2.653.223	100%
55	SURABAYA MERR	SURABAYA	4.494.513	4.494.513	100%
56	DINOYO	MALANG	3.018.275	3.018.275	100%
57	PANAM ARENGKA	RIAU	3.005.582	3.005.582	100%
58	KOTA BATURAJA	KOTA BATURAJA	3.043.111	3.043.111	100%
59	LUBUK LINGGAU	LUBUK LINGGAU	3.043.111	3.043.111	100%
60	ASTANA ANYAR	BANDUNG	3.623.779	3.623.779	100%
61	KM.12 PALEMBANG	PALEMBANG	3.165.519	3.165.519	100%
62	CAKRANEGERA	MATARAM	2.192.987	2.192.987	100%
63	KOTA JAMBI	KOTA JAMBI	2.839.729	2.839.729	100%
64	PANORAMA BENGKULU	BENGKULU	2.387.220	2.387.220	100%
65	MANDONGA KENDARI	KENDARI	2.768.593	3.000.000	108%
66	TERNATE	TERNATE	3.783.684	3.783.684	100%
67	BIMA	BIMA	2.229.880	2.356.467	106%
68	PALOPO	PALOPO	3.103.800	3.103.800	100%
69	PAREPARE	PAREPARE	3.103.800	3.103.800	100%
70	KANTOR WILAYAH TIMUR	SURABAYA	4.494.513	4.494.513	100%
71	KANTOR WILAYAH BARAT	BANDUNG	3.623.779	3.623.779	100%
72	KANTOR WILAYAH JABODETABEK PLUS	TANGERANG SELATAN	4.793.509	4.793.509	100%



MEWUJUDKAN LINGKUNGAN KERJA SEHAT DAN AMAN

REALIZING A HEALTHY AND SAFE WORKING ENVIRONMENT

Lingkungan kerja yang sehat dan aman sesuai kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu syarat untuk terwujudnya ketenangan kerja bagi segenap pegawai BNI Syariah. Perseroan meyakini bahwa ketenangan dan tiadanya kekhawatiran terjadi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja berkontribusi positif terhadap meningkatnya kinerja pegawai, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja BNI Syariah. [F-21]

Becermin pada besarnya manfaat lingkungan kerja yang sehat dan aman, maka Perseroan berkomitmen untuk mewujudkannya, baik di Kantor Pusat maupun kantor-kantor lainnya (kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas maupun kantor fungsional). Bagi BNI Syariah, upaya mewujudkan lingkungan kerja terbaik merupakan prioritas dengan tujuan akhir tercapainya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) serta tidak adanya penyakit akibat kerja. [GRI 103-1]

Komitmen BNI Syariah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain: [GRI 103-2]

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Perjanjian Kerja Bersama BNI Syariah Tahun 2019.

Pengelolaan K3

Per 31 Desember 2020, BNI Syariah belum memiliki divisi khusus terkait K3. Namun demikian, Perseroan telah mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja beserta cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas. Secara spesifik, ketentuan tentang K3 diatur dalam PKB tahun 2019 Bab XI Pasal 38 tentang Fasilitas Kesehatan. PKB yang berlaku saat ini telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.061/PHIJSK-PK/PKB/II/2019 tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Bank BNI Syariah Dengan Serikat Pekerja PT Bank BNI Syariah, tanggal 28 Februari 2019. Sesuai dengan ketentuan di dalam PKB tersebut, maka pelaksanaan K3 menjadi tanggung jawab bersama antara manajemen dan semua pegawai di lingkungan BNI Syariah. [GRI 03-3, 403-4]

A healthy and safe working environment which is in accordance with the principles of Occupational Health and Safety (OHS) is one of the requirements for realizing working comfort for all BNI Syariah employees. The Company believes that comfort and lack of worries regarding work accidents and occupational diseases contribute positively to improving employee performance, which in turn will have a positive impact on the performance of BNI Syariah. [F-21]

Reflecting on the great benefits of a healthy and safe work environment, the Company is committed to making it happen at the Head Office and other offices (branch offices, sub-branches, cash offices and functional offices). For BNI Syariah, efforts to create the best work environment are a priority with the ultimate goal of achieving zero accidents and the absence of occupational diseases. [GRI 103-1]

BNI Syariah's commitment to creating a healthy and safe work environment refers to a number of regulations which govern occupational health and safety, including: [GRI 103-2]

1. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety;
2. Law No. 23 of 1992 concerning Health;
3. Law No. 36 of 2009 concerning Health;
4. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
5. Presidential Decree No. 22 of 1993 concerning diseases arising from work relations;
6. Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 concerning the Occupational Safety and Health Management System;
7. BNI Syariah Collective Labor Agreement (PKB) 2019.

OHS Management

As of December 31, 2020, BNI Syariah did not have a special division related to OHS. However, the Company has identified the risk of work accidents and the way to manage them. Work accident risk management is managed according to the needs in the office and in the field when on duty. Specifically, the provisions on OHS are regulated in the CLA Chapter XI Article 38 2019 concerning Health Facilities. The current CLA has been ratified through the Decree of the Director General of Industrial Relations and Social Security for Workers No. KEP.061/PHIJSK-PK/PKB/II/2019 concerning Collective Labor Agreement between PT Bank BNI Syariah and PT Bank BNI Syariah Workers Union, February 28, 2019. In accordance with the provisions in the CLA, the implementation of OHS is a mutual responsibility between management and all employees in the BNI Syariah environment. [GRI 03-3, 403-4]



Untuk menekan risiko dan dampak akibat kecelakaan kerja, BNI Syariah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan kerja, antara lain: [GRI 103-3]

1. Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala;
2. Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran;
3. Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung;
4. Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung oksigen (O_2), kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (exit window);
5. Penyediaan mobil ambulan di kantor pusat (bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik);
6. Simulasi evakuasi kebakaran/bencana/gempa diadakan minimal sekali dalam setahun baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan pemeliharaan tabung gas kebakaran/Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alarm Gedung, Detektor Asap.

Selain keselamatan kerja, BNI Syariah meyakini bahwa kesehatan pegawai merupakan salah satu kunci utama agar pegawai dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja BNI Syariah. Untuk itu, BNI Syariah merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan pegawainya di samping pegawai itu sendiri. Oleh karena itu, BNI Syariah memfasilitasi pegawai dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing.

Tak hanya untuk pegawai, Perseroan juga memberikan fasilitas kesehatan bagi keluarga pegawai dengan ketentuan fasilitas kesehatan bagi anak adalah sampai 21 tahun bagi yang belum bekerja dan belum menikah. Khusus bagi anak masih sekolah, belum bekerja dan belum menikah adalah sampai dengan usia 25 tahun. Terkait dengan kesehatan kerja telah tercantum dalam PKB PT Bank BNI Syariah Periode 2019 pada Bab XI, Pasal 38 tentang Fasilitas Kesehatan. [GRI 103-3, 403-4]

Selama tahun 2020, kegiatan yang diselenggarakan BNI Syariah berhubungan dengan kesehatan kerja antara lain: [GRI 103-3]

1. Medical check up dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahun dan diikuti oleh pegawai;
2. Pengobatan non rutin, rawat inap, gigi & mata, pengobatan pekerja Kantor Pusat ke daerah, dan tunjangan pengobatan non rutin untuk keperluan rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

Di luar dua kegiatan di atas, terkait dengan kesehatan pegawai, BNI Syariah memberikan fasilitas dan benefit kepada pegawai dan keluarganya, antara lain:

1. Fasilitas kesehatan berkala;
2. Medical Check Up;
3. Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kacamata, alat bantu dengar, pemeriksaan laboratorium dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap;
4. Memberikan fasilitas beberapa komunitas pegawai yang sebagian besar di antaranya berkaitan dengan dunia olahraga, yaitu:

To reduce the risks and impacts due to work accidents, BNI Syariah conducts activities related to handling work accidents, including: [GRI 103-3]

1. Training and providing information on evacuation from multi-storey buildings regularly;
2. Basic training in using fire extinguishers;
3. Training attended by building security workers to rescue victims from inside the building;
4. Fully equipped facilities with adequate and relevant basic safety equipment, including oxygen cylinders (O_2), First Aid Medication Boxes (P3K), and emergency slide (sliding ladder) on exit windows;
5. Provision of an ambulance at the head office (in collaboration with the Hasanah Titik Foundation);
6. Fire/disaster/earthquake evacuation simulations are held at least once a year at both the Head Office and Branch Offices and maintenance of gas fire cylinders/light fire extinguishers (APAR), building alarms, smoke detectors.

In addition to work safety, BNI Syariah believes that employee health is one of the main keys thereby employees can make an optimal contribution to the performance of BNI Syariah. For this reason, BNI Syariah perceives that the Company has a responsibility to maintain the health of its employees besides the employee itself. Therefore, BNI Syariah facilitates employees with several activities that are expected to raise awareness and motivation in maintaining their respective health.

Not only for employees, the Company also provides health facilities for employees' families with the provision that health facilities for children are up to 21 years old for those who are not working and are not married. Especially for children who are still in school, not working and unmarried, is until the age of 25. Regarding occupational health, it has been listed in the 2019 CLA of PT Bank BNI Syariah in Chapter XI, Article 38 concerning Health Facilities. [GRI 103-3, 403-4]

In 2020, activities organized by BNI Syariah related to occupational health include: [GRI 103-3]

1. Medical check up held once a year and followed by the employees;
2. Non-routine medical treatment, inpatient care, dental & eye care, treatment for Head Office workers to the regions, and non-routine medical allowances for outpatient care for the first level and for the advanced level.

Apart from the two activities above, related to employee's health, BNI Syariah provides facilities and benefits to employees and their families, including:

1. Periodic health facilities;
2. Medical Check Up;
3. Medical facilities, namely guaranteed reimbursement of hospitalization costs, outpatient care after leaving the hospital, maternity costs, dental care costs, replacement of glasses, hearing aids, laboratory examinations and other medical treatments recommended by doctors after being hospitalized;
4. Providing facilities for several employee communities, most of which are related to the sports, namely:



- a. Hasanah Basketball Club;
- b. Hasanah Futsal Club;
- c. Hasanah Rider Community;
- d. Hasanah Cycling Club;
- e. Hasanah Adventure Club;
- f. Hasanah Golfer;
- g. Senam;
- h. Hasanah Runners;
- i. Hasanah Fishing Community;
- j. Hasanah Volley Club;
- k. Free Latics;
- l. Perjaka Hasanah;
- m. Hasanah Archery Club;
- n. Lensa Hasanah.

Work Life Balance

Pada tahun 2020, pegawai BNI Syariah masih didominasi oleh pegawai milenial dengan usia di bawah 30 tahun. Dengan kondisi seperti itu, maka Perseroan dituntut untuk menyesuaikan diri sehingga setiap pegawai mampu mengeluarkan potensi dan memberikan kinerja terbaik untuk BNI Syariah. Untuk itu, Divisi Sumber Daya Insani mengeluarkan himbauan penerapan gaya hidup sehat untuk seluruh pegawai. Dalam hal ini, *Work Life Balance* menjadi issue yang cukup dominan pada pegawai milenial. Sosialisasi isu tersebut terus dilakukan dengan harapan setiap pegawai peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan kerja dengan melakukan hal-hal berikut: [GRI 103-3]

1. Berolahraga secara rutin minimal satu minggu sekali yang dapat diinisiasi oleh unit kerja masing-masing atau aktif pada komunitas olahraga di BNI Syariah, seperti Hasanah Runner, Hasanah Cycling, Hasanah Basketball, Hasanah Futsal, Persatuan Pejalan Kaki (Perjaka) Hasanah, dan lainnya;
2. Menerapkan hal sederhana namun cukup bermanfaat untuk kesehatan jantung, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas tangga kantor secara rutin;
3. Menjaga pola makan dan memperhatikan kandungan gizi di dalamnya;
4. Membatasi jumlah lembur sesuai ketetuan, dan hal ini agar menjadi concern dan pantauan unit kerja masing-masing.

Kinerja K3 Tahun 2020

Komitmen dan kesadaran kolektif segenap insan BNI Syariah terhadap implementasi K3 di semua lini membawa hasil dengan terwujudkan jumlah kecelakaan kerja tercatat nihil (*zero accident*) selama tahun 2020. Selain itu, tidak dilaporkan adanya penyakit yang dialami pekerja yang disebabkan oleh jenis pekerjaan yang dijalani sehari-hari atau penyakit akibat kerja. [GRI 103-3, 403-2]

- a. Hasanah Basketball Club;
- b. Hasanah Futsal Club;
- c. Hasanah Rider Community;
- d. Hasanah Cycling Club;
- e. Hasanah Adventure Club;
- f. Hasanah Golfer;
- g. Gymnastics;
- h. Hasanah Runners;
- i. Hasanah Fishing Community;
- j. Hasanah Volley Club;
- k. Free Latics;
- l. Perjaka Hasanah (Hasanah Pedestrian Association);
- m. Hasanah Archery Club; and
- n. Lensa Hasanah.

Work Life Balance

In 2020, BNI Syariah employees are still dominated by millennial employees under the age of 30. With such conditions, the Company is required to adjust itself thereby every employee is able to release their potential and provide the best performance for BNI Syariah. For this reason, the Human Resources Division has issued an appeal for the adoption of a healthy lifestyle for all employees. In this case, Work Life Balance is a fairly dominant issue for millennial employees. The dissemination of this issue continues with the hope that every employee cares about personal health and the work environment by doing the following: [GRI 103-3]

1. Exercising regularly at least once a week which can be initiated by each work unit, or being active in the sports community at BNI Syariah, such as Hasanah Runner, Hasanah Cycling, Hasanah Basketball, Hasanah Futsal, Hasanah Pedestrian Association (Perjaka), and others;
2. Implementing simple but quite beneficial things for heart health, namely by utilizing the office staircase facilities regularly;
3. Maintaining a diet and paying attention to the nutritional content of their food;
4. Limiting the amount of overtime according to the provisions, and this is to become a concern and monitoring of each work unit.

OHS Performance 2020

The commitment and collective awareness of all BNI Syariah personnel to the implementation of OHS at all lines has resulted in the realization of zero accidents during 2020. In addition, there are no reports of illnesses experienced by workers which caused by the type of work they are undertaking daily or diseases caused by work. [GRI 103-3, 403-2]



MEMBANGUN KEPEDULIAN UNTUK SESAMA

DEVELOPING EMPATHY



BNI Syariah mendukung perubahan paradigma lama *greedy economy* menjadi *green economy*, sebagaimana nota kesepahaman *green banking* yang ditandatangani Bank Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dua dekade lalu. *Greedy economy* adalah konsep ekonomi yang fokusnya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan GDP, melakukan eksplorasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada utang. Sementara itu, *green economy* merupakan konsep ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P (*people, profit, planet*), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi semua pihak. [GRI 103-1]

Sejalan dengan konsep *green economy*, maka BNI Syariah secara konsisten mewujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017, TJS adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lebih dari itu, dengan mengusung Hasanah sebagai corporate campaign, BNI Syariah juga menjadi sarana untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak yang disebut dengan Hasanah Way. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah menjadi mitra yang Hasanah atau Hasanah Banking Partner dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi rahmat bagi semesta alam atau *rahmatan lil 'alamiin*. [GRI 103-2]

Perseroan meyakini, penerapan TJS akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara BNI Syariah dengan pemangku kepentingan, terutama masyarakat di sekitarnya. Sejalan dengan itu, Perseroan terus berupaya

BNI Syariah supports a change in the old paradigm of greedy economy into a green economy, as in the green banking memorandum of understanding signed by Bank Indonesia with the Ministry of Environment two decades ago. Greedy economy is an economic concept whose focus is limited to economic growth as assessed through GDP growth, exploitation of natural resources, and economic activities that rely on debt. Meanwhile, green economy is an economic concept by taking into account the balance of the 3Ps (people, profit, planet), protection and management of natural wealth, as well as the participation of all parties. [GRI 103-1]

In line with the green economy concept, BNI Syariah consistently embodies Social and Environmental Responsibility (TJS). In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017, TJS is a commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and a beneficial environment, both for the Company itself, the local community, and society in general. More than that, by carrying out the concept of 'Hasanah' as a corporate campaign , BNI Syariah provides means to prepare for life in the hereafter which is called the 'Hasanah Way'. The noble aspiration to be conveyed through the value of Hasanah is the presence of BNI Syariah to be a good partner or Hasanah Banking Partner which can bring good to all parties and be a blessing for the universe or *rahmatan lil 'alamiin*. [GRI 103-2]

The Company believes that the implementation of TJS will create a mutually beneficial relationship between BNI Syariah and stakeholders, especially with the surrounding



agar keberadaannya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan sesuai dengan visi pertama BNI Syariah, yakni "Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan." Untuk meningkatkan manfaat yang diterima oleh masyarakat, BNI Syariah mengemasnya melalui berbagai program pengembangan sosial dan kemasyarakatan dalam wadah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Dalam pelaksanaan CSR, Perseroan berusaha untuk melibatkan masyarakat lokal agar program-program pemberdayaan sosial masyarakat menjadi lebih tepat sasaran.

Pengelola Program CSR

Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik atau dikenal dengan sebutan Yayasan Hasanah Titik (YHT) merupakan lembaga yang mendapat amanah dari BNI Syariah dalam menerima, mengelola maupun menyalurkan ZISWAFAF dari pegawai, perusahaan, maupun masyarakat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang termasuk dalam delapan *assnaf* yaitu fakir, miskin, *amil*, *riqaf* (hamba sahaya), *mu'allaf*, *gharim* (orang yang terlilit utang), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

**إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ**

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Yayasan Hasanah Titik dibentuk dan disahkan dalam akta Notaris pada 20 Agustus 2014. YHT membantu dalam pengelolaan CSR BNI Syariah dengan mengacu pada penyaluran sesuai peruntukan penyaluran ZISWAFAF dan menjadi mitra dalam membantu program literasi keuangan Syariah.

Untuk menjaga transparansi dan kredibilitasnya, sejak tahun 2015 YHT menggunakan jasa auditor independen untuk menilai kinerja keuangan dan kinerja ketepatan penyaluran program sosial yang menggunakan dana zakat. Hingga tahun 2019, YHT selalu memperoleh opini wajar dalam semua hal material.

Saat ini Yayasan Hasanah Titik mendapatkan amanah mengelola Zakat, *Infaq*, Sedekah dan Wakaf. Dan dalam pengelolaannya telah memiliki legalisasi yang terpisah sesuai tata kelolaan pada Kementerian Agama. YHT telah mendapat sertifikasi sebagai badan pengelola wakaf atau *nazir* pada bulan September 2019, dan diharapkan untuk kelolaan zakat sebagai Lembaga Zakat Nasional (LAZ) dapat segera diperoleh diwaktu mendatang, sehingga bisa sejajar dengan badan LAZ Nasional lainnya. Berikut Struktur Organisasi Yayasan Hasanah Titik di tahun 2020.

community. In line with that, the Company continues to strive for its existence to bring maximum benefits to society and the environment in accordance with the first vision of BNI Syariah, which is "Making a positive contribution to society and caring for environmental sustainability." To increase the benefits received by the community, BNI Syariah packages it through various social and community development programs in the form of Corporate Social Responsibility (CSR). In implementing CSR, the Company seeks to involve local communities so that community social empowerment programs become more targeted.

CSR Program Management

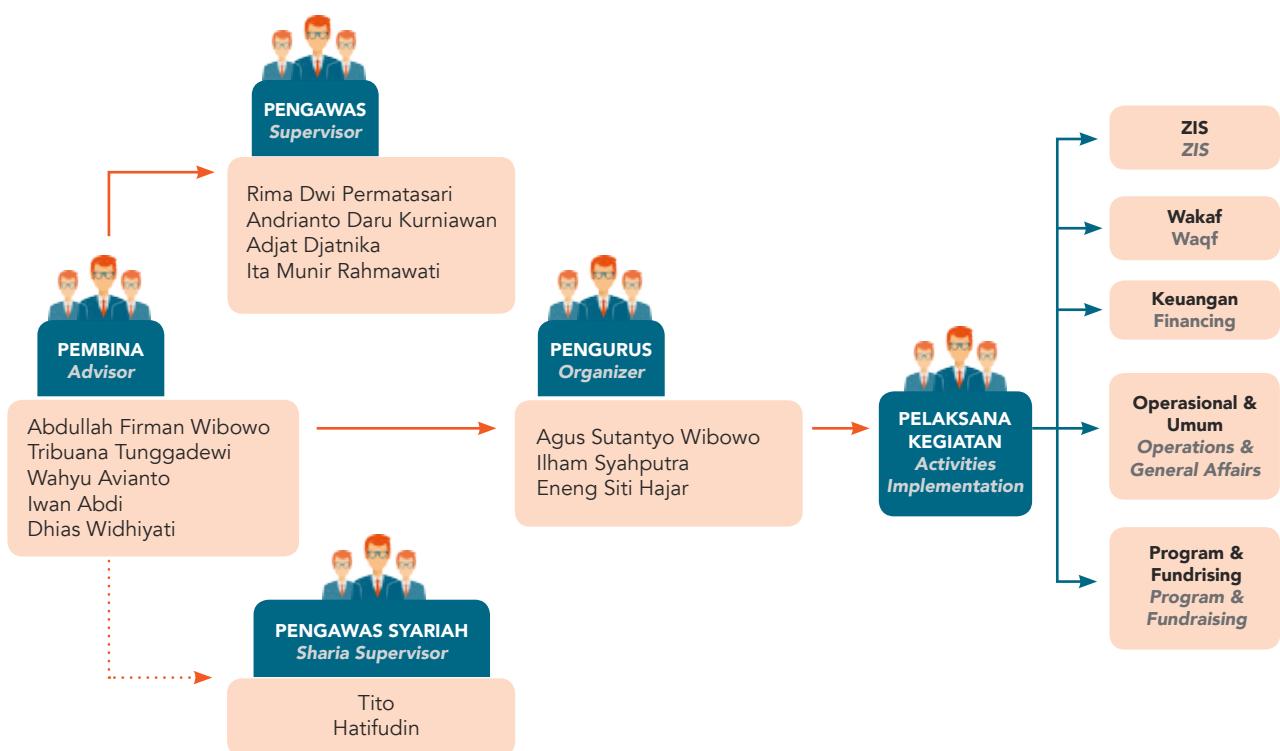
The 'Insan Hasanah Mulia Titik' Foundation or known as the 'Hasanah Titik' Foundation (YHT) is an institution that has received the mandate from BNI Syariah in receiving, managing and distributing ZISWAFAF from employees, companies, and the community to be distributed to parties in need which are included in the eight *assnaf* namely The Fakir, the poor, *amil*, *riqaf* (slave), *muallaf* (converts), *gharim* (people who are in debt), *fisabilillah*, and *ibn sabil* (people who are on a journey) as stipulated in the Al Quran surah At-Taubah verse 60.

"Truly, zakat is only for the fakir, the poor, the administrators of zakat, the converts who are persuaded by their hearts, to (free) slaves, people in debt, for the way of Allah and for them who was on the way, as a decree which Allah obliged, and Allah is All-Knowing, Most Wise."

Hasanah Titik Foundation was formed and legalized in a Notary deed on August 20, 2014. YHT assists in the management of BNI Syariah CSR by referring to the distribution according to ZISWAFAF distribution designation and becomes a partner in helping the Sharia financial literacy program.

To maintain transparency and credibility, since 2015, YHT has used the services of independent auditors to assess financial performance and the accuracy of social program distribution using zakat funds. Until 2019, YHT always obtained a 'present fairly, in all material respects' opinion.

Currently Hasanah Titik Foundation is entrusted with managing Zakat, *Infaq*, Alms and *Waqf*. In its management, it has a separate legalization according to the management at the Ministry of Religion. YHT has received certification as a *waqf* or *nazir* management body in September 2019, and it is hoped that zakat management as a national zakat institution (LAZ) can be obtained in the future, so that it can be on par with other National LAZ agencies. The following is Hasanah Titik Foundation Organizational Structure in 2020.



Tujuan YHT:

- Mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
- Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
- Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;
- Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara;
- Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
- Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

YHT's goals:

- End all forms of poverty;
- End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture;
- Ensure a healthy life and improve the welfare of people of all ages;
- Ensure a fair and inclusive quality of education and increase lifelong learning opportunities for all;
- Achieve gender equality and empower women and girls;
- Ensure availability and sustainable management of water and sanitation;
- Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy;
- Promote equitable and sustainable economic growth, full and productive employment opportunities, and decent work for all;
- Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and encourage innovation;
- Reduce inequality within and between countries;
- Make cities and human settlements fair, equitable, safe, resilient and sustainable;
- Ensure sustainable production and consumption patterns;
- Take urgent action to combat climate change and its impacts;
- Conserve oceans, seas and marine resources in a sustainable manner for sustainable development;
- Protect, restore and enhance the sustainable use of terrestrial ecosystems, manage forests, combat desertification, and stop and restore land degradation, and stop the loss of biodiversity;



- Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Strategi dan Program Kerja Dalam Menangani Isu-Isu Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan

- Promote an inclusive and peaceful society for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels;
- Strengthen the means of implementation and revitalize global partnerships for sustainable development.

Strategi dan Program Kerja Dalam Menangani Isu-Isu Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan

Dalam menyusun dan menjalankan program kerjanya, YHT berlandaskan pada 5 prinsip utama, yaitu Maqoshid Syariah, Pengelolaan Zakat, Creating Shared Value, Sustainable Livelihood dan Sustainable Development Goal's.

Strategies and Work Programs in Handling Social, Economic and Environmental Issues

In compiling and implementing its work program, YHT refers to 5 main principles, namely Maqosid Sharia, Zakat Management, Creating Shared Value, Sustainable Livelihood, and Sustainable Development Goal's.



- | | |
|----------|--|
| 1 | <i>Maqoshid Syariah</i> |
| 2 | <i>Pengelolaan Zakat</i>
<i>Zakat Management</i> |
| 3 | <i>Sustainable Livelihood &</i>
<i>Sustainable Development Goal's</i> |
| 4 | <i>Creating Share Value</i> |

Bagan di atas merupakan dasar acuan pengembangan program sosial berkelanjutan yang dijalankan BNI Syariah tahun 2020, yaitu:

1. **Maqoshid Syariah** Bahwa tujuan utama penerapan maqoshid syariah dalam pengembangan program sosial BNI Syariah adalah dalam upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada individu setiap manusia terpenuhi, yaitu:

The chart above is the basis for the development of sustainable social programs carried out by BNI Syariah in 2020, namely:

1. **Maqoshid Syariah** The main purpose of implementing maqoshid sharia in the development of BNI Syariah social programs is to maintain the human values inherent in each individual human being, namely:



- a. Penjagaan terhadap kodrat kehambaan setiap individu (muslim) untuk selalu beribadah melalui syariat-syariat agama yang ditentukan;
 - b. Penjagaan terhadap kesehatan jiwa yang diimplementasikan dalam rangka memenuhi hak setiap individu (muslim) mendapatkan hidup yang terhormat dan terjaga dari kondisi yang membahayakan jiwa;
 - c. Penjagaan terhadap jaminan keberlangsungan keturunan dan membentuk generasi yang lebih baik;
 - d. Penjagaan terhadap hak kepemilikan harta setiap individu yang baik dan halal;
 - e. Penjagaan terhadap hak dasar atas pendidikan dalam arti umum dan khusus sehingga akal dan kecerdasan sebagai manusia bermanfaat untuk menjauhi hal-hal buruk dan membawa keberkahan sebagai manusia.
2. Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Penerapan komitmen sosial perusahaan dan pegawai BNI Syariah yang diimplementasikan dengan alokasi anggaran ZISWAF Perusahaan dan pribadi pegawai menjadi salah satu dasar utama penyaluran anggaran yang berorientasi pada 8 (delapan) golongan/asnaf. Yaitu fakir miskin, *mu'allaf*, *amil*, *gharimin*, *fii sabillah*, *ibnu sabil* dan *riqob/budak*;
 3. CSV (Creating Shared Value) Perubahan konsep CSR yang seringkali berfungsi hanya sebagai pemoles untuk mempercantik citra Perusahaan kearah pembangunan bisnis dan pembangunan sosial yang selaras sebenarnya telah diterapkan BNI Syariah. Konsep *social finance* adalah upaya menyelaraskan bisnis dan pembangunan sosial masyarakat menjadi satu kesatuan. Memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan bukanlah pekerjaan sampingan, tapi haruslah *embedded* di dalam jantung strategi Perusahaan;
 4. Sustainable Livelihood Ukuran keberhasilan sebuah program sosial yang dibangun BNI Syariah di setiap lokasi binaan adalah pemenuhan terhadap SDM yang baik, SDA yang terjamin, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, akses terhadap modal yang baik serta kondisi sosial di masyarakat yang saling melengkapi;
 5. SDG's (Sustainable Development Goal's) Empat poin penting utama dari 17 hal yang ingin dicapai dari SDG's adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang selaras dengan konsep pengelolaan zakat dan konsep syariah, yaitu pengakhiran kemiskinan, kelaparan, pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk setiap individu.

Prioritas Target Penerima Program

BNI Syariah telah menetapkan beberapa target yang menjadi prioritas dari program sosial yang dijalankan Perseroan. Namun pada Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang dialami di seluruh dunia, di negeri kita Indonesia juga mengalami bencana non alam ini hingga mengakibatkan efek kerugian pada kesehatan masyarakat, ekonomi, Pendidikan dan sosial. Atas hal demikian BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik fokus penyaluran bantuan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain: [F.23][F.25] [GRI 103-3, 203-1]

- a. Safeguarding the nature of the servitude of each individual (Muslim) to always worship through the prescribed religious laws;
 - b. Safeguarding mental health which is implemented in order to fulfill the rights of every individual (Muslim) to get an honorable life and be protected from life-threatening conditions;
 - c. Safeguarding the guarantee of the continuity of the offspring and forming a better generation;
 - d. Safeguarding the property rights of every individual that is good and lawful;
 - e. Safeguarding the basic right to education in a general and specific sense so that reason and intelligence as human beings are useful to avoid negative things and bring blessings as humans.
2. Zakat Law No. 23 of 2011 concerning Zakat management. The implementation of corporate social commitment and employees of BNI Syariah which is implemented with ZISWAF budget allocations for companies and employees' personal is one of the main bases for budget distribution oriented to 8 (eight) *asnaf* groups, namely the fakir, the poor, converts, *amil*, *gharimin*, *fii sabillah*, *ibn sabil*, and *riqob* (slave);
 3. CSV (Creating Shared Value) Changes in the CSR concept, which often functions only to polish the Company's image, towards uniform business development and social development, has actually been conducted by BNI Syariah. The concept of social finance is an effort to align business and social development in society into one unit. Providing solutions to economic, social and environmental problems is not a side job it must be embedded at the heart of the Company's strategy;
 4. Sustainable Livelihood The measure of the success of a social program built by BNI Syariah in each target location is the fulfillment of good human resources, guaranteed natural resources, adequate facilities and infrastructure, access to good capital, and complementary social conditions in the community;
 5. SDG's (Sustainable Development Goals) The four main points of the 17 goals to be achieved from SDG's are the fulfillment of basic needs that are in line with the concept of zakat management and the concept of maqoshid sharia, namely ending poverty, ending hunger, fulfilling proper education and health for each individual.

Priority Target Recipients of the Program

BNI Syariah has set several targets which are the priority of the social programs implemented by the Company. However, in 2020, the Covid-19 pandemic broke out all over the world. Our country, Indonesia, also experienced this non-natural disaster which resulted in adverse effects on public health, economy, education and social. For this reason, BNI Syariah together with the Hasanah Titik Foundation focused on the assistance in overcoming these problems, which include: [F.23] [F.25] [GRI 103-3, 203-1]



1

Peduli Pandemi Covid-19

- Rapid & Swab Test: 443 orang
- Penyemprotan Disinfectant: 20 lokasi
- Pelatihan Satgas Covid-19: 60 orang
- Layanan Kesehatan BNI Syariah: Maret-Desember 2020
- Pengadaan Herbal: 1.100 botol
- Mobil Ambulan: 1 unit

2

Alat Pelindung Diri

- Masker: 21.198 pcs
- Disinfektan: 678 pcs
- Handsanitizer: 698 pcs
- Sarung Tangan: 822 pcs
- Baju Hazmat: 726 pcs
- Face Shield: 368 pcs
- Handwash Portable: 33 pcs

3

Tebar Hasanah/

- Tetanggaku Hasanahku: 3.100 orang
- Dapur Hasanah: 4.400 orang
- Infaq Beras Umat (IBU) Hasanah: 4.000 orang
- Santunan Ojol: 1.450 orang
- Santunan Pensiunan BNI: 1.600 orang
- Santunan Pensiunan BNI Syariah: 29 orang
- Santunan Pensiunan Pegawai Dasar: 7 orang
- Sedekah Wifi: 50 Masjid
- Ketahanan Pangan Berbasis Pesantren: 5 pesantren

4

Ramadhan Hasanah

- Kisah Cinta Hasanah: 3.182 orang 198 lembaga
- Takjil Hasanah: 34.902 orang 543 lembaga
- Dapur Ramadhan: 11.600 orang 46 lembaga

5

Kurban Hasanah Nusantara

- 22.915 orang 91 lembaga

Care for Covid 19 Pandemic

- Rapid & Swab Test : 443 People
- Disinfectant Spraying : 20 locations
- Training of Covid-19 Task Force : 60 People
- BNIS Health Service: March-December 2020
- Herbal Medication : 1.100 bottles
- Ambulance : 1 unit

Personal Protective Equipment

- Mask: 21.198 pcs
- Disinfektan: 678 pcs
- Handsanitizer: 698 pcs
- Gloves: 822 pcs
- Hazmat Suit: 726 pcs
- Face Shield: 368 pcs
- Handwash Portable: 33 pcs

Spreading Hasanah/Goodness

- Tetanggaku Hasanahku : 3.100 people
- Dapur Hasanah : 4.400 people
- Infaq Beras Umat (IBU) Hasanah : 4.000 people
- Santunan Ojol (Online Drivers/Riders Compensation) : 1.450 people
- Compensation for BNI Retirees : 1.600 people
- Pension Compensation for BNI Syariah : 29 people
- Basic Employee Retirement Compensation : 7 people
- Wifi Provision : 50 Mosque
- Islamic Boarding School Based Food Security: 5 Islamic boarding schools

Ramadhan Hasanah

- Kisah Cinta Hasanah (Hasanah Love Story): 3,182 people and 198 institutions
- Takjil Hasanah (Provision of food to break the fast): 34,902 people and 543 institutions
- Ramadan Kitchen: 11,600 people and 46 institutions

Hasanah Nusantara Animal Sacrificing

- 22,915 people and 91 institutions





Pilar Program YHT

Agar lebih fokus dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan Hasanah Titik bersama BNI Syariah telah menetapkan program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka 5 (lima) bidang, yaitu Ekonomi, Dakwah, Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial.

YHT Program Pillars

To be more focused in carrying out its activities, Hasanah Titik Foundation, in collaboration with BNI Syariah, has established community empowerment programs within the framework of 5 (five) sectors, namely Economy, Da'wah, Health, Education, and Social Affairs.

 Ekonomi	Bertujuan meningkatkan <i>income</i> penerima zakat berbasis pesantren maupun umum, seperti menambah <i>skill</i> produksi dan perdagangan, bantuan modal kerja, bantuan pelunasan hutang rentenir, pengembangan peternakan pertanian Aim to increase the income of zakat recipients based on pesantren (Islamic boarding school) and general public, such as increasing production and trade skills, working capital financial aid, loan repayment assistance from loan sharks, developing agricultural livestock
 Dakwah	Bertujuan untuk membantu dakwah dan peningkatan aqidah baik sarana fisik dan non fisik bagi para pejuang agama Islam Aiming to help da'wah (preach) and improve aqidah (creed) both physical and non-physical facilities for Islamic figures
 Kesehatan	Bertujuan untuk membantu para pihak 8 asnaf untuk biaya kesehatan, pengobatan dan membantu santunan alat bantu penunjang cacat fisik Aims to assist the 8 asnaf for health costs, medical expenses, and help support aids for physical disabilities
 Pendidikan	Bertujuan membantu meningkatkan kapasitas pendidikan siswa dan lembaga pendidikan. Bantuan berupa Beasiswa Pegawai Dasar internal dan mitra lembaga sosial serta bantuan prasarana lembaga pendidikan khususnya universitas Aims to help improve the educational capacity of students and educational institutions. Assistance in the form of scholarships for internal employees and social institution partners as well as infrastructure assistance for educational institutions, especially universities
 Sosial	Bertujuan untuk membantu para pihak korban bencana alam, dan permasalahan kebutuhan hidup sosial lainnya Aims to assist the victims of natural disasters and other social needs

Biaya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Untuk menjalankan program kerjanya, Yayasan Hasanah Titik memiliki anggaran yang diperoleh dari zakat, *infaq*, *shodaqoh* dan wakaf di lingkungan BNI Syariah dan masyarakat. Guna memenuhi kaidah hukum pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang, Yayasan Hasanah Titik menggandeng Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai Mitra. Kerja sama ini dilakukan untuk tahun 2020-2021. Hal ini yang menegaskan bahwa secara hukum pengelolaan zakat keluarga besar BNI Syariah dan masyarakat umum oleh Yayasan Hasanah Titik sah secara hukum.

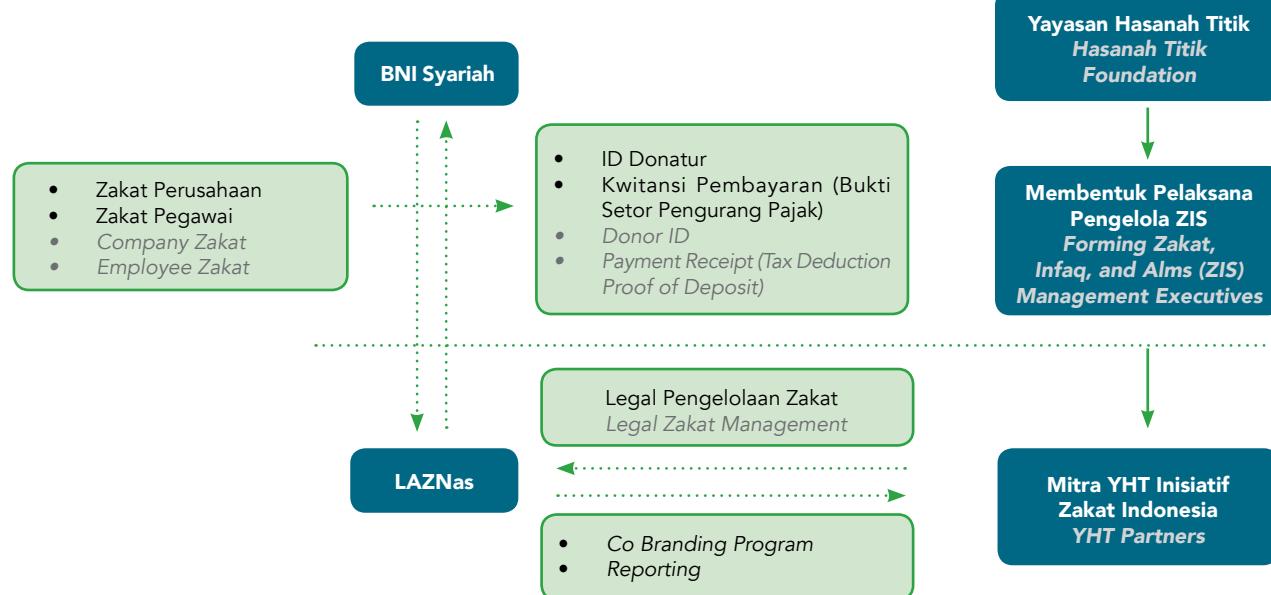
Costs of Social and Environmental Responsibility Program

To carry out its work program, the Hasanah Titik Foundation has a budget obtained from zakat, *infaq*, *shodaqoh* and waqf within the BNI Syariah environment and the community. In order to comply with the legal principles of zakat management in accordance with the law, Hasanah Titik Foundation partners with the National Zakat Institute (LAZNAS) Indonesian Zakat Initiative (IZI). This cooperation is carried out for the years 2020-2021. This confirms that legally the management of zakat on the large family of BNI Syariah and the general public by the Hasanah Titik Foundation is legally valid.



Pengelolaan zakat Perusahaan yang digunakan sebagai dana CSR diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dan selanjutnya melalui Surat BNI Syariah No. FND/PP/280520/089, BNI Syariah melimpahkan Dana Zakat Perusahaan tahun 2019 kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui Yayasan Hasanah Titik untuk mengelola Dana Zakat Perseroan ke dalam program-program pemberdayaan yang bersifat langsung maupun jangka panjang, dan bersinergi dengan Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan yang membawahi unit CSR. Berikut gambaran pola kerja sama pengelolaan zakat Perusahaan dan zakat pegawai oleh Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik:

Penyaluran Dana Zakat BNI Syariah



Tahun 2020, YHT mengelola dana sejumlah Rp34.045.326.856 dengan rincian sebagai berikut: [F.23][F.25] [GRI 103-3, 203-1]

Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana kelolaan Yayasan Hasanah Titik tahun 2020

In 2020, YHT managed funds amounting to IDR 34,045,326,856 with the following details: [F.23][F.25] [GRI 103-3, 203-1]

Recapitulation of receipts and distribution of funds under the management of the Hasanah Titik Foundation in 2020

PENERIMAAN RECEPTION	
PENERIMAAN ZAKAT ZAKAT RECEIVED	
Zakat Perusahaan BNI Syariah BNI Syariah Company Zakat	20.010.208.614
Zakat Pegawai BNI Syariah BNI Syariah Employees' Zakat	13.114.076.332
Zakat Individu/Lembaga Lainnya Other Individual / Institutional Zakat	355.634.995
Penerimaan Bagi Hasil Profit Sharing Receipt	60.817.729
Penerimaan Lainnya Other Receipts	504.589.186
JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT TOTAL ZAKAT RECEIVED	34.045.326.856



PENYALURAN DISTRIBUTION

PENYALURAN ZAKAT DISTRIBUTION OF ZAKAT

Bidang Ekonomi Economics Sector	305.000.000
Bidang Dakwah Da'wah	2.314.782.032
Bidang Kesehatan Health Sector	2.093.990.253
Bidang Pendidikan Educational Sector	4.328.916.118
Bidang Sosial Social Sector	9.438.048.878
Total	18.480.737.281

PENYALURAN ZAKAT LAINNYA OTHER DISTRIBUTION OF ZAKAT

Kerjasama Inisiatif Zakat Indonesia Collaboration with the Indonesian Zakat Initiative	4.047.014.337
Hak Amil Zakat Administrator's Right	3.230.077.110
Biaya Administrasi Rekening Bank Bank Account Administration Fee	12.578.555
Total	7.289.670.002
JUMLAH PENYALURAN ZAKAT TOTAL DISTRIBUTION OF ZAKAT	25.770.407.283

Tiga Prinsip Utama Program CSR

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan kemasyarakatan dilakukan sepenuhnya oleh Yayasan Hasanah Titik (YHT) sesuai arahan dari BNI Syariah. Dalam menjalankan programnya, YHT berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu Bertahap, Berkelanjutan dan Multi Effect.

Three Main Principles of CSR Programs

The implementation of corporate social responsibility activities in the social and community sector is carried out entirely by the Hasanah Titik Foundation (YHT) in accordance with the guidance of BNI Syariah. In carrying out its program, YHT adheres to 3 (three) main principles, namely Gradual, Sustainable, and Multi-Effect.



Kegiatan yang Dijalankan

Selain prioritas program terkait pandemi Covid-19, untuk Tahun 2020, BNI Syariah telah melaksanakan program pengembangan dengan mengacu pada pilar-pilar program YHT, di antaranya adalah: [F.23][F.25] [GRI 103-3, 203-1]

1. Ekonomi:

- Modal Usaha untuk Dhuafa (77 orang);
- Modal Usaha untuk Disabilitas (6 orang);
- Pemberdayaan Ternak Kambing dan Budidaya Lele;
- Pelatihan Metode Green House;
- Kegiatan Ekonomi Lainnya.

2. Dakwah:

- Bantuan Beasiswa Tahfidz Quran;
- Operasional Dakwah (34 orang 10 lembaga)
- Pelatihan Khotib dan Baca Quran Braille;
- Pelatihan Manajemen Masjid;
- Pelatihan Muballigh Milenial (10 orang);
- Pembangunan Pesantren (18 Pesantren);
- Pembangunan dan Renovasi Masjid (59 Masjid);
- Pembangunan Rumah Dakwah di Pedalaman Suku Asmat Papua;
- Pembangunan Rumah Tahfidz Quran (4 lembaga);
- Pembebasan Lahan Masjid dan Pesantren (3 Masjid, 2 Pesantren);
- Pengadaan Mushaf Al Quran (608 eksemplar, 11 lembaga);
- Pengadaan Buku Literasi Keuangan Syariah (3,210 eksemplar);
- Pengadaan Buku Tuntunan Sholat (50 buku, 50 keluarga);

Activities Carried Out

In addition to program priorities related to the Covid-19 pandemic, in 2020, BNI Syariah has implemented a development program with reference to the pillars of the YHT program, including: [F.23] [F.25] [GRI 103-3, 203-1]

1. Economy:

- Business Capital for Dhuafa (77 people);
- Business Capital for the Disabled (6 people);
- Goat Farming and Catfish Farming;
- Green House Method Training;
- Other Economic Activities.

2. Da'wah:

- Tahfidz Quran Scholarship Aid;
- Da'wah Operations Needs (34 people and 10 institutions)
- Khotib training and Braille Quran Reading;
- Mosque Management Training;
- Millennial Muballigh Training (10 people);
- Islamic boarding school development (18 Islamic boarding school);
- Mosque construction and renovation (59 mosques);
- Construction of Da'wah Houses in the Asmat Papua Tribe;
- Construction of Tahfidz Quran Houses (4 institutions);
- Land acquisition for mosques and Islamic boarding schools (3 mosques, 2 Islamic boarding schools);
- Procurement of Al Quran Mushaf (608 copies, 11 institutions);
- Procurement of Islamic Financial Literacy Books (3,210 copies);
- Procurement of prayer guide books (50 books, 50 families);



- Pengadaan Peralatan Ibadah (5 lembaga);
- Reward Kegiatan Manajemen Masjid (9 Masjid).

3. Kesehatan:

- Bantuan Biaya Kesehatan (43 orang);
- Bantuan Kegiatan dan Santunan Khitanan Masal (504 orang, 9 lembaga);
- Kegiatan Donor Darah (50 orang);
- Bantuan Biaya Persalinan;
- Bantuan Kursi Roda;
- Layanan Ambulan Gratis.

4. Pendidikan:

- Bantuan Beasiswa Pegawai Dasar Internal Tahap 1 (1.110 orang) dan Tahap 2 (1.229 orang);
- Bantuan Beasiswa Sekolah (137 orang, 3 lembaga);
- Bantuan Beasiswa Universitas (473 orang, 14 universitas);
- Beasiswa Santri (115 santri, 6 pesantren);
- Operasional Pesantren dan Sekolah (6 pesantren 1, sekolah);
- Operasional Panti Asuhan (1 lembaga);
- Pembangunan dan Renovasi Pesantren (4 pesantren);
- Pembangunan dan Renovasi Sekolah (4 sekolah);
- Pengadaan Peralatan Sekolah (100 orang, 3 lembaga);
- Hasanah Corner/Rumah Baca (1 universitas, 3 lembaga);
- Insentif Guru (178 orang, 10 lembaga);
- Upgrading Guru (300 guru);
- Pelatihan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Pelatihan Kader Muadzin.

5. Sosial:

- Bantuan Pengadaan ATM Beras (5 lokasi);
- Bantuan Bencana Banjir, Kebakaran dan Erupsi Gunung Sinabung;
- Bantuan biaya hidup (5 orang);
- Bantuan Kegiatan Ramadhan (2.017 orang, 6 lembaga);
- Bantuan Bingkisan Lebaran (224 orang);
- Bantuan Pengadaan Kaki Palsu (5 orang);
- Bantuan Kegiatan Bakti Sosial (26 lembaga, 1.400 orang);
- Layanan Antar Jenazah Gratis (23 orang);
- Bantuan Operasional Ambulan (1 lembaga);
- Bantuan Operasional Muallaf (125 orang, 2 lembaga);
- Bantuan Paket Sembako (3.878 orang, 31 lembaga).
- Bantuan Paket Sembako Muslim Uighur (35 orang);
- Pelatihan Kebencanaan Banjir (50 orang);
- Pembangunan Asrama Yatim (1 lembaga);
- Bantuan Pengadaan Sumur (3 desa);
- Bantuan Pengadaan Sumur Bor (3 lokasi);
- Bantuan Pengadaan Air Bersih (2 lokasi);
- Bantuan Pengadaan Pompa Air (1 lokasi);
- Bantuan Santunan Dhuafa (492 orang);
- Bantuan Santunan Duka Cita (9 orang);
- Bantuan Santunan Yatim Dhuafa (3.885 orang);
- Sertifikasi Halal (9 orang);
- Bantuan Pengadaan Sepeda Motor untuk Disabilitas (1 unit);
- Pengadaan Mobil Hasanah Resque (1 unit);
- Pengadaan Perahu Karet (3 unit).

- Procurement of worship equipment (5 institutions);
- Mosque Management Activity Reward (9 Mosques).

3. Health:

- Health Cost Assistance (43 people);
- Activities assistance and mass circumcision compensation (504 people, 9 institutions);
- Blood Donation (50 people);
- Maternity Fee Assistance;
- Wheelchair Assistance;
- Free Ambulance Service.

4. Education:

- Funding for Internal Staff Scholarships for Phase 1 (1,110 people) and Phase 2 (1,229 people);
- School Scholarship Assistance (137 people, 3 institutions);
- University Scholarship Aid (473 people, 14 universities);
- 'Santri' Scholarships (115 people, 6 Islamic boarding school);
- Islamic boarding school and School Operations (6 Islamic boarding schools and 1 school);
- Orphanage operations (1 institution);
- Construction and renovation of Islamic boarding schools (4 Islamic boarding school);
- School Construction and Renovation (4 schools);
- Procurement of school equipment (100 people, 3 institutions);
- Hasanah Corner/Reading House (1 university, 3 institutions);
- Teacher incentives (178 people, 10 institutions);
- Teacher Upgrading (300 teachers);
- Training for Empowerment of Persons with Disabilities;
- Muadzin Cadre Training.

5. Social:

- Rice ATM Procurement Assistance (5 locations);
- Aid for Floods, Fire and Mount Sinabung Eruptions;
- Living expenses (5 people);
- Ramadan Activity Assistance (2,017 people, 6 institutions);
- Lebaran gifts (224 people);
- Assistance in Procurement of Fake Legs (5 people);
- Assistance for Social Service Activities (26 institutions, 1,400 people);
- Free Delivery Service (23 people);
- Ambulance Operational Assistance (1 institution);
- Muallaf Operational Assistance (125 people, 2 institutions);
- Food Packages Assistance (3,878 people, 31 institutions).
- Muslim Uighur Food Packages (35 people);
- Flood Disaster Training (50 people);
- Development of an Orphan Dormitory (1 institution);
- Well Procurement Assistance (3 villages);
- Drilling Well Procurement Assistance (3 locations);
- Clean Water Supply Assistance (2 locations);
- Water Pump Procurement Assistance (1 location);
- Donations for Dhuafa (492 people);
- Grief Compensation Assistance (9 people);
- Compensation for Orphans and Dhuafa (3,885 people);
- Halal Certification (9 people);
- Assistance for Procurement of Motorbikes for persons with Disabilities (1 unit);
- Procurement of Hasanah Resque Cars (1 unit);
- Procurement of Inflatable Boats (3 units).



MENJAGA KUALITAS LAYANAN DAN KEPERCAYAAN NASABAH

MAINTAINING QUALITY OF SERVICE AND CUSTOMER TRUST

Nasabah merupakan salah satu pemangku utama bagi BNI Syariah. Keberadaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perusahaan. Semakin besar jumlah nasabah, maka keberlangsungan usahanya akan lebih terjamin. Begitu pula sebaliknya. Becermin pada pentingnya nasabah, maka BNI Syariah terus berupaya untuk memberikan produk dan layanan terbaik dan setara kepada seluruh nasabah tanpa terkecuali. Melalui upaya itu, Perseroan berharap mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kepercayaan para nasabah, yang berhulu pada terwujudnya kepuasan di antara mereka.

Dalam upaya memberikan layanan terbaik, selama tahun 2020, BNI Syariah telah mengeluarkan berbagai program dan inovasi untuk nasabah. Di antaranya, Program "Semarak Berkah Hasanah," yaitu program pemberian hadiah langsung kepada nasabah baru atau eksisting dengan menempatkan dana *fresh fund* atau pemindahan dana deposito minimal sebesar Rp25 juta dan diblokir selama jangka waktu 6,12, bulan. Selain itu, setelah resmi ditunjuk pemerintah menjadi salah satu penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), BNI Syariah menyalurkan KUR melalui produk BNI KUR iB Hasanah per September 2020. [F.26]

Seperti produk dan layanan yang sudah ada sebelumnya, Perseroan senantiasa memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan inovasi yang dilakukan sehingga nasabah merasa aman dengan pilihannya. Dengan demikian, selama tahun pelaporan, tidak terdapat dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BNI Syariah. Selain itu, juga tidak terdapat produk dan layanan yang ditarik atau dibatalkan karena alasan tertentu. [F.27][F.28][F.29]

Komitmen BNI Syariah dalam memberikan layanan dan produk terbaik, serta setara kepada seluruh nasabah merupakan implementasi dan ketiaatan terhadap berbagai regulasi perlindungan nasabah sebagai konsumen. Regulasi itu, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [F.17]

Bagi BNI Syariah, Unit Layanan merupakan garda terdepan layanan kepada nasabah. Untuk itu, unit ini berkomitmen untuk berinovasi demi meningkatkan kepuasan nasabah melalui berbagai cara sebagai berikut:

1. Pemantauan berkala yang dilakukan oleh *Service Monitoring Unit* melalui program kunjungan cabang yaitu "Great Hasanah Day";
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman petugas terkait dengan produk dan ketentuan melalui tes *online* yang dilakukan secara berkala "Simple Competency Test";
3. Pengembangan *softskill* dan peningkatan motivasi petugas *frontliner* melalui program "Refreshment Layanan" yang dilakukan secara berkala;
4. Penguatan *positioning* BNI Syariah sebagai Bank dengan layanan yang memberikan nilai tambah dengan cara membudayakan *added value service* berupa layanan

Customer is one of the main stakeholders for BNI Syariah. Their existence greatly determines the development and sustainability of the Company. The greater the number of customers, the more secure the sustainability of the business will be, and vice versa. Reflecting on the importance of customers, BNI Syariah continues to strive to provide the best and equal products and services to all customers without exception. Through these efforts, the Company hopes to be able to maintain, even increase the trust of its customers, which results in satisfaction among them.

In an effort to provide the best service, in 2020, BNI Syariah has launched various programs and innovations for customers. Among other things, the "Semarak Berkah Hasanah" Program, which is a program of giving direct prizes to new or existing customers by placing fresh funds or transferring deposit funds of at least IDR 25 million and blocked them for a period of 6 to 12 months. In addition, after being officially appointed by the government to become one of the distributors of People's Business Credit (KUR), BNI Syariah distributed KUR through the BNI KUR iB Hasanah product as of September 2020. [F.26]

As with existing products and services, the Company always provides clear information about the products and innovations made so that customers feel safe with their choices. Thus, during the reporting year, there was no negative impact on the products and services issued by BNI Syariah. In addition, there are also no products and services that are withdrawn or canceled for some reason. [F.27] [F.28] [F.29]

The commitment of BNI Syariah in providing the best services and products, as well as being equal to all customers, is the implementation and compliance with various regulations on customer protection. The regulation, among others, the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection Financial Services Sector and the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. [F.17]

For BNI Syariah, the Service Unit is the front line of service to customers. For this reason, this unit is committed to innovating in order to increase customer satisfaction in the following ways:

1. Periodic monitoring is carried out by the *Service Monitoring Unit* through the branch visit program, namely "Great Hasanah Day";
2. Increasing knowledge and understanding of officers related to products and provisions through online tests "Simple Competency Test" that are conducted regularly;
3. Developing soft skills and increasing the motivation of frontliners through the "Service Refreshment" program which is carried out regularly;
4. Strengthening the positioning of BNI Syariah as a Bank with services that provide added value by cultivating added value services in the form of targeted services



yang tepat sasaran dan memberikan doa kebaikan kepada nasabah baik internal maupun eksternal yaitu "Semoga berkah dan Hasanah";

5. Pengembangan sistem penanganan pengaduan nasabah terpadu atau *Integrated Handling Complain System* oleh *Sharia Call Center Unit* sebagai bentuk penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018;
6. Pemberdayaan petugas melalui migrasi status kepegawaian BCO-BCO Syariah yang dikhususkan untuk layanan Hasanah Card dengan kompetensi *multiskill*.

Saat terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, salah satu bentuk pelayanan terbaik yang diberikan BNI Syariah adalah tetap mempertahankan layanan kepada nasabah dengan memberlakukan perubahan jadwal layanan dan jam operasional di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia. Pada kurun waktu 2 Juni-31 Agustus 2020 misalnya, jam operasional dipangkas, yaitu Senin-Kamis, buka dari pukul (08:00 - 14.30 waktu setempat), sedangkan Jumat, buka dari pukul (08:00-14.30/istirahat 11:30-13:00 waktu setempat). Selain mengubah jadwal dan jam operasional, layanan diberikan dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Bentuk lain dari layanan terbaik kepada nasabah, sekaligus sebagai implementasi dari POJK No. 1/POJK.07/2013, BNI Syariah menyediakan saluran pengaduan untuk nasabah, sekaligus memberikan solusi secepatnya. Menurut peraturan tersebut, jangka waktu untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Namun demikian, Perseroan berupaya semaksimal mungkin agar sebelum tenggat waktu 20 hari habis, pengaduan nasabah telah bisa diselesaikan.

Dalam menangani pengaduan nasabah, BNI Syariah telah menyusun dan menetapkan penyelesaian tersebut ke dalam BPP *Handling Complaint* (Buku Pedoman Perusahaan). Buku ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menangani pengaduan konsumen/nasabah. Terhadap pengaduan nasabah yang masuk, Unit Kerja Khusus di BNI Syariah akan menangani dan menyelesaikan secara optimal. Terkait performance penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang berpotensi kerugian finansial terhadap nasabah secara rutin dilakukan pelaporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sarana Pengaduan Nasabah [F.24]

BNI Syariah menyediakan media pengaduan nasabah melalui:

- Layanan 24 Jam BNI Call Center 1500046;
- Melalui akun Twitter @BNISyariah;
- Melalui akun Facebook PT Bank BNI Syariah;
- Surat resmi yang ditujukan ke BNI Syariah;
- Seluruh kantor cabang BNI Syariah;
- BNI SCO;
- Melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Mekanisme Pengaduan Nasabah

Setiap pengaduan yang masuk akan dicatat dalam formulir Aplikasi Pengaduan Nasabah dan di-input ke dalam HCS

and offering prayers of goodness to both internal and external customers. The prayer is "Semoga Berkah dan Hasanah" (Be Well and Good luck);

5. Development of an integrated customer complaint handling system or Integrated Complain Handling System by Sharia Call Center Unit as a form of implementation of the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 18/POJK.07/2018 dated September 10, 2018 and the Circular Letter (SE) of the Financial Services Authority No. 17/SEOJK.07/2018 dated December 6, 2018;
6. Empowerment of officers through BCO Syariah employee status migration which is devoted to Hasanah Card services with multiskill competencies.

When the Covid-19 pandemic occurred in 2020, one of the best forms of service provided by BNI Syariah was to maintain service to customers by implementing changes in service schedules and operating hours at all BNI Syariah Branch Offices throughout Indonesia. In the period of 2 June-31 August 2020, for example, operating hours are cut, namely Monday-Thursday, open from (08:00-14.30 local time), while Friday, open from (08: 00-14.30/break at 11:30- 13:00 local time). In addition to changing operating schedules and hours, services are provided while still paying attention to the Covid-19 protocol.

Another form of service to customers, as well as the implementation of POJK No. 1/POJK.07/2013, BNI Syariah provides a complaint channel for customers, as well as providing solutions as quickly as possible. According to the regulation, the period for following up and resolving complaints is no later than 20 working days after the date of receipt of the complaint. However, the Company makes every effort so that before the 20 day deadline runs out, customer complaints can be resolved.

In handling customer complaints, BNI Syariah has compiled and established the settlement in the Company Guidelines on Handling Complaint. This book becomes a guideline for all employees in handling consumer/customer complaints. Regarding incoming customer complaints, the Special Work Unit at BNI Syariah will handle and resolve them optimally. Regarding the performance of handling and resolving customer complaints that have the potential for financial loss to customers, reports are routinely carried out to Bank Indonesia and the Financial Services Authority.

Customer Complaints Facility [F.24]

BNI Syariah provides a media for customer complaints through:

- 24-hour BNI Call Center 1500046;
- Via @BNISyariah Twitter account;
- Through the Facebook account of PT Bank BNI Syariah;
- Official letter addressed to BNI Syariah;
- All BNI Syariah branch offices;
- BNI SCO;
- Through mass media, both print and electronic.

Customer Complaint Mechanism

Every incoming complaint will be recorded in the Customer Complaint Application form and input into the HCS (Handling



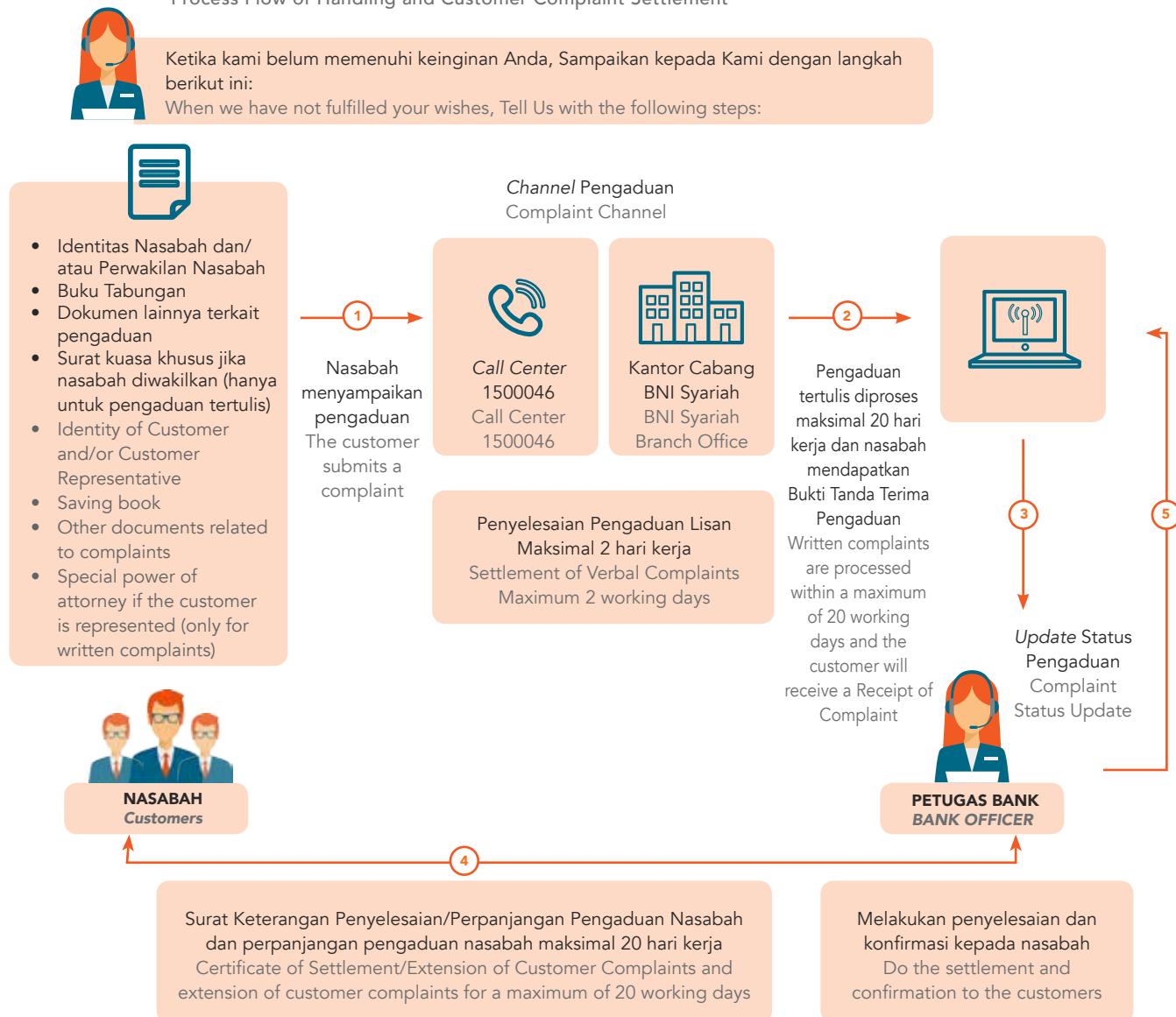
(Handling Complaint System) untuk diteruskan kepada unit-unit yang berkompeten dalam menanganinya. Adapun standar waktu penyelesaian pengaduan nasabah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja untuk pengaduan yang terkait masalah internal dan eksternal. Walau begitu, BNI Syariah berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan yang masuk secepatnya, tanpa harus menunggu 20 hari kerja. Berikut alur penyelesaian pengaduan nasabah:

Complaint System) to be forwarded to the competent units in handling it. The standard time for settlement of customer complaints refers to Bank Indonesia Regulations, which is a maximum of 20 (twenty) working days for complaints related to internal and external problems. Even so, BNI Syariah is committed to resolving incoming complaints as quickly as possible, without having to wait 20 working days.

Following is the flow of customer complaint settlement:

ALUR PROSES PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Process Flow of Handling and Customer Complaint Settlement



Penanganan Pengaduan Nasabah [F.24]

Berdasarkan data pelaporan eksternal BNI Syariah periode tahun 2020 ke pihak regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka persentase penyelesaian pengaduan nasabah periode bulan Januari-Desember 2020 sebesar 98,95% dari total pengaduan yang diterima sebanyak 110.093 pengaduan, dengan mayoritas terkait dengan sistem pembayaran melalui elektronik banking dengan rincian data sebagai berikut:

Handling of Customer Complaints [F.24]

Based on BNI Syariah's external reporting data for period 2020 to the regulator, in this case the Financial Services Authority (FSA), the percentage of customer complaints settlement for the January-December 2020 period was 98.95% of the total complaints received as many as 110.093 complaints, with the majority related to the payment system through electronic banking with the following details:



Jenis Transaksi Keuangan Types of Financial Transactions	Selesai Completed		Dalam Proses On-Process		Tidak Selesai Not Completed		Jumlah Pengaduan Total of Complaints
	Jumlah Total	Percentase Percentage	Jumlah Total	Percentase Percentage	Jumlah Total	Percentase Percentage	
Penghimpunan Dana Fund Raising							
TABUNGAN SAVINGS	3	0,003%					3
Penyaluran Dana Fund Distribution							
PEMBIAYAAN FINANCING	3	0,003%					3
Sistem Pembayaran Payment System							
ATM DAN ATAU KARTU DEBIT ATM AND OR DEBIT CARD	52.104	47,33%	968	0,88%			53.072
E-BANKING	51.934	47,17%	118	0,11%			52.052
KARTU KREDIT CREDIT CARD	944	0,86%	16	0,01%			960
KARTU PRABAYAR PREPAID CARD	3.242	2,94%	58	0,05%			3.300
STANDING INSTRUCTION	5	0,00%					5
Produk Kerjasama Cooperation Products							
BANCASSURANCE	698	0,63%					698
TOTAL	108.933	98,95%	1.160	1,05%			110.093

Survei Kepuasan Nasabah

Kepuasan nasabah merupakan kunci penting untuk keberlanjutan usaha BNI Syariah. Survei merupakan sarana bagi Perseroan untuk melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan, sekaligus menggali masukan dari nasabah untuk meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena pentingnya manfaat survei tersebut, BNI Syariah secara rutin mengadakan pengukuran kualitas layanan nasabah melalui "Program Survei Kepuasan Nasabah." Berdasarkan pengukuran survei kepuasan nasabah tahun 2020, indeks kepuasan nasabah BNI Syariah terhadap pelayanan sebesar 4,63 (skala 5) dengan kategori penilaian sangat memuaskan berdasarkan indeks lembaga survei eksternal. [F.30]

Kepatuhan Sosial dan Ekonomi

Dalam menjalankan operasional bisnis, BNI Syariah senantiasa tunduk dan patuh terhadap semua regulasi, termasuk regulasi yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Melalui kepatuhan itulah, maka Perseroan akan bisa menjalankan bisnis dengan tenang dan bisa fokus untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Kepatuhan pada aspek sosial dan ekonomi, antara lain, terkait regulasi mengenai upah, jam kerja, usia pekerja, perlakuan setara, hubungan industrial dengan karyawan, K3, tanggung jawab produk kepada nasabah, dan sebagainya. [GRI 103-1, 103-2]

Komitmen dalam menjalankan regulasi tersebut membawa hasil dengan tidak adanya sanksi atau denda yang dijatuhkan regulator atau otoritas yang menangani aspek sosial dan ekonomi kepada BNI Syariah selama tahun 2020. Pencapaian itu meneruskan prestasi tahun-tahun sebelumnya. [GRI 103-3, 419-1]

Customer Satisfaction Survey

Customer satisfaction is an important key for the sustainability of the BNI Syariah business. Surveys are means for the Company to communicate and engage stakeholders, as well as seek input from customers to improve service quality. Because of the importance of the survey's benefits, BNI Syariah routinely measures the quality of customer service through the "Customer Satisfaction Survey Program". Based on the measurement of the customer satisfaction survey in 2020, the BNI Syariah customer satisfaction index for service is 4.63 (on the scale of 5) with a very satisfactory rating category based on the external survey institution index. [F.30]

Social and Economic Compliance

In carrying out business operations, BNI Syariah always complies with all regulations, including regulations relating to social and economic aspects. Through this compliance, the Company will be able to run its business comfortably and be able to focus on realizing the targets that have been set. Compliance with social and economic aspects, among others, is related to regulations regarding wages, working hours, age of workers, equal treatment, industrial relations with employees, OHS, product responsibility to customers, and so on. [GRI 103-1, 103-2]

Commitment to implementing this regulation has resulted in the absence of sanctions or fines imposed by regulators or authorities dealing with social and economic aspects to BNI Syariah in 2020. This achievement continues the achievements of previous years. [GRI 103-3, 419-1]



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PT BANK BNI SYARIAH 2020 [G.2]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank BNI Syariah Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 25 Januari 2021

ANGGOTA DIREKSI Members of the Board of Directors

ABDULLAH FIRMAN WIBOWO
Direktur Utama
President Director

WAHYU AVIANTO
Direktur Keuangan dan Operasional
Director of Finance and Operations

IWAN ABDI
Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan
Director of Retail and Network Business

TRIBUANA TUNGGADEWI
Direktur Kepatuhan dan Risiko
Director of Risk and Compliance



STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE SUSTAINABILITY REPORT OF PT BANK BNI SYARIAH 2020 [G.2]

We, the undersigned, state that all information in the PT Bank BNI Syariah 2020 Sustainability Report has been fully published and we are fully responsible for the accuracy of the contents of this report.

This statement is made truthfully

Jakarta, 25 January 2021

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Members of the Board of Commissioners

FERO POERBONEGORO
Komisaris Utama
President Commissioner

MAX R. NIODE
Komisaris Independen
Independent Commissioner

KOMARUDDIN HIDAYAT
Komisaris Independen
Independent Commissioner

IMAM BUDI SARJITO
Komisaris
Commissioner



INDEKS ISI GRI STANDARDS

GRI STANDARD CONTENTS INDEX

Indikator Standar GRI GRI Standards Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Halaman Page	Omission Omissions
GRI 102: PENGUNGKAPAN UMUM 2016 GRI 102: 2016 GENERAL DISCLOSURE			
Pengungkapan Disclosure	PROFIL ORGANISASI ORGANIZATION PROFILE		
102-1	Nama Perusahaan Company name	39	
102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa Activities, brands, products and services	39,45	
102-3	Lokasi kantor pusat Head office location	39	
102-4	Lokasi operasi Location of operation	41,50	
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum Ownership and legal form	39,40,45	
102-6	Pasar yang dilayani Markets served	41,50	
102-7	Skala organisasi Organization scale	50,52	
102-8	Informasi mengenai karyawan Information about employees	39,53	
102-9	Rantai pasokan Supply chain	56	
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya Significant changes to the organization and its supply chain	57	
102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan The precautionary approach or principles	57	
102-12	Inisiatif eksternal External initiatives	58	
102-13	Keanggotaan asosiasi Association membership	60	
Pengungkapan Disclosure	STRATEGI STRATEGIES		
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior Statement from senior decision maker	8	
Pengungkapan Disclosure	ETIKA DAN INTEGRITAS ETHICS AND INTEGRITY		
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku Values, principles, standards and norms of behavior	80	
Pengungkapan Disclosure	TATA KELOLA GOVERNANCE		
102-18	Struktur tata kelola Governance Structure	65	



Indikator Standar GRI GRI Standards Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Halaman Page	Omission Omissions
Pengungkapan Disclosure	KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER ENGAGEMENT		
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan List of stakeholder groups	25,26	
102-41	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	55	
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan Identifying and selecting stakeholders	25	
102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan Approach on stakeholder engagement	26	
102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan The main topics and problems raised	26	
Pengungkapan Disclosure	PRAKTIK PELAPORAN REPORTING PRACTICE		
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi Entities included in the consolidated financial statements	18	
102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik Define report content and topic boundaries	19	
102-47	Daftar topik material List of material topics	22	
102-48	Penyajian kembali informasi Restatement of information	23	
102-49	Perubahan dalam pelaporan Changes in reporting	22	
102-50	Periode pelaporan Reporting period	18	
102-51	Tanggal laporan terbaru Date of most recent report	18	
102-52	Siklus pelaporan Reporting cycle	18	
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan Contact point for inquiries regarding reports	24	
102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI Claims that reporting is in accordance with the GRI Standards	19	
102-55	Indeks isi GRI GRI contents index	19	
102-56	Assurance oleh pihak eksternal External assurance	23	
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS 2016 2016 SPECIAL STANDARD DICLOSURES			
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPICS			
KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE			



Indikator Standar GRI GRI Standards Indicators		PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Halaman Page	Omission Omissions
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	22,90,95 91,95 92,93,95	
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 201: 2016 Economic Performance	201-1 201-3	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Obligations of defined benefit pension plans and other pension plans	93 95	
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG INDIRECT ECONOMIC IMPACT				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	22,127 127 131,134,136	
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investment and service support	131,134,136	
ANTIKORUPSI ANTI-CORRUPTION				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	22,83 83 83,84	
GRI 205: Antikorupsi 2016 GRI 205: 2016 Anti-Corruption	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Proven incidents of corruption and actions taken	84	
PERILAKU ANTI-PERSAINGAN ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	22,95 95 96	
GRI 206: Perilaku Anti- Persaingan 2016 GRI 206: 2016 Anti- Competitive Behavior	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli Legal measures for anti-competitive behavior, anti-trust and monopoly practices	96	
TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL TOPICS				
ENERGI ENERGY				



Indikator Standar GRI GRI Standards Indicators		PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Halaman Page	Omission Omissions
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya Explanation of Material Topics and Its Limitations Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	23,106 106 106	
GRI 302: Energi 2016 GRI 301: 2016 Energy	302-1 302-4	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption in the organization Pengurangan konsumsi energi Energy consumption reduction	106 106	
AIR WATER				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	23,107 107 107	
GRI 303: Air 2016 GRI 303: 2016 Water	303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber Water intake based on source	107	
KEANEKARAGAMAN HAYATI BIODIVERSITY				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	23,100 101,102 102,104	
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 GRI 304: 2016 Biodiversity	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung Locations of operations that are owned, leased, managed, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	104	
KEPATUHAN LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL COMPLIANCE				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	23,109 109 109	
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016 GRI 307: 2016 Environmental Compliance	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup Non-compliance with environmental laws and regulations	109	
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPICS				
KEPEGAWAIAN EMPLOYMENT				



Indikator Standar GRI GRI Standards Indicators		PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Halaman Page	Omission Omissions
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	24,116 116 117,118,119 117,119,120	
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1 401-2	Perekuturan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee recruitment and employee turnover Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees which are not provided to temporary or part-time employees	120	
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	24,124 124 125,126	
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016 GRI 403: 2016 Occupational Health and Safety	403-2 403-4	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan Types of work accidents and rates of work accidents, occupational diseases, lost work days and absences, as well as the number of work-related deaths Topik kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan Health and safety topics in formal agreements with trade unions	126 124,125	
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TRAINING AND EDUCATION				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	25,113 113,114 114	
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs to upgrade employee skills and the transition assistance programs	114	
KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: 2016 Management Approach	103-1 103-2 103-3	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	24,141 141 141	



Indikator Standar GRI GRI Standards Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Halaman Page	Omission Omissions
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016 GRI 419: 2016 Socio- Economic Compliance	419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi Non-compliance with social and economic laws and regulations	141	



DAFTAR INDEKS POJK 51/2017 [G.5]

INDEX LIST POJK 51/2017 [G.5]

No Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategies		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation of Sustainability Strategies	30
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Overview Of The Sustainability Performance Aspect		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi Economic Performance Overview	6
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance Overview	7
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial Social Performance Overview	7
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Sustainability Vision, Mission, and Value	41,42
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	39
C.3	Skala Perusahaan Company Scale	39
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities Conducted	45
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in the Association	60
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan Significant Organizational Changes	57
Penjelasan Direksi Description of the Board of Directors		
D.1	Penjelasan Direksi Description of the Board of Directors	8
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan Person in Charge of Sustainable Finance Implementation	66
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	71
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment of Sustainable Finance Implementation	77
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Relationship with Stakeholders	25



E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan Problems with Sustainable Finance Implementation	35
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to build Cultural Sustainability	90
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Target and Production Performance, Portfolio, Financing Target, or Investments, Income and Profit and Loss	92
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek Yang Sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Target and Portfolio Performance, Financing Target, or Investments in Similar Financial Instruments or Projects with the Implementation of Sustainable Financial	103
Kinerja Lingkungan Environmental Performance		
Umum General		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	109
Aspek Material Material Aspects		
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	105
Aspek Energi Energy Aspects		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Used	106
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievement for Energy Efficiency and the Use of Renewable Energy	106
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	107
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas that Are Nearby or Located in Conservation Areas or Have Biodiversity	N/R
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	N/R
Aspek Emisi Emission Aspects		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya The Amount and Intensity of Emission Generated Based on Its Types	N/R



F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievement Made to Reduce Emission	N/R
------	--	-----

Aspek Limbah Dan Efluen Waste and Effluent Aspects

F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The Amout of Waste and Effluent Generated by Type	N/R
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Mechanism for Managing Waste and Effluent	N/R
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) Spill Occuring (If Any)	N/R

Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Complaints Related to the Environment Aspects

F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan The Amount and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	N/R
------	--	-----

Kinerja Sosial Social Performance

F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen LJK Commitment, Issuer, or Public Company to Provide Equal Service for Products and/or Services to Consumers	138
------	---	-----

Aspek Ketenagakerjaan Manpower Aspects

F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Work Opportunity	116
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	120
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	121
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman Decent And Safe Work Environment	124
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Training and Capacity Building	114

Aspek Masyarakat Community Aspects

F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	131,134,136
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	139,140
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSLS) Environmental Social Responsibility (TJSLS) Activities	131,134,136

Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibilities of Sustainable Product/Service Development

F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan Sustainable Finance Product/Service Innovation and Development	138
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Products/Services That Have Been Evaluated for Customers' Safety	138
F.28	Dampak Produk/Jasa Impacts of Product/Service	138
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Withdrawn	138



F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan BerkelaJutan Survey of Customer Satisfaction with Sustainable Finance Products and/or Services	141
------	--	-----

**Lain-lain
Others**

G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, Jika Ada Written Verification from the Independent Parties, if any	23
-----	--	----

No Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
G.2	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keberlanjutan Statement of Board of Directors and Board of Commissioners' Members Regarding the Responsibility for Sustainability Report	142
G.3	Lembar Umpan Balik Feedback Form	155
G.4	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya Responses to Feedback Report from Previous Year	154
G.5	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 List of Disclosures in Accordance with POJK 51/2017	150



TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [G.4]

RESPONSE TO PREVIOUS YEAR REPORT FEEDBACK [G.4]

Selama tahun 2020, BNI Syariah tidak mendapatkan tanggapan spesifik terkait Laporan Keberlanjutan 2019 untuk perbaikan laporan berikutnya. Namun demikian, Perusahaan telah menyempurnakan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 agar dapat memenuhi panduan, baik GRI Standar maupun POJK No. 51/POJK.03/2017. BNI Syariah berharap laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi segenap pemangku kepentingan.

In 2020, BNI Syariah did not receive specific responses regarding the 2019 Sustainability Report to improve the next report. However, the Company has perfected its 2020 Sustainability Report in order to meet the guidelines of both GRI Standards and POJK No. 51/POJK.03/2017. BNI Syariah hopes that this report can become a useful information for all stakeholders.



LEMBAR UMPAN BALIK [G.3]

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah berkenan membaca Laporan Keberlanjutan PT Bank BNI Syariah 2020. Guna meningkatkan isi Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk mengisi Lembar Umpan Balik ini dengan melingkari salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
2. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bank BNI Syariah:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
3. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami.
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
4. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap.
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
5. Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?
a. Sudah bagus b. Belum bagus c. Tidak tahu
6. Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
.....

7. Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
.....

8. Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?
.....

Identitas Pengirim:

Nama :

Email :

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan:

- a. Pelanggan
- b. Pemegang Saham dan Investor
- c. Pegawai
- d. Pemerintah
- e. Mitra Kerja
- f. Media Massa
- g. Masyarakat
- h. Lain-lain, sebutkan.....

Mohon formulir ini dikirimkan kembali ke:

Divisi Komunikasi Perusahaan
PT Bank BNI Syariah
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8, Jakarta
Telepon +6221-29701946
Faksimile +6221-29667947



FEEDBACK FORM [G.3]

Thank you Mr./Ms./Mrs. who has read the Sustainability Report of PT Bank BNI Syariah 2020. In order to improve the contents of the Sustainability Report in the coming years, we hope that you are willing to fill out this Feedback Form by circling one of the answers and filling in the blank, after that, send it to us.

1. The Sustainability Report has given clear information about economic, social, and environmental performances conducted by PT Bank BNI Syariah:
 - a. Agree
 - b. Disagree
 - c. Do not know
2. This Sustainability Report has provided clear information regarding the fulfilment of PT Bank BNI Syariah's social and environmental responsibilities:
 - a. Agree
 - b. Disagree
 - c. Do not know
3. The material and data in this Sustainability Report is easy to understand and comprehend.
 - a. Agree
 - b. Disagree
 - c. Do not know
4. The material and data in this Sustainability Report are fairly complete.
 - a. Agree
 - b. Disagree
 - c. Do not know
5. Are the design, layout, graphics, and photos in this Sustainability Report good?
 - a. Good
 - b. Not Good
 - c. Do not know
6. What is the most useful information from this Sustainability Report?
.....

7. What information is considered less useful from this Sustainability Report?
.....

8. What is this Sustainability Report lack of and what information should be added to Sustainability Report in the coming years?
.....

Sender's Identity:

Name:

Email:

Identification by stakeholder category:

- a. Customer
- b. Shareholders and Investors
- c. Employees
- d. Government
- e. Work partners
- f. Mass media
- g. Public
- h. Miscellaneous, please specify.....

Please send this form back to:

Corporate Communications Division
PT Bank BNI Syariah
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, 3rd-8th fl, Jakarta
Phone + 6221-29701946
Fax + 6221-29667947



Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainable Good
Corporate Governance



Kinerja Ekonomi
Economic Performance



Kinerja Lingkungan
Environmental
Performance



Kinerja Sosial
Social Performance

LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2020
SUSTAINABILITY REPORT



Kantor Pusat BNI Syariah
Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-8
Jakarta 12950, Indonesia
T.: +62-21 2970 1946
F.: +62-21 2966 7947



www.bnisyariah.co.id